Draf

Peta Jalan 25 Tahun Nahdlatul Ulama

2026–2050

الإدارة العالية لجمعية
N
U
نهضة العلماء
١٣٤٤
1926

Peta Jalan NU 2025-2050: NU Digdaya 2050
Copyright © PBNU 2026, Hak cipta dilindungi undang-undang (All rights reserved)

Tim Penyusun:
Koordinator:
Prof. Dr. Rumadi, M.Ag

Tim Ahli:
Prof. Dr. KH. Abd Ala Basyir
KH. Thontowi Djauhar Musaddad, Lc., MA.
Dr. KH. Abdul Ghafur Maimoen, MA.
Prof. Dr. H.M. Asrorun Niam Sholeh, MA.
Dr. KH. Hilmy Muhammad, MA.
KH. Sholahudin Al-Ayub, M.Si.

Tim Pengolah:
Dr. KH. Abdul Moqsith Ghazali, MA.
KH. Samidi Husna
Dr. H. Ahmad Suaedy
Ny. Hj. Aissa Qotunnada Wahid, S.Psi.
Dr.H. Hasanudin Ali
Dr.H. Ahmad Ginanjar Syaban, M.Hum.
Ahmad Zainul Hamdi
Ah. Maftuhan

Tim Asistensi:
Marzuki Wahid.
Alamsyah M Djaifar
Afit Khomsani
Kholli Kholil

Pewajah isi dan sampul:
M. Alvin Nur Choironi

Jumlah Halaman:
viii + 212 hlm.

Ukuran :
14 x 21 cm.

Cetakan Pertama:
Juni 2026

Diterbitkan oleh
PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama)
Jl. Kramat Raya 165
Jakarta Pusat

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Nomor: **48/PB.01/A.II.01.03/99/02/2026**
Tentang:
PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN ROADMAP NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2027-2052

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Menimbang :
a. bahwa Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah ijtima'iyah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan perjuangan dan khidmahnya sebagai ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan umat, bangsa, dan peradaban dunia;
b. bahwa Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama telah mengamanatkan perlunya penyusunan Roadmap Nahdlatul Ulama 25 (dua puluh lima) tahun ke depan sebagai arah strategis pengembangan Nahdlatul Ulama;
c. bahwa penyusunan Roadmap dimaksud memerlukan pendekatan komprehensif, integratif, berbasis data, serta mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, teknologi, dan geopolitik global;
d. bahwa untuk melaksanakan amanat tersebut secara sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Roadmap Nahdlatul Ulama Tahun 2027 - 2052;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang Pembentukan Tim Penyusunan Roadmap Nahdlatul Ulama Tahun 2027 - 2052.

Mengingat :
1. Keputusan Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama Nomor: 03-E/MUKTAMAR-34/XII/2021 Tanggal 18-20 Jumadil Ula 1443 H/ 23-25 Desember 2021 M. Tentang Hasil Sidang Komisi Program Tahun 2021 di Lampung;
2. Pasal 8 dan 9; Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama.
3. Pasal 57 Ayat (2) dan (3); Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 28 Sya'ban 1447 H/16 Februari 2026 M.

Dengan senantiasa bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Roadmap Nahdlatul Ulama 2025 (dua puluh lima) Tahun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

MERAWAT JAGAT MEMBANGUN PERADABAN

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

Kedua : Mengamanatkan kepada Tim Penyusunan Roadmap Nahdlatul Ulama 25 (dua puluh lima) Tahun tersebut di atas, untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai berikut:

1. Menghimpun segala bahan yang diperlukan untuk penyusunan Roadmap Nahdlatul Ulama Tahun 2027 - 2052;
2. Menyusun rancangan naskah Roadmap Nahdlatul Ulama Tahun 2027 - 2052;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PBNU.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan dan kekeliruan, Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 05 Ramadhan 1447 H/ 23 Februari 2026 M
Berakhir Pada : 23 Mei 2026 M

KH. Miftachul Akhyar	KH. Akhmad Said Asrori	KH. Yahya Cholil Staquf	Drs. H. Saifullah Yusuf
Rais Aam	Katib Aam	Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Digdaya Persuratan dan distempel digital oleh Peruri Tera. Untuk verifikasi, kunjungi https://verifikasi.nu.id/surat dan masukkan nomor surat, atau scan QRCode dengan Peruri Code Scanner.

Nomor : 48/PB.01/A.II.01.03/99/02/2026 2 dari 3

MERAWAT JAGAT MEMBANGUN PERADABAN

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

Lampiran Surat Nomor: **48/PB.01/A.II.01.03/99/02/2026**

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
TIM PENYUSUNAN ROADMAP
NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2027-2052

Koordinator	:	**Prof. Dr. Rumadi, M.Ag.**
Tim Ahli	:	Prof. Dr. KH. Abd A'la Basyir
	:	KH. Thontowi Djauhari Musaddad, Lc., MA.
	:	Dr. KH. Abdul Ghafur Maimoen, MA.
	:	Prof. Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA.
	:	Dr. KH. Hilmy Muhammad, MA.
	:	KH. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si.
Tim Pengolah	:	Dr. KH. Abdul Moqsith Ghazali, MA.
	:	KH. Sarmidi Husna
	:	Dr. H. Ahmad Suaedy
	:	Ny. Hj. Alissa Qotrunnada Wahid, S.Psi.
	:	Dr. H. Hasanudin Ali
	:	Dr. H. Ahmad Ginanjar Sya'ban, M.Hum.
	:	Ahmad Zainul Hamdi
Tim Asistensi	:	Marzuki Wahid
	:	Alamsyah M Dja'far
	:	Afit Khomsani
	:	Kholili Kholil

KH. Miftachul Akhyar	**KH. Akhmad Said Asrori**	**KH. Yahya Cholil Staquf**	**Drs. H. Saifullah Yusuf**
Rais Aam	**Katib Aam**	**Ketua Umum**	**Sekretaris Jenderal**

3 dari 3

MERAWAT JAGAT MEMBANGUN PERADABAN

Daftar Isi

Daftar Isi ..... **ix**
Tim Penyusun ..... **iv**
Bagian I
Pengantar: Mengapa Menyusun Peta Jalan NU 25 Tahun? 1
Bagian II
Konteks Perubahan: Kekuatan Struktural dan Tantangan Transformasi NU 9
Bagian III
Jati Diri NU 37
Bagian IV
Visi-Misi, Kerangka Konseptual, Arah dan Strategi Utama Menuju NU 2050 55
1. Penguatan Konsolidasi Jam'iyah 73
a. Tata Kelola 75
b. Kaderisasi 80
c. Transformasi Digital 83

2. Kesejahteraan Sosial Ekonomi 87
a. Ekonomi 88
b. Kesehatan 92
c. Keluarga dan Kesetaraan Gender 95
3. Keunggulan SDM NU 99
a. Pendidikan Dasar Menengah 99
b. Pendidikan Tinggi 113
c. Pendidikan Vokasi 123
4. Pengembangan Pesantren dan Aswaja 131
a. Pesantren 131
b. Aswaja 140
5. Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan 147
a. Lingkungan Hidup 150
b. Energi Berkelanjutan 153
6. Penguatan Peran NU dalam Kemaslahatan Bangsa 159
a. Politik 155
b. Hukum 161
c. Demokrasi 166
d. Kepemimpinan dalam Gerakan Masyarakat Sipil 185
7. Penguatan Peran NU dalam Peradaban Dunia 199

Bagian I

Pengantar: Mengapa Menyusun Peta Jalan 25 Tahun NU (2026-2050)?

Memasuki abad kedua eksistensinya, Nahdlatul Ulama (NU) tidak lagi sekadar berdiri sebagai organisasi keagamaan tradisional, tetapi telah berkembang menjadi kekuatan sosial-keagamaan terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Dengan basis dimiliki, NU memiliki tanggung jawab historis yang sangat besar dalam membentuk arah kehidupan keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan global.

Perubahan zaman yang semakin cepat menempatkan NU pada titik persimpangan strategis. Lingkungan global dan domestik saat ini ditandai oleh kompleksitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Transformasi demografi menunjukkan bahwa generasi muda—yang akrab dengan teknologi digital, berpikir lebih terbuka, dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap transparansi serta partisipasi—akan menjadi aktor utama dalam kehidupan sosial dan keagamaan di masa depan. Generasi ini tidak hanya membutuhkan

Polarisasi, populisme, serta menguatnya politik identitas di berbagai negara menunjukkan bahwa agama sering kali berada dalam posisi rentan untuk disalahgunakan. Dalam konteks ini, NU memiliki peran penting sebagai penjaga Islam moderat (wasathiyah), yang mampu menjembatani perbedaan dan menjaga kohesi sosial. Namun, untuk menjalankan peran tersebut secara efektif, diperlukan arah strategis jangka panjang yang jelas dan terukur.

pendekatan dakwah yang berbeda, tetapi juga menuntut relevansi nilai-nilai keagamaan dalam konteks kehidupan modern.

Pada saat yang sama, dinamika sosial-politik mengalami pergeseran yang signifikan. Polarisasi, populisme, serta menguatnya politik identitas di berbagai negara menunjukkan bahwa agama sering kali berada dalam posisi rentan untuk disalahgunakan. Dalam konteks ini, NU memiliki peran penting sebagai penjaga Islam moderat (wasathiyah), yang mampu menjembatani perbedaan dan menjaga kohesi sosial. Namun, untuk menjalankan peran tersebut secara efektif, diperlukan arah strategis jangka panjang yang jelas dan terukur.

Di bidang teknologi, revolusi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara beragama. Media sosial, kecerdasan buatan, dan platform digital lainnya telah menjadi ruang baru dalam produksi dan distribusi pengetahuan keagamaan. Fenomena ini memiliki dua sisi: di satu sisi membuka peluang besar bagi dakwah yang lebih luas dan inklusif, namun di sisi lain juga membuka ruang bagi penyebaran paham keagamaan yang ekstrem, dangkal, atau bahkan disinformasi. Tanpa strategi yang matang, NU bisa tertinggal dalam memanfaatkan peluang sekaligus menghadapi risiko tersebut.

Lebih jauh lagi, perubahan-perubahan tersebut secara langsung akan memengaruhi corak keberagamaan masyarakat di masa depan. Pola keberagamaan tidak lagi bersifat homogen, melainkan semakin beragam dan cair. Otoritas keagamaan tradisional pun mengalami tantangan, karena masyarakat memiliki akses luas terhadap berbagai sumber pengetahuan alternatif. Dalam situasi ini, NU dituntut tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga melakukan inovasi agar tetap relevan dan dipercaya.

Dalam konteks global, situasi geopolitik menunjukkan kecenderungan menuju ketidakpastian. Konflik bersenjata, rivalitas kekuatan besar, krisis kemanusiaan, serta isu-isu seperti perubahan iklim dan migrasi global menjadi tantangan nyata bagi peradaban dunia. Agama, dalam banyak kasus, berada di tengah-tengah dinamika tersebut—baik sebagai sumber inspirasi perdamaian maupun, sayangnya, kadang menjadi alat konflik. NU, dengan pengalaman panjang dalam membangun Islam yang damai dan toleran di Indonesia, memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada tatanan global yang lebih harmonis.

Kesadaran akan kompleksitas tantangan tersebut semakin menegaskan pentingnya penyusunan peta jalan jangka panjang, khususnya dalam rentang waktu 25 tahun ke depan. Peta jalan ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan kerangka strategis yang memuat visi, arah kebijakan, prioritas program, serta indikator keberhasilan yang terukur. Dengan adanya peta jalan, NU dapat bergerak secara konsisten lintas generasi kepemimpinan, tanpa kehilangan arah akibat pergantian kepengurusan.

Selain itu, hasil-hasil Muktamar NU ke-34 di Lampung telah menghasilkan berbagai keputusan strategis yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan organisasi. Namun, tanpa sistematisasi dalam desain jangka panjang, keputusan tersebut berpotensi terfragmentasi dalam implementasinya. Oleh karena itu, peta jalan 25 tahun berfungsi sebagai instrumen integrasi, yang menghubungkan antara visi besar organisasi dengan program-program konkret di setiap masa khidmah.

Peta jalan ini juga memiliki fungsi penting sebagai alat konsolidasi internal. Dengan struktur organisasi NU yang sangat besar dan tersebar hingga ke tingkat akar rumput (ranting), diperlukan panduan bersama yang mampu menyelaraskan gerak

langkah seluruh elemen organisasi. Tanpa keselarasan tersebut, potensi besar NU justru bisa terhambat oleh fragmentasi dan ketidaksinambungan kebijakan.

Di sisi lain, peta jalan jangka panjang memungkinkan NU untuk bertransformasi dari organisasi yang responsif menjadi organisasi yang proaktif dan antisipatif. Artinya, NU tidak hanya merespons perubahan setelah terjadi, tetapi mampu membaca tren masa depan dan menyiapkan langkah-langkah strategis sejak dini. Pendekatan ini sangat penting dalam menghadapi dunia yang semakin tidak pasti *(uncertain),* kompleks *(complex),* dan ambigu *(ambiguous).*

Dengan demikian, penyusunan peta jalan 25 tahun bagi NU merupakan kebutuhan strategis yang tidak dapat ditunda. Ini bukan sekadar soal perencanaan teknis, tetapi menyangkut arah peradaban yang ingin dibangun. Peta jalan tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan antara tradisi dan inovasi, antara nilai-nilai keislaman dan tuntutan modernitas, serta antara kepentingan lokal dan tanggung jawab global.

Pada akhirnya, melalui peta jalan yang terarah dan berkelanjutan, NU diharapkan dapat terus memainkan peran historisnya sebagai penjaga Islam yang ramah, penopang keutuhan bangsa, dan kontributor aktif bagi perdamaian dunia. Peta jalan ini menjadi fondasi bagi NU untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga memimpin dalam membentuk masa depan umat dan kemanusiaan secara lebih luas.

Tujuan Penyusunan Peta Jalan 25 Tahun NU

Penyusunan Peta Jalan *(roadmap*) 25 tahun NU bertujuan untuk:

1. Memberikan arah strategis jangka panjang yang komprehensif, terukur, dan berkesinambungan bagi perjalanan organisasi dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Sebagai organisasi keagamaan terbesar yang memiliki pengaruh luas dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan kebangsaan, NU membutuhkan kerangka perencanaan yang mampu menjamin konsistensi visi di tengah dinamika perubahan kepemimpinan dan perkembangan global.
2. Mempersiapkan NU dalam menghadapi perubahan b**esar** yang meliputi aspek demografi, teknologi, sosial-politik, serta dinamika geopolitik global. Perubahan struktur penduduk, terutama meningkatnya dominasi generasi muda, menuntut NU untuk melakukan adaptasi dalam pendekatan dakwah, pendidikan, dan penguatan kaderisasi. Pada saat yang sama, kemajuan teknologi digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam penyebaran nilai-nilai keislaman. Peta jalan ini membantu NU merumuskan strategi yang tepat agar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif, sekaligus meminimalkan dampak negatifnya.
3. Memberikan kerangka prioritas program yang jelas, terukur, dan berkelanjutan bagi seluruh elemen organisasi di setiap periode kepengurusan. Dengan adanya peta jalan, setiap lembaga, badan otonom, serta struktur kepengurusan di berbagai tingkatan—mulai dari pusat hingga ranting—memiliki pedoman kerja yang terintegrasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh program yang dijalankan tidak berjalan secara parsial, tetapi saling mendukung dalam mencapai tujuan besar organisasi.
4. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas organisasi. Dengan adanya arah yang jelas, NU dapat melakukan

evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program serta menyesuaikan strategi jika diperlukan. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk bergerak lebih adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil *(outcome-oriented)*.

Lebih jauh lagi, penyusunan peta jalan 25 tahun ini dimaksudkan sebagai sarana konsolidasi dan integrasi seluruh potensi yang dimiliki NU. Dengan jaringan yang sangat luas dan beragam, diperlukan keselarasan visi dan koordinasi yang kuat agar potensi tersebut dapat dioptimalkan. Peta jalan berfungsi sebagai platform bersama yang menyatukan arah gerak, memperkuat sinergi, serta mendorong kolaborasi antar elemen organisasi.

Pada akhirnya, keseluruhan tujuan ini bermuara pada upaya memastikan bahwa NU tetap relevan, berpengaruh, dan mampu berkontribusi secara signifikan dalam membangun kehidupan keagamaan yang moderat, masyarakat yang adil dan sejahtera, serta peradaban dunia yang damai. Peta jalan 25 tahun bukan hanya alat perencanaan, tetapi merupakan manifestasi visi besar NU dalam menatap masa depan dengan penuh kesiapan, keteguhan nilai, dan kemampuan bertransformasi.

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Bagian II

Konteks Perubahan: Kekuatan Struktural dan Tantangan Transformasi NU

A. Pendahuluan

Perjalanan panjang NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan historis masyarakat tempat ia tumbuh. Selama perjalanan satu abadnya, NU tidak hanya hadir sebagai institusi keagamaan, tetapi juga sebagai entitas sosial yang membentuk praktik keberagamaan, nilai-nilai kehidupan, serta relasi sosial masyarakat Muslim Indonesia.

Namun demikian, memasuki paruh pertama abad ke-21, NU dihadapkan pada perubahan yang bersifat struktural dan multidimensional. Perubahan ini tidak lagi dapat dipahami sebagai dinamika sosial biasa, melainkan sebagai transformasi mendasar dalam cara masyarakat hidup, berinteraksi, dan membangun

identitas. NU berada pada suatu titik balik (*critical juncture*) yang akan sangat menentukan arah keberlanjutannya menuju tahun 2050.

Perubahan tersebut ditandai oleh beberapa tren utama, antara lain urbanisasi yang semakin masif, penetrasi teknologi digital yang hampir menyeluruh, pergeseran struktur demografi menuju masyarakat menua *(aging society),* serta meningkatnya mobilitas sosial dan pendidikan. Keempat faktor ini tidak hanya mengubah lanskap sosial Indonesia, tetapi juga menggeser pola relasi antara individu dengan institusi, termasuk institusi keagamaan.

Dalam kondisi demikian, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan bukan lagi terkait dengan ukuran atau besaran organisasi, melainkan terkait dengan tingkat relevansi dan kemampuan adaptasi. Dengan kata lain, tantangan utama NU ke depan bukan sekadar mempertahankan basis massa, tetapi memastikan bahwa kehadirannya tetap bermakna dalam kehidupan masyarakat yang terus berubah.

Secara empiris, posisi NU saat ini masih menunjukkan kekuatan yang signifikan. Berdasarkan data survei Alvara Research Center tahun 2025, sekitar 57,2 persen umat Islam Indonesia menyatakan berafiliasi dengan NU. Angka ini juga tidak jauh berbeda dengan hasil survei yang dilakukan lembaga survei lain seperti LSI dan Indikator Politik Indonesia. Angka ini sekaligus menegaskan bahwa NU tetap menjadi organisasi keagamaan dengan basis sosial terbesar di Indonesia.

Selain itu, praktik keagamaan yang menjadi ciri khas tradisi NU juga masih dijalankan secara luas. Ritual tahlilan, misalnya, dilakukan oleh sekitar 88,2 persen umat Islam . Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan berbasis tradisi yang selama ini diusung NU masih memiliki akar yang kuat dalam kehidupan masyarakat.

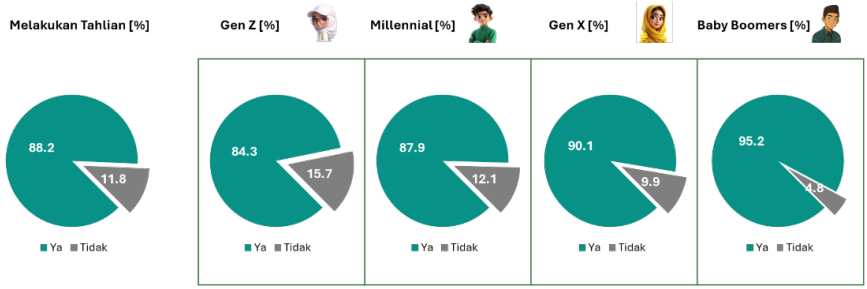

Figure 1. Prosentase Umat Islam Yang Melakukan Tahlilan (Sumber: Alvara, 2025)

Kedua indikator tersebut memperlihatkan bahwa secara kultural, NU masih memiliki legitimasi yang kuat di Indonesia. Tradisi, jaringan sosial, serta warisan keilmuan pesantren menjadi fondasi utama yang menopang keberlanjutan NU.

Namun demikian, jika dilihat lebih dalam, terutama melalui perspektif antar generasi, mulai terlihat adanya dinamika yang perlu mendapat perhatian serius. Tingkat kedekatan generasi muda, khususnya Generasi Z, terhadap NU relatif lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya. Fenomena ini mengindikasikan adanya perubahan dalam pola pewarisan identitas keagamaan.

Jika pada masa lalu identitas keagamaan cenderung diwariskan secara linier melalui keluarga dan lingkungan sosial, maka dalam konteks saat ini proses tersebut menjadi lebih terbuka dan tidak lagi bersifat deterministik. Generasi muda memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber informasi dan pengetahuan, sehingga memiliki ruang yang lebih besar untuk membentuk preferensi dan identitasnya secara mandiri.

Dalam kerangka ini, loyalitas terhadap organisasi keagamaan sekarang ini tidak lagi bersifat otomatis, melainkan harus dibangun melalui relevansi dan pengalaman yang dirasakan secara langsung.

Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari transformasi yang terjadi pada level masyarakat secara lebih luas. Urbanisasi, sebagai

salah satu faktor utama, telah mengubah struktur sosial dari yang semula berbasis komunitas menjadi lebih individualistik. Di wilayah pedesaan, praktik keagamaan umumnya bersifat kolektif dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Interaksi sosial yang intensif memungkinkan tradisi untuk terus diwariskan secara alami.

Sebaliknya, dalam konteks perkotaan, relasi sosial menjadi lebih longgar dan berbasis pilihan. Individu memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan aktivitas keagamaan yang diikuti, termasuk dalam memilih sumber rujukan keagamaan. Dalam situasi ini, institusi keagamaan tidak lagi menjadi satu-satunya otoritas, melainkan salah satu dari berbagai alternatif yang tersedia.

Perubahan serupa juga terjadi akibat digitalisasi. Perkembangan teknologi informasi telah membuka akses yang sangat luas terhadap berbagai konten keagamaan. Otoritas keilmuan yang sebelumnya terpusat pada lembaga atau figur tertentu kini mengalami desentralisasi. Individu dapat mengakses beragam perspektif keagamaan melalui platform digital, yang pada akhirnya membentuk pola keberagamaan yang lebih beragam.

Digitalisasi tidak hanya memperluas akses, tetapi juga mengubah cara penyampaian dan penerimaan pesan keagamaan. Konten yang singkat, visual, dan mudah dipahami cenderung lebih diterima oleh generasi muda dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang lebih tekstual dan formal. Hal ini menuntut adanya adaptasi dalam metode dakwah dan penyebaran nilai-nilai keagamaan.

Dalam konteks ini, NU menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah tetap dapat hadir secara relevan dalam ruang digital yang kompetitif.

Selain faktor urbanisasi dan digitalisasi, perubahan demografi juga menjadi elemen penting yang perlu diperhatikan. Indonesia saat ini berada dalam fase bonus demografi, di mana

proporsi penduduk usia produktif berada pada tingkat yang tinggi. Namun, kondisi ini bersifat temporer. Dalam beberapa dekade ke depan, Indonesia akan memasuki fase masyarakat menua, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia.

Perubahan ini membawa implikasi yang luas, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun kebijakan publik. Fokus pembangunan akan bergeser dari penciptaan lapangan kerja menuju penyediaan layanan kesehatan dan jaminan sosial yang berkelanjutan. Struktur keluarga juga akan mengalami perubahan, dengan meningkatnya kebutuhan terhadap sistem dukungan berbasis komunitas.

Perubahan ini membuka peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, NU memiliki jaringan sosial yang kuat yang dapat dioptimalkan untuk membangun sistem dukungan bagi kelompok lansia. Di sisi lain, NU juga perlu mengembangkan kapasitas kelembagaan yang mampu menjawab kebutuhan baru yang muncul dari perubahan demografi tersebut.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan tingkat pendidikan dan mobilitas sosial. Seiring dengan meningkatnya akses terhadap pendidikan, masyarakat menjadi lebih kritis dan rasional dalam memandang berbagai aspek kehidupan, termasuk agama. Hal ini berdampak pada perubahan cara individu berinteraksi dengan institusi keagamaan.

Dalam masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, pendekatan yang bersifat normatif dan otoritatif cenderung kurang efektif. Sebaliknya, pendekatan yang argumentatif, dialogis, dan berbasis solusi menjadi lebih relevan.

Selain itu, peningkatan mobilitas sosial juga mengubah aspirasi masyarakat. Individu yang mengalami peningkatan status ekonomi tidak hanya membutuhkan panduan spiritual, tetapi juga solusi praktis dalam kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan anak, kesehatan, perencanaan keuangan, serta pengembangan karir.

Dalam konteks ini, institusi keagamaan dituntut untuk tidak hanya hadir sebagai sumber nilai, tetapi juga sebagai penyedia layanan yang mampu menjawab kebutuhan konkret masyarakat.

Dengan mempertimbangkan berbagai perubahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa NU tidak sedang menghadapi satu tantangan tunggal, melainkan kombinasi dari berbagai faktor yang saling berinteraksi. Urbanisasi, digitalisasi, perubahan demografi, peningkatan pendidikan, serta mobilitas sosial secara bersama-sama membentuk lanskap baru yang kompleks.

Kompleksitas ini menuntut adanya perubahan pendekatan dalam melihat peran NU ke depan. Jika pada masa lalu kekuatan utama NU terletak pada basis kultural dan jaringan tradisional, maka di masa depan kekuatan tersebut perlu dilengkapi dengan kapasitas adaptasi yang lebih tinggi.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana NU dapat mempertahankan nilai-nilai dasar yang menjadi identitasnya, sekaligus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi? Jawaban atas pertanyaan ini tidak dapat ditunda. Hal ini karena periode 2026 hingga 2035 merupakan fase yang sangat krusial dalam menentukan arah masa depan Indonesia dan tentu saja juga NU. Pada periode ini, bonus demografi mencapai puncaknya, generasi muda mulai mengambil alih peran kepemimpinan, dan berbagai kebijakan strategis akan menentukan arah pembangunan jangka panjang.

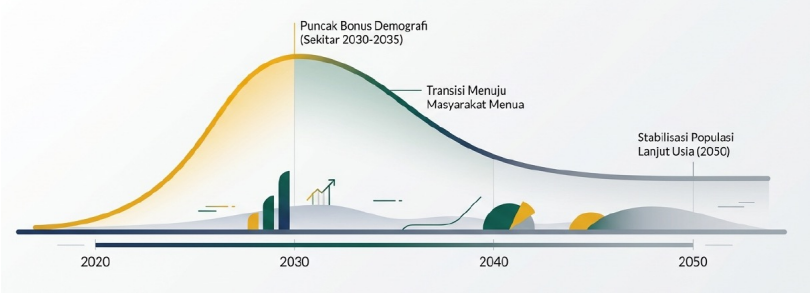

MOMEN PALING MENENTUKAN:
2026 - 2035

Bagi NU, periode ini merupakan "*window of opportunity*" sekaligus "*window of risk*". Jika mampu memanfaatkan momentum ini untuk melakukan transformasi, maka NU memiliki peluang besar untuk tetap relevan hingga tahun 2050. Sebaliknya, jika tidak, maka NU berpotensi mengalami penurunan peran secara gradual. Transformasi yang dimaksud bukan sekadar perubahan pada level program atau kegiatan, melainkan perubahan paradigma. NU perlu bergerak dari model organisasi yang berorientasi pada struktur menuju model yang berorientasi pada nilai dan layanan.

Perubahan ini dapat dirumuskan sebagai pergeseran dari pendekatan "*command and control*" menuju "*service and value*". Dalam pendekatan baru ini, NU tidak hanya berfungsi sebagai pemberi arahan, tetapi juga sebagai penyedia solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, NU diharapkan tidak hanya hadir dalam ruang ritual keagamaan, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan digital.

Pada akhirnya, keberlanjutan NU tidak hanya ditentukan oleh besarnya basis massa atau kuatnya tradisi, tetapi oleh kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam era yang ditandai oleh disrupsi dan kompleksitas seperti saat ini, organisasi yang mampu bertahan adalah organisasi yang memiliki fleksibilitas, relevansi, dan kapasitas inovasi.

NU memiliki modal sosial yang sangat besar. Namun, modal tersebut perlu diolah dan dikembangkan agar tetap memiliki daya guna di masa depan. Keputusan-keputusan yang diambil pada hari ini akan menentukan posisi NU di masa depan. Dan dalam dinamika sejarah, hanya organisasi yang mampu membaca zaman dan beradaptasi dengannya yang akan tetap relevan.

B. Potret Warga NU

Memahami arah masa depan NU tahun 2050 tidak dapat dilepaskan dari pemahaman yang mendalam terhadap kondisi

eksisting warga dan basis sosialnya saat ini. Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU tidak hanya merepresentasikan sebuah institusi formal, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, kultural, dan ekonomi umat Islam dalam skala yang sangat luas

Salah satu fondasi utama kekuatan NU terletak pada basis kultural yang sangat kuat. Tradisi keagamaan seperti tahlilan, maulid, dan berbagai bentuk amaliah lainnya menjadi medium yang menghubungkan individu dengan komunitas. Dalam banyak kasus, praktik-praktik ini menjadi ruang sosial di mana nilai-nilai keagamaan ditransmisikan, relasi sosial dibangun, dan identitas kolektif dipertahankan.

Dalam perspektif sosiologis, kekuatan NU tidak semata terletak pada struktur organisasinya, melainkan pada kemampuannya menjadi bagian dari "habitus sosial" masyarakat. Dengan kata lain, NU tidak hanya hadir sebagai organisasi yang diikuti, tetapi sebagai cara hidup yang dijalankan.

Namun demikian, kekuatan kultural ini perlu dibaca secara lebih hati-hati. Dominasi praktik keagamaan tidak selalu berbanding lurus dengan kedalaman afiliasi organisasi. Seseorang dapat menjalankan praktik yang identik dengan NU tanpa harus memiliki keterikatan yang kuat terhadap organisasi secara formal. Fenomena ini mengindikasikan adanya pemisahan antara "Islam kultural NU" dan "NU sebagai organisasi". Dalam jangka panjang, pemisahan ini dapat menjadi sumber kerentanan jika tidak dikelola dengan baik.

Dari sisi afiliasi organisasi, NU masih menunjukkan posisi dominan. Sekitar 57,2 persen umat Islam Indonesia menyatakan memiliki kedekatan dengan NU . Angka ini menegaskan bahwa NU tetap menjadi organisasi dengan basis sosial terbesar, jauh melampaui organisasi keagamaan lainnya.

Namun, dominasi ini tidak bersifat homogen. Ketika dianalisis lebih lanjut berdasarkan kelompok generasi, terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan. Generasi yang lebih tua, khususnya Baby Boomers, menunjukkan tingkat kedekatan yang lebih tinggi, sementara Gen Z menunjukkan tingkat kedekatan

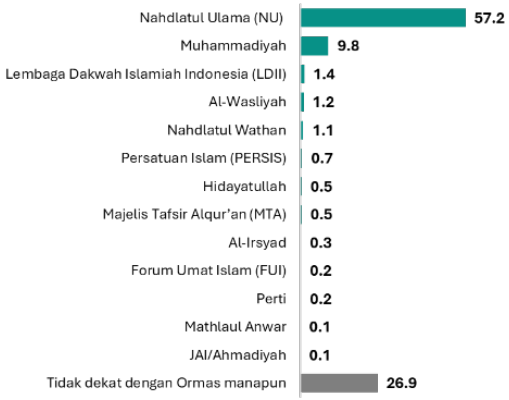

Gen Z	Millennial	Gen X	Baby Boomers
51,8	**56,1**	**59,6**	**71,4**
13,0	8,4	9,0	7,6
0,9	2,1	1,2	1,0
1,5	1,4	0,6	1,0
1,5	1,2	0,9	.
1,2	0,7	.	1,0
0,3	0,7	0,6	.
0,3	0,7	0,6	.
0,3	0,7	.	.
.	0,2	.	1,0
.	0,2	0,3	.
0,3	.	.	.
0,3	.	.	.
28,7	27,6	27,2	17,1
N = 338	**N = 431**	**N = 334**	**N = 105**

Figure 2. Afiliasi Terhadap Ormas Islam (Sumber: Alvara, 2025)

yang lebih rendah. Gen Z juga cenderung lebih banyak yang tidak terafiliasi dengan ormas manapun dibanding generasi-generasi yang lebih tua.

Perbedaan ini tidak sekadar mencerminkan variasi demografis, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan dalam pola pewarisan identitas. Pada generasi sebelumnya, identitas keagamaan dan afiliasi organisasi cenderung diwariskan secara linier melalui keluarga dan lingkungan sosial. Namun, pada generasi muda, proses tersebut menjadi lebih terbuka dan tidak lagi bersifat deterministik.

Generasi muda tumbuh dalam lingkungan yang lebih plural, lebih terbuka, dan lebih terhubung secara digital. Mereka memiliki akses terhadap berbagai sumber pengetahuan dan perspektif keagamaan. Dalam konteks ini, afiliasi terhadap organisasi tidak lagi bersifat otomatis, melainkan hasil dari proses seleksi dan preferensi individual.

Implikasi dari fenomena ini sangat signifikan. Jika tren ini berlanjut, maka dalam jangka panjang NU berpotensi mengalami penurunan tingkat afiliasi, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini bukan berarti NU akan kehilangan basis secara drastis, tetapi lebih kepada perubahan komposisi dan kedalaman keterikatan. Dengan kata lain, tantangan NU bukan hanya menjaga jumlah, tetapi menjaga kualitas afiliasi.

Profil sosial ekonomi warga NU juga memberikan gambaran penting mengenai karakteristik basis sosial organisasi ini. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas warga NU berada pada kelompok kelas menengah dan menengah ke bawah, dengan tingkat pendidikan yang didominasi oleh lulusan SMA atau sederajat .

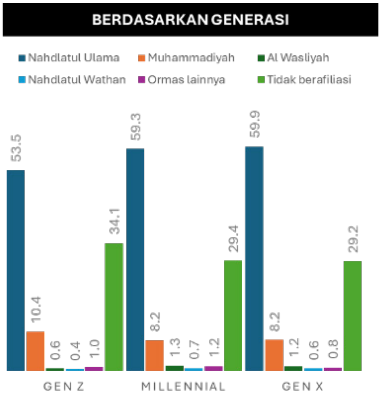

Disemua generasi, warga NU terlihat mendominasi, terutama di generasi Milenial dan Gen X

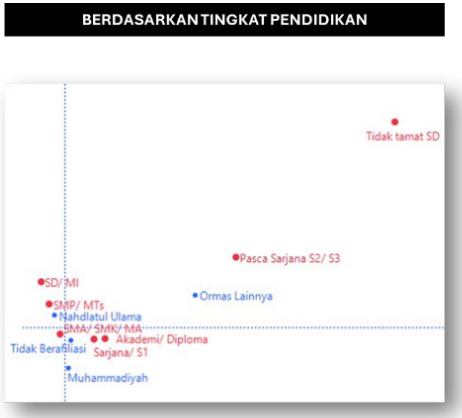

Dari sisi Tingkat Pendidikan, warga NU lebih banyak yang Pendidikan terakhirnya adalah SMA/SMK/MA dan SMP/MTS

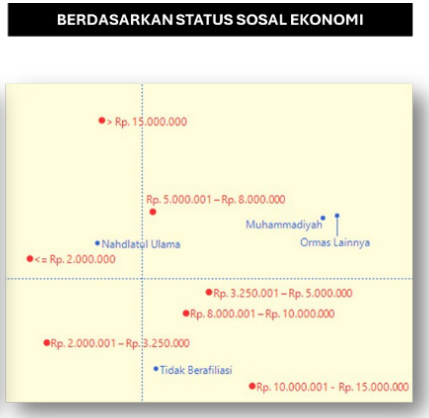

Dari sisi Status Sosial Ekonomi, warga NU mayoritas pada tingkat kelas menengah dan menengah ke bawah

Figure 3. Profil Demografi warga NU dan Ormas Islam Lain (Sumber: Alvara, 2024)

Struktur ini mencerminkan akar historis NU sebagai organisasi yang tumbuh di kalangan masyarakat akar rumput. Kedekatan dengan masyarakat bawah menjadi salah satu kekuatan utama NU, karena memungkinkan organisasi ini untuk memahami secara langsung realitas kehidupan umat.

Namun, dalam konteks perubahan sosial yang ditandai oleh meningkatnya mobilitas ekonomi dan pendidikan, struktur ini juga menghadirkan tantangan yang tidak mudah. Seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan pendapatan, individu cenderung mengalami perubahan dalam preferensi dan orientasi hidup.

Kelompok kelas menengah, misalnya, memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kualitas layanan, akses informasi, serta relevansi institusi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka kritis terhadap isu-isu sosial. Mereka juga tidak hanya membutuhkan panduan normatif, tetapi juga solusi praktis yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam kondisi ini, organisasi yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan kelas menengah berisiko kehilangan daya tarik. Hal ini menjadi penting mengingat kelas menengah merupakan kelompok yang terus berkembang dan memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk arah sosial dan budaya. Dengan demikian, NU menghadapi tantangan ganda, yakni mempertahankan basis akar rumput yang selama ini menjadi kekuatan utama, sekaligus meningkatkan relevansi di kalangan kelas menengah yang semakin besar dan dinamis.

Perubahan ekspektasi masyarakat terhadap peran organisasi keagamaan juga menjadi aspek penting yang perlu dicermati. Data survei juga menunjukkan bahwa warga NU tidak hanya membutuhkan layanan keagamaan dalam arti tradisional, tetapi juga layanan yang bersifat aplikatif dan kontekstual.

Dalam konteks layanan keagamaan, kebutuhan utama meliputi bimbingan keluarga sakinah, fiqih muamalah, serta metode mendidik anak . Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan pendekatan keagamaan yang mampu menjawab

persoalan kehidupan sehari-hari, bukan sekadar memberikan panduan normatif.

Lebih jauh, kebutuhan terhadap layanan di luar aspek keagamaan juga cukup tinggi. Layanan ekonomi menjadi kebutuhan utama, diikuti oleh layanan kesehatan dan pendidikan . Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang organisasi keagamaan sebagai institusi yang diharapkan mampu berperan dalam meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

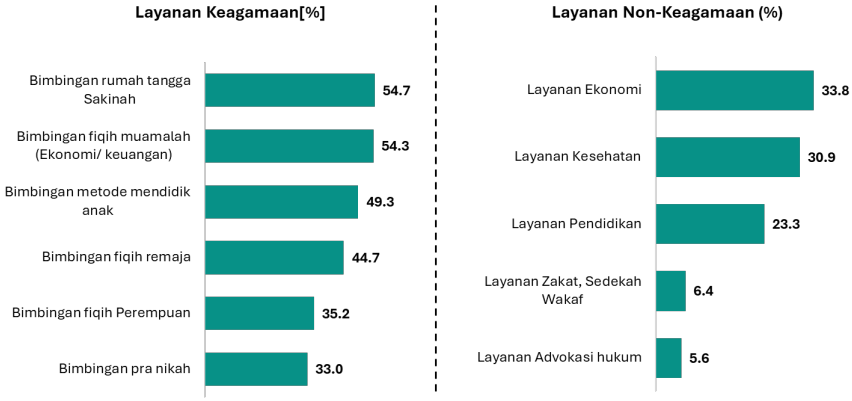

Figure 4. Kebutuhan Layanan Warga NU (Sumber: Alvara, 2025)

Perubahan ini menandai pergeseran peran organisasi keagamaan dari sekadar penyedia nilai menjadi penyedia layanan. Dalam konteks ini, legitimasi tidak hanya ditentukan oleh otoritas keilmuan, tetapi juga oleh kemampuan memberikan manfaat nyata.

Bagi NU, hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, NU memiliki jaringan sosial yang luas yang dapat dioptimalkan untuk menyediakan berbagai layanan. Di sisi lain, hal ini menuntut adanya peningkatan kapasitas kelembagaan, profesionalisme, serta inovasi dalam penyelenggaraan program. Selain aspek-aspek tersebut, faktor geografis dan mobilitas juga turut memengaruhi dinamika warga NU. Secara historis, NU

memiliki basis yang kuat di wilayah pedesaan, khususnya di Pulau Jawa. Namun, dengan meningkatnya urbanisasi, terjadi pergeseran distribusi penduduk ke wilayah perkotaan.

Urbanisasi tidak hanya mengubah lokasi geografis, tetapi juga mengubah pola interaksi sosial dan praktik keagamaan. Di kota, kehidupan cenderung lebih individualistik, dengan intensitas interaksi sosial yang lebih rendah. Hal ini berdampak pada melemahnya mekanisme transmisi tradisi yang selama ini menjadi kekuatan NU.

Selain itu, mobilitas yang tinggi juga menyebabkan individu tidak lagi terikat pada komunitas tertentu dalam jangka panjang. Hal ini memperkuat kecenderungan individualisasi dalam praktik keagamaan. Dalam konteks ini, NU perlu mengembangkan pendekatan yang mampu menjangkau masyarakat urban, yang memiliki karakteristik berbeda dengan masyarakat pedesaan. Pendekatan berbasis komunitas tradisional perlu dilengkapi dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika perkotaan.

Secara keseluruhan, potret warga NU saat ini menunjukkan adanya kombinasi antara kekuatan struktural yang besar dan dinamika perubahan yang signifikan. Kekuatan NU terletak pada basis kultural yang kokoh, jaringan sosial yang luas, serta legitimasi historis yang kuat. Namun, di sisi lain, terdapat berbagai faktor yang berpotensi menggerus kekuatan tersebut jika tidak diantisipasi dengan baik.

Faktor-faktor tersebut meliputi perubahan generasi, peningkatan pendidikan, mobilitas sosial, urbanisasi, serta perubahan ekspektasi masyarakat. Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan membentuk dinamika yang kompleks.

Dalam situasi seperti ini, pendekatan yang bersifat statis tidak lagi memadai. NU perlu mengembangkan pendekatan yang lebih dinamis dan adaptif, yang mampu merespons perubahan secara proaktif.

Dengan demikian, ada empat yang yang sedang dihadapi NU saat ini. Pertama, NU masih memiliki basis sosial dan kultural yang sangat kuat, yang menjadi modal utama dalam menghadapi masa depan. Kedua, terdapat tanda-tanda awal pergeseran, terutama di kalangan generasi muda dan kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan serta status ekonomi yang lebih tinggi. Ketiga, ekspektasi masyarakat terhadap peran NU semakin meluas, mencakup tidak hanya aspek keagamaan, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan. Keempat, perubahan geografis dan mobilitas sosial menuntut adanya pendekatan baru yang lebih adaptif terhadap konteks perkotaan dan digital.

Keempat poin ini menunjukkan bahwa NU berada dalam posisi yang tidak sederhana. Di satu sisi, NU memiliki modal sosial yang sangat besar. Di sisi lain, modal tersebut tidak bersifat statis dan dapat mengalami erosi jika tidak dikelola dengan baik.

C. Lanskap Demografi 2050: NU, Transformasi Struktural, dan Dunia Baru

Perubahan yang dihadapi NU tidak bersifat sektoral atau parsial, melainkan sistemik dan saling berkelindan. Demografi, urbanisasi, digitalisasi, struktur ekonomi, serta dinamika sosial budaya bergerak secara simultan dan menciptakan lanskap baru yang berbeda secara fundamental dari kondisi saat ini. Dalam lanskap tersebut, organisasi keagamaan seperti NU tidak hanya dituntut untuk bertahan, tetapi juga untuk mendefinisikan ulang peran dan fungsinya.

C.1. Transisi Demografi: Dari Bonus Demografi Menuju *Aging Society*

Salah satu determinan utama lanskap masa depan Indonesia adalah perubahan struktur demografi. Saat ini, Indonesia sedang berada pada fase bonus demografi, yaitu kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) berada pada titik tertinggi. Periode ini diperkirakan mencapai puncaknya pada rentang 2025–2035.

Bonus demografi sering diposisikan sebagai peluang ekonomi, karena meningkatnya jumlah tenaga kerja produktif dapat mendorong pertumbuhan. Namun, peluang ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, ketersediaan lapangan kerja, serta produktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi di masa depan tidak lagi dapat bergantung pada pertumbuhan jumlah penduduk, melainkan harus bertumpu pada peningkatan produktivitas per kapita . Ini merupakan pergeseran paradigma yang sangat penting. Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan "*quantity-driven growth*", tetapi harus beralih ke "*productivity-driven growth*".

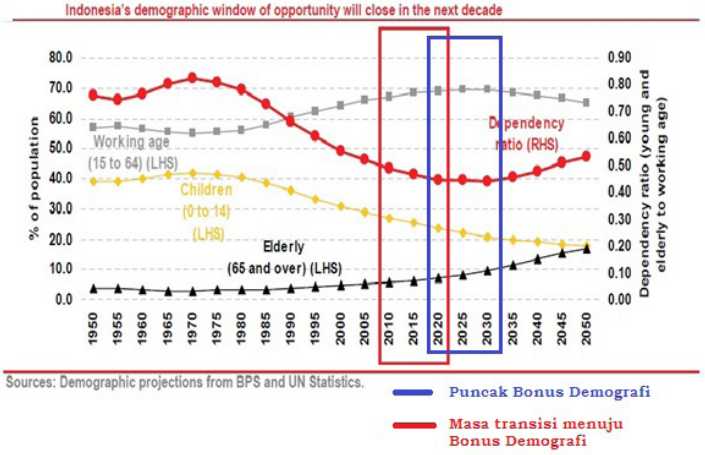

Figure 5. Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia (Sumber: BPS, 2025)

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 menunjukkan bahwa proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas akan melonjak drastis, dari 9,93 persen (26,8 juta jiwa) pada tahun 2020 menjadi sekitar 21,9 persen atau 72 juta jiwa pada tahun 2050. Sementara itu, angka harapan hidup Indonesia terus meningkat dari 72,51 tahun pada 2015 dan diproyeksikan mencapai 75,47 tahun pada 2045 (BPS, 2023).

Di sisi lain, tingkat kesuburan total (Total Fertility Rate/ TFR) terus mengalami penurunan, yang berarti jumlah penduduk usia muda relatif berkurang. Proyeksi BPS (2025) bahkan memperkirakan bahwa pada 2045, setiap tiga orang pekerja produktif harus menanggung satu penduduk lanjut usia. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara Asia Tenggara yang akan memasuki era *aging society* paling cepat di kawasannya.

Implikasi dari perubahan ini sangat luas. Pendidikan, keterampilan, dan inovasi menjadi faktor kunci. Dalam konteks ini, organisasi sosial-keagamaan seperti NU tidak bisa lagi hanya berperan dalam pembinaan moral, tetapi juga dalam peningkatan kapasitas manusia. Namun, dinamika demografi tidak berhenti pada bonus demografi. Memasuki periode 2036–2050, Indonesia akan menghadapi fase baru: meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia. Dengan kata lain, Indonesia akan bergerak menuju *aging society*.

Figure 6. Transisi Indonesia 2026 - 2050

Perubahan ini memiliki konsekuensi struktural. Rasio ketergantungan akan meningkat, di mana jumlah penduduk

yang tidak produktif (terutama lansia) bertambah relatif terhadap penduduk produktif. Hal ini akan memberikan tekanan pada sistem jaminan sosial, kesehatan, dan ekonomi secara keseluruhan.

Prinsip penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia adalah prinsip "kaya sebelum tua". Artinya, periode bonus demografi harus dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat sebelum memasuki fase *aging*.

Bagi NU, perubahan ini menghadirkan dua implikasi strategis. Pertama, NU harus terlibat dalam penguatan kualitas generasi produktif, terutama melalui pendidikan, ekonomi, dan pemberdayaan. Kedua, NU perlu mempersiapkan peran baru dalam menghadapi masyarakat menua, termasuk dalam penyediaan layanan sosial berbasis komunitas.

Dengan jaringan sosial yang luas dan akar komunitas yang kuat, NU memiliki potensi besar untuk menjadi aktor penting dalam sistem "*care economy*" berbasis masyarakat. Namun, potensi ini hanya dapat diwujudkan jika diikuti dengan transformasi kelembagaan yang memadai.

C.2. Urbanisasi Masif: Indonesia Menuju Negara Kota

Perubahan kedua yang tidak kalah signifikan adalah urbanisasi. Indonesia diproyeksikan akan mengalami urbanisasi yang semakin masif, sehingga secara *de facto* menjadi "negara kota". Urbanisasi bukan sekadar fenomena demografis dan geografis semata, tetapi juga transformasi sosial. Perpindahan penduduk dari desa ke kota membawa perubahan dalam pola interaksi, struktur komunitas, serta nilai-nilai yang dianut.

Dalam masyarakat pedesaan, kehidupan bersifat komunal. Tradisi keagamaan seperti tahlilan, maulid, dan pengajian rutin tidak hanya menjadi praktik religius, tetapi juga mekanisme sosial yang memperkuat kohesi komunitas. Dalam konteks ini, NU tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari struktur sosial tersebut. Namun, di wilayah perkotaan, struktur ini mengalami

Urbanisasi Masif: Indonesia Menjadi Negara Kota

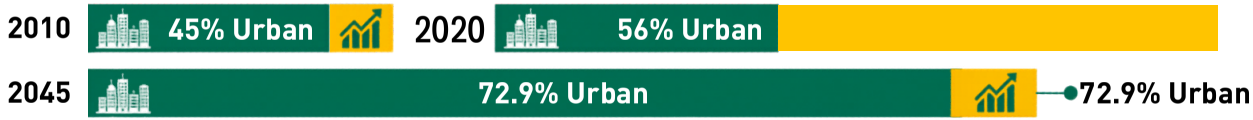

Tantangan Utama

Tantangan:
Kenaikan 1% urbanisasi di Indonesia baru menaikkan PDB per kapita 1.6% (rendah dibanding rata-rata Asia Pasifik).

Isu Utama:
Kemacetan, Urban Sprawl, Kawasan Kumuh.

Fokus Pembangunan infrastruktur harus beralih ke manajemen "smart city" dan transformasi terintergrasi. Urbanisasi harus dikelola menjadi mesin pertumbuhan (agglomeration effect)

disrupsi. Kehidupan menjadi lebih individualistik, mobilitas tinggi, dan waktu menjadi sumber daya yang terbatas. Interaksi sosial tidak lagi berbasis kedekatan geografis, tetapi berbasis kepentingan dan jaringan.

Dalam kondisi seperti ini, praktik keagamaan tidak lagi didorong oleh tekanan sosial komunitas, melainkan oleh preferensi individu. Seseorang dapat memilih untuk tidak terlibat dalam aktivitas keagamaan komunitas tanpa konsekuensi sosial yang signifikan.

Data BPS yang dirilis pada Mei 2024 mencatat bahwa pada tahun 2025 sekitar 60,7 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan, meningkat signifikan dari 49,8 persen pada 2010 dan 56,7 persen pada 2020. Angka ini diproyeksikan terus meningkat menjadi 63,4 persen pada 2030 dan 66,6 persen pada 2035.

Menurut proyeksi PBB, pada 2050 dua pertiga penduduk Indonesia akan bermukim di kawasan urban. Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas mencatat bahwa urbanisasi diperkirakan mencapai 72,9 persen pada 2045. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan terus menjadi magnet ekonomi, menarik jutaan penduduk dari daerah rural yang selama ini merupakan kantong-kantong basis massa NU.

Implikasi dari fenomena ini sangat besar bagi NU. Tradisi yang selama ini menjadi basis kekuatan NU berpotensi melemah jika tidak didukung oleh mekanisme baru yang sesuai dengan konteks urban. Pendekatan berbasis komunitas tradisional perlu dilengkapi dengan pendekatan baru, seperti komunitas berbasis minat, platform digital, dan layanan berbasis kebutuhan. NU tidak lagi cukup hadir sebagai institusi di tingkat lokal, tetapi harus mampu hadir dalam jaringan sosial yang lebih cair dan fleksibel.

C.3 Digitalisasi: Disrupsi Otoritas dan Fragmentasi Identitas

Digitalisasi merupakan faktor transformasional yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang

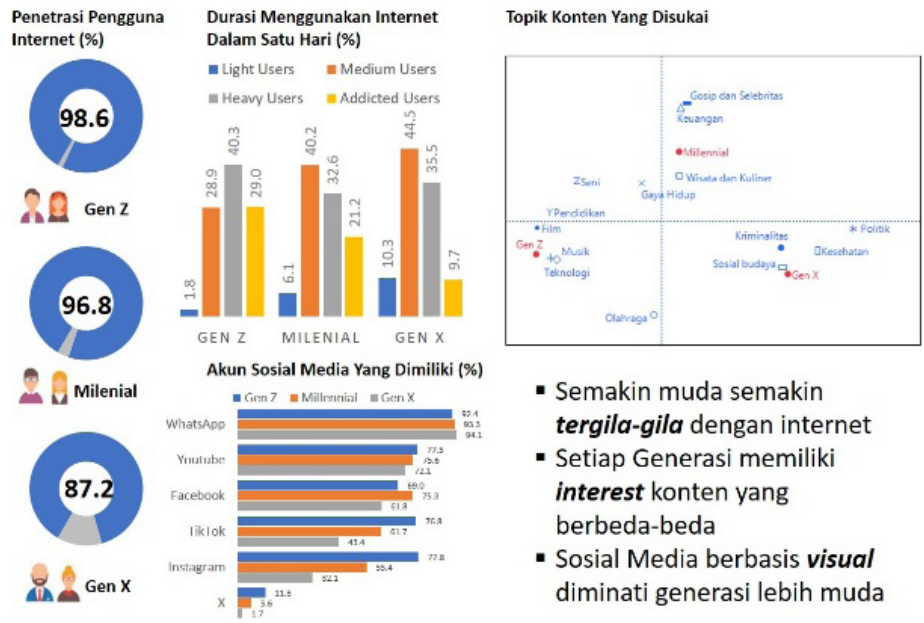

Sumber: Survei Nasional Alvara Research Center, 1800 responden, usia 15+ tahun, September 2024

keagamaan. Penetrasi internet yang semakin tinggi membuka akses terhadap berbagai sumber pengetahuan, termasuk pengetahuan keagamaan.

Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2025 menunjukkan penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 80.66%, dengan tingkat penggunaan tertinggi justru pada kelompok usia muda. Survei Alvara juga mencatat penggunaan internet rata-rata lebih dari 4 jam per hari, bahkan di Gen Z rata-rata bisa mencapai 7 jam sehari. Angka-angka ini menegaskan bahwa Gen Z adalah generasi yang paling "online" dibanding generasi lain. Ruang digital telah menjadi infrastruktur sosial baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pada Gen Z, internet menjadi sumber informasi keagamaan tertinggi dengan porsi 25,1 persen. Namun peran orang tua juga sangat besar, mencapai 21,3 persen, sementara ustadz atau kyai di lingkungan rumah berada di angka 23,6 persen. Ini menunjukkan bahwa keberagamaan generasi muda terbentuk di dua ruang sekaligus, ruang digital dan ruang keluarga

Digitalisasi bisa jadi menjadi salah satu faktor utama yang dapat menurunkan loyalitas terhadap ormas tradisional. Semakin tinggi penetrasi internet, semakin besar kemungkinan individu terpapar pada berbagai ideologi dan praktik keagamaan alternatif.

Hal ini menciptakan fenomena yang dapat disebut sebagai "fragmentasi identitas keagamaan". Individu tidak lagi terikat pada satu otoritas atau satu tradisi, melainkan dapat mengkombinasikan berbagai referensi dalam membentuk praktik keberagamaannya.

Studi PPIM UIN Jakarta (2020) menunjukkan bahwa media sosial berperan signifikan dalam membentuk pandangan keagamaan generasi muda, dan sebagian dari mereka terpapar konten keagamaan dari tokoh-tokoh tanpa latar belakang institusional yang jelas. Kondisi ini berbeda secara mendasar dari pola transmisi pengetahuan agama berbasis pesantren yang selama ini menjadi kekuatan NU. Dalam ekosistem digital, seorang penceramah dengan jutaan pengikut di media sosial dapat memiliki pengaruh yang jauh melampaui seorang kiai senior di pesantren, meskipun tanpa sanad keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena ini menciptakan tantangan struktural bagi otoritas keagamaan berbasis institusi seperti NU.

Dalam konteks ini, otoritas keagamaan menjadi lebih terdesentralisasi. Figur-figur baru muncul melalui platform digital, tanpa harus melalui jalur institusional yang formal. Kompetisi tidak lagi terjadi antar organisasi, tetapi antar konten, antar narasi, dan antar platform. Selain itu, digitalisasi juga mengubah cara komunikasi. Konten yang bersifat visual, singkat, dan interaktif menjadi lebih dominan. Hal ini menuntut perubahan dalam metode dakwah dan penyebaran nilai.

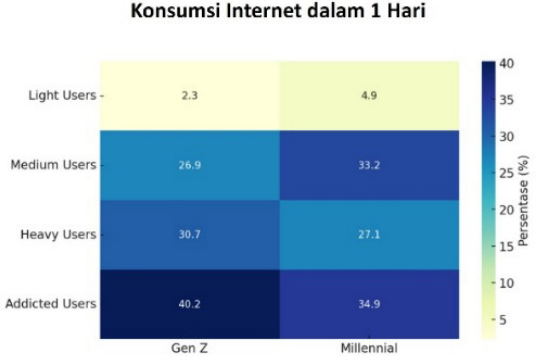

Lebih dari 70% Gen Z termasuk kategori *Heavy Users* dan *Addicted Users*. Hal ini menunjukkan bahwa Gen Z benar-benar tumbuh sebagai generasi *digital-native* yang menjadikan internet sebagai ruang utama dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk hiburan, pendidikan, maupun interaksi sosial

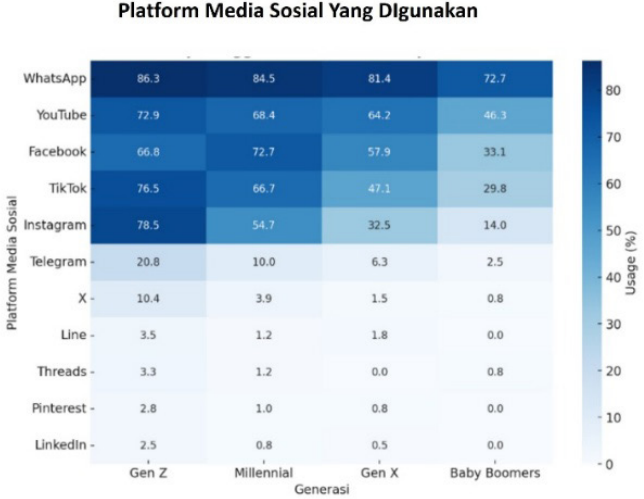

Figure 8. Perilaku Konsumsi Internet (Sumber: Alvara, 2025)

Bagi NU, tantangan digital bukan hanya soal hadir atau tidak hadir di ruang digital, tetapi bagaimana membangun ekosistem digital yang berkelanjutan. Hal ini mencakup produksi konten, pengelolaan platform, serta pembangunan komunitas digital.

Jika tidak mampu beradaptasi, maka NU berisiko kehilangan generasi muda yang tumbuh dalam ekosistem digital. Sebaliknya, jika mampu memanfaatkan digitalisasi secara strategis, maka NU memiliki peluang untuk memperluas pengaruhnya secara signifikan.

C.4 Pergeseran Struktur Sosial Ekonomi: *Aspiring Middle Class* dan Polarisasi

Perubahan lain yang penting adalah pergeseran struktur sosial ekonomi, terutama terkait dinamika yang terjadi di kelas menengah. Kelompok "*aspiring middle class*" menjadi segmen yang sangat penting. Mereka berada dalam posisi transisi, dengan aspirasi untuk naik kelas, tetapi masih rentan terhadap guncangan ekonomi.

Figure 9. Kelas Menengah Indonesia (Sumber: Adaptasi dari data BPS, 2025)

Kelompok ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelas bawah maupun kelas menengah mapan. Mereka memiliki aspirasi tinggi, tetapi juga menghadapi ketidakpastian. Data BPS (2024) memberikan gambaran yang lebih terperinci mengenai kondisi kelas menengah Indonesia. Jumlah penduduk kelas menengah tercatat menyusut dari 57,33 juta jiwa (21,45 persen) pada 2019 menjadi hanya 47,85 juta jiwa (17,13 persen) pada 2024, artinya sekitar 9,48 juta orang keluar dari kategori kelas menengah dalam lima tahun.

Sementara itu, kelompok *aspiring middle class* justru membesar dari 128,85 juta (2019) menjadi 137,5 juta jiwa atau 49,22 persen dari total penduduk pada 2024. BPS mendefinisikan kelas menengah sebagai kelompok dengan pengeluaran antara Rp2,04 juta hingga Rp9,9 juta per kapita per bulan, sedangkan *aspiring middle class* berada di kisaran Rp874.398 hingga Rp2,04 juta. Secara sektoral, 57 persen kelas menengah bekerja di sektor jasa, diikuti industri (22,98 persen) dan pertanian (19,97 persen).

Bagi NU, kelompok ini menjadi sangat strategis. Di satu sisi, mereka merupakan basis potensial yang dapat diperkuat. Di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, mereka dapat menjadi kelompok yang mudah berpindah preferensi. Namun, untuk dapat memainkan peran tersebut, NU perlu mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis program, bukan hanya berbasis aktivitas sporadis.

C.5. Estafet Generasi: Perubahan Nilai dan Orientasi

Menuju 2050, peran generasi muda akan semakin dominan. Generasi Z dan Milenial akan menjadi aktor utama dalam berbagai sektor, termasuk dalam organisasi keagamaan. Budaya organisasi harus beradaptasi dengan nilai-nilai *digital native* . Hal ini menunjukkan bahwa perubahan generasi bukan hanya soal usia, tetapi juga soal nilai dan cara berpikir.

Generasi muda cenderung lebih fleksibel, lebih pragmatis, dan lebih berbasis pengalaman. Mereka tidak hanya mencari kebenaran, tetapi juga relevansi. Mereka tidak hanya mengikuti, tetapi juga mengevaluasi. Pendekatan yang bersifat *top-down* dan normatif cenderung kurang efektif. Sebaliknya, pendekatan yang partisipatif, dialogis, dan berbasis pengalaman menjadi lebih relevan.

Proyeksi BPS (2023) menunjukkan bahwa pada 2045 Indonesia akan didominasi oleh tiga generasi: Gen Z (lahir 1997–2012), Milenial (lahir 1981–1996), dan Generasi Alpha (lahir setelah 2013). Ketiga generasi ini akan membentuk lebih dari 70 persen angkatan kerja dan menjadi pemilih terbesar dalam dinamika demokrasi. Data Alvara Research Center (2025) mencatat bahwa rata-rata penggunaan internet Gen Z Indonesia mencapai 7 jam per hari, sementara Milenial 5 jam per hari. Angka ini jauh melampaui generasi Baby Boomer yang hanya sekitar 2 jam per hari.

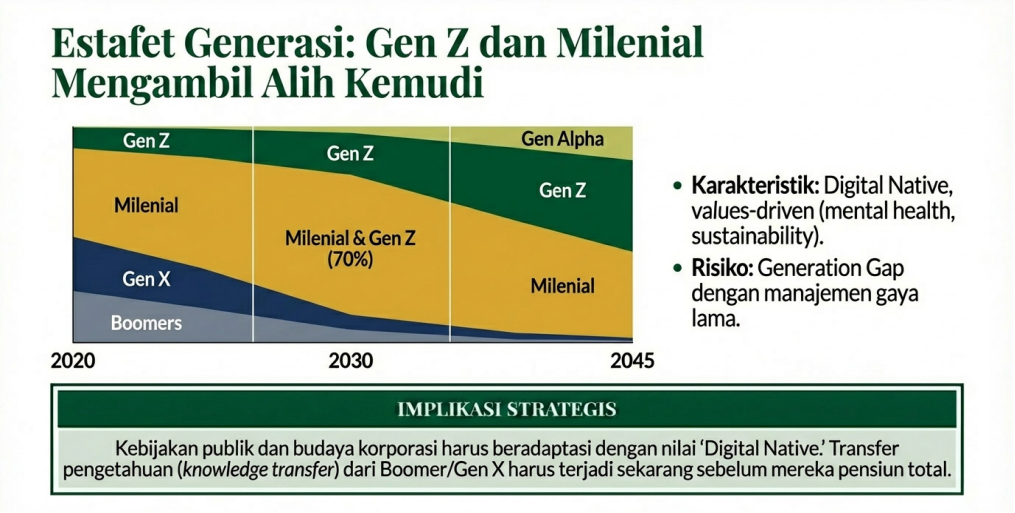

Figure 10. Pergeseran Generasi di Indonesia 2020 - 2045

Bagi NU, hal ini berarti bahwa model organisasi perlu mengalami penyesuaian. Transfer pengetahuan dari generasi lama ke generasi baru tidak dapat dilakukan secara satu arah, tetapi harus melalui proses yang lebih interaktif. Selain itu, ruang partisipasi bagi generasi muda perlu diperluas. Tanpa keterlibatan aktif generasi muda, sulit bagi NU untuk menjaga keberlanjutan dalam jangka panjang.

Survei Alvara (2025) memberikan data yang menarik sekaligus mengkhawatirkan: Gen Z merupakan generasi dengan tingkat nonafiliasi terhadap ormas Islam tertinggi dibandingkan generasi lainnya. Sementara Baby Boomer menunjukkan kedekatan yang kuat dengan NU secara turun-temurun, Gen Z lebih memilih untuk tidak terikat pada satu organisasi.

Pola ini konsisten dengan temuan global mengenai generasi muda dan institusi tradisional, di mana loyalitas institusional cenderung menurun digantikan oleh loyalitas berbasis nilai dan relevansi yang dirasakan secara langsung. Bagi NU, ini berarti bahwa strategi rekrutmen dan retensi anggota muda tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan warisan (inherited affiliation), melainkan harus berbasis daya tarik program, relevansi isu, dan kualitas keterlibatan.

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa lanskap Indonesia menuju 2050 akan ditandai oleh kompleksitas yang tinggi. Perubahan demografi, urbanisasi, digitalisasi, struktur ekonomi, serta dinamika generasi saling berinteraksi dan menciptakan lingkungan yang sangat dinamis.

Dalam lanskap seperti ini, tidak ada satu faktor tunggal yang menentukan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi akan ditentukan oleh kemampuannya dalam membaca dan merespons berbagai perubahan tersebut secara simultan. NU tidak hanya dituntut untuk berubah, tetapi untuk berubah secara strategis. Perubahan yang tidak hanya reaktif, tetapi proaktif. Tidak hanya mengikuti, tetapi juga membentuk arah perubahan.

Era Teknologi dan Dinamika Warga NU

Digital
–2026
Perang informasi & ekonomi digital

AI Agent
2026–2031
Disrupsi white collar jobs

AI Robot
2030–2037
Disrupsi blue collar jobs

Humanity
2036–2042
Redefinisi manusia vis-à-vis AI

New World
2040–2047
Tatanan geopolitik baru

Utopia/Dystopia
2047+
Post-scarcity atau risiko baru

Catatan: era teknologi tidak linear dan tidak sekuensial. Beberapa era berlangsung tumpang tindih.

Faktor Penentu Dinamika Jumlah Warga NU

FAKTOR 1

Urbanisasi & modernisasi

Mempercepat pergeseran nilai keagamaan, melemahkan ikatan tradisi.

FAKTOR 2

Pendidikan tinggi

Meningkatkan pola pikir kritis dan keterbukaan, yang bisa membuat afiliasi keagamaan makin cair.

FAKTOR 3

Digitalisasi & media sosial

Membuka akses pada ideologi dan praktik keagamaan baru, mendorong "resesi identitas" keagamaan berbasis ormas tradisional

FAKTOR 4

Kompetisi ormas & gerakan baru

Muhammadiyah, Salafi, dan komunitas hijrah menjadi alternatif yang makin kuat, khususnya di kalangan muda urban.

Bagian III
Jati Diri NU

Jati diri NU tidak lahir secara instan, tapi terbentuk melalui proses sejarah panjang, dialogis, dan kontekstual. Secara ringkas, jati diri NU dibentuk melalui proses perjumpaan antara tradisi keislaman klasik *(turast)*, realitas sosial Islam Indonesia, dan perubahan zaman. Karena itu, jati diri NU bersifat historis sekaligus normatif: mengakar pada tradisi yang kuat, tetapi terus ditafsirkan ulang sesuai zaman yang berubah.

Dalam Statuten Perkoempoelan Nahdlatoel Oelama atau Qanun Asasi yang dirumuskan para pendiri NU pada tahun 1926, Pasal 2, disebutkan:

> "Adapun maksoed perkoempoelan ini jaitoe memegang dengan tegoeh salah satoe dari mazhabnja imam empat jaitoe Imam Moehammad bin Idris asj-Sjafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Aboe Hanifah An-Ne'man, atoe Imam Ahmad bin Hambal, dan mengedjakan apa sadja yang mendjadikan kemaslahatan agama Islam".

Pada bagian selanjutnya (Pasal 3) juga disebutkan:

> "Oentoek mentjapai maksoed perkoempoelan ini maka diadakan ichtiar:
>
> a. Mengadakan perhoeboengan di antara Oelama'-Oelama' yang bermadzhab tersebut dalam fatsal 2.
> b. Memeriksa kitab-kitab sebeloemnya dipakai oentoek mengadjar, soepaja di ketahoei apakah itoe daripada kitab-kitabnja Ahli Soennah Wal Djama'ah atau kitab-kitabnja Ahli Bid'ah.
> c. Menjiarkan agama Islam di atas madzhab sebagai terseboet dalam fatsal 2 dengan djalan apa sadja jang baik.
> d. Berichtiar memperbanjak madrasah-madrasah jang beragama Islam.
> e. Memperhatikan hal-hal jang berhoeboengan dengan mesjid-mesjid, langgar-langgar dan pondok-pondok, begitoe djoega dengan hal ahwalnja anak-anak jatim dan orang-orang jang fakir miskin.
> f. Mendirikan badan-badan oentoek memadjoekan oeroesan pertanian, perniagaan, dan peroesahaan, jang tiada dilarang oleh sjara' agama Islam.

Dokumen tersebut menjadi spirit seluruh gerak dan khidmah yang dilakukan NU dari waktu ke waktu. Dalam dokumen Khittah NU yang dirmuskan dalam Muktamar ke27 pada 1984 di Situbondo Jawa Timur disebutkan, spirit dalam Qanun Asasi tersebut tetap dipegang teguh dimana NU bertujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan

dana mengamalkan ajaran Islam yang berhalauan ahlusunnah wal jama'ah dengan menganut salah satu madzhab empat, masing-masing Imam Abu Hanifah an-Nu'man (w. 150 H/767 M); Imam Malik bin Anas (w. 179 H/795 M); Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i (w. 204 H/820 M); dan Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H/855 M), serta untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia.

NU dengan demikian merupakan gerakan keagamaan *(harakah diniyah)* yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tenteran, adil dan Sejahtera. Dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuannya, NU melakukan serangkain ikhtiar yang berlandaskan pada dasar-dasar paham keislamalaman yang membentuk kepribadian yang khas sebagai jatidirinya. Jatidiri inilah yang kemudian disebut Khittah NU.

Khittah sebagai jatidiri NU menjadi pegangan NU dalam upaya mencapai visi dan cita-citanya, serta menghadapi dunia yang selalu berubah. Di sini NU dituntut untuk setia dengan jatidiri, tapi pada saat yang sama tidak menutup diri dengan perkembangan-perkembangan baru. Dalam kaitan ini, kaidah *istbatu as-stawabit wa taghyir al-mutghayyirat,* setia merawat keajegan sesuatu yang sudah seharusnya ajeg dan mengubah sesuatu yang memang bisa berubah, relevan menjadi pegangan dalam merespon berbagai perkembangan baru.

Khittah NU di sini dimaknai sebagai landasar berfikir, bersikap dan bertindak yang harus tercermin dalam tingkah laku, baik perseorangan maupun Keputusan-keputusan jam'iyah. Landasan tersebut adalah paham Islam ahlussunhan wal jama'ah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan Indonesia.

A. Tiga Aspek Pembentuk Jati Diri NU

Dalam perkembangannya, jatidiri NU dirumuskan dalam tiga rumpun yang saling terkait berkelindan dalam satu kesatuan, yaitu 1) jatidiri terkait *fikrah*, yaitu pemikiran yang membentuk identitas NU; 2) jatidiri *harakah*, yaitu gerakan sosial keagamaan NU; dan 3) jatidiri *amaliyah,* yaitu praktik kehidupan keagamaan yang dilakukan NU.

1. Jati Diri *Fikrah* NU

Jatidiri fikrah NU antara lain dituangkan dalam rumusan Khittah yang dihasilkan dalam Muktamar ke-27 Tahun 1984 di Situbondo Jawa Timur. Rumusan tersebut merupakan landasar berfikir, bersikap dan bertindak warga NU yang harus tercermin, baik dalam perilaku individu maupun kebijakan-kebijakan dan Keputusan organisasi.

Landasan dari perumusan tersebut adalah paham Islam ahlussunnah wal jama'ah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan Indonesia. Paham Islam ahlussunnah wal jama'ah yang hayati dan dipraktikkan NU didasarkan pada sumber ajaran Islam: al-Quran, hadits, ijma' dan qiyas. Dalam memahami Islam ahlussunnah wal jama'ah yang dihayati NU dengan memadukan tiga bidang yang membentuk satu kesatuan paham keislaman yang disandarkan pada ulama yang otoritatif.

Dalam bidang akidah (teologi) mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang fiqih mengikuti salah satu madzhab empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Madzhab-madzhab ini dibangun dengan mengikuti pemikiran fiqih Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Idris al-Syafi'i, dan Imam Ahamd bin Hanbal. Sedangkan dalam bidang tasawuf mengikuti ajaran Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi.

Bagi NU, tidak bidang keagamaan tersebut merupakan satu kesatuan yang membentuk kesempurnaan sebagai seorang

muslim. Hal ini pun tidak bisa dilakukan secara serampangan tapi harus disandarkan pada madzhab yang otoritatif. Tradisi bermadzhab, baik secara *qauli* maupun *manhaji* inilah menjadikan NU terus menjaga sanad keilmuan dari satu generasi ke generasi berikutnya sabil terus membuka diri dengan perkembangan-perkembangan baru. Tradisi demikian terbukti melahirkan watak keberagamaan yang moderat, seimbang, dan menghargai otoritas keilmuan, sekaligus menyadari keterbatasan nalar individual dalam menafsirkan teks keagamaan.

2. Jati Diri *Harakah* NU

Sedangkan jatidiri *harakah* NU mencerminkan NU sebagai gerakan sosial-keagamaan (*harakah diniyyah ijtima'iyyah*) yang berakar kuat pada nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) dan berpijak pada realitas sosial masyarakat Indonesia. NU tidak hadir sebagai gerakan revolusioner yang memutus tradisi, melainkan sebagai gerakan ***islahiyyah***—perbaikan dan pemberdayaan—yang dilakukan secara bertahap, moderat, dan kontekstual.

Sebagai harakah, NU menempatkan dirinya di tengah masyarakat *(wasathiyyah),* berperan menjaga keseimbangan antara **agama dan budaya, teks dan konteks,** serta **idealitas ajaran dan realitas kehidupan.** NU bergerak dengan sejumlah prinsip yang membentuk sikap kemasyarakatan NU, meliputi:

- Sikap *tawassuth* (moderat), yaitu sikap tengah yang berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan luruh di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dengan sikap ini, NU akan selalu menjadi panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun perbaikan dengan menghindari segala bentuk perilaku yang ekstrim *(tatharruf)*
- Sikap *tasamuh* (toleran), yaitu sikap toleran terhadap berbagai perbedaan dan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama terkait hal-hal *furu'* (cabang) yang

bersifat *khilafiyah,* serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.

- Sikap *tawazun* (seimbang), yaitu sikap selalu seimbang dalam berkhidmah baik kepada sesama manusia maupun kepada lingkungan. Khidmah tersebut selalu disinari ajaran Ilahi dalam menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.
- Sikap *i'tidal* (adil dan tegak lurus). Sikap *i'tidal* menegaskan bahwa NU selalu **berdiri di atas kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan,** tanpa terjebak pada sikap ekstrem, oportunistik, atau pragmatis. Dalam kehidupan sosial dan kebangsaan, sikap *i'tidal* tercermin pada komitmen NU untuk **bersikap adil terhadap siapa pun**, tidak larut dalam fanatisme kelompok, tidak mudah menghakimi, serta tidak membenarkan kezaliman atas nama agama, ideologi, atau kepentingan politik. NU berani mendukung yang benar dan mengoreksi yang keliru, baik terhadap kekuasaan maupun kelompok sosial, dengan cara yang beradab dan bertanggung jawab.
- *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, yaitu sikap untuk selalu peka dalam mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak segala hal yang bisa menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

Harakah NU juga berkomitmen kuat pada **keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,** menerima Pancasila sebagai dasar negara, dan memandang cinta tanah air (*hubbul wathan*) sebagai bagian dari iman. Dengan demikian, jati diri harakah NU adalah gerakan Islam yang religius, nasionalis, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (*maslahah 'ammah*).

3. Jati Diri *Amaliyah* NU

Jati diri ***amaliyah*** **Nahdlatul Ulama** merupakan manifestasi nyata dari pemahaman keagamaan NU yang bersumber dari ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah dalam bidang **akidah, fikih, dan tasawuf.** Amaliyah NU tidak hanya bermakna ritual ibadah, tetapi juga mencakup laku hidup keagamaan yang menyatu dengan tradisi dan budaya masyarakat. Amaliyah NU tercermin dalam praktik-praktik keagamaan yang hidup di tengah masyarakat, seperti **tahlilan, yasinan, istighatsah, maulid Nabi, manaqiban, ziarah kubur,** serta berbagai bentuk doa dan wirid bersama. Amalan-amalan ini dipahami NU sebagai sarana memperkuat keimanan, mempererat ukhuwah, dan menanamkan nilai spiritual dalam kehidupan sosial.

Lebih dari itu, amaliyah NU juga tampak dalam tradisi ***ngaji*** **kitab kuning,** penghormatan kepada ulama, adab dalam menuntut ilmu, serta etos keberagamaan yang santun dan berakhlak. Amaliyah tidak diposisikan sebagai simbol belaka, melainkan sebagai media pendidikan ruhani dan sosial yang membentuk karakter umat. Dengan demikian, jati diri amaliyah NU adalah keberagamaan yang **berakar pada tradisi, bersumber dari dalil yang mu'tabar, serta berorientasi pada pembinaan akhlak dan harmoni sosial.** Amaliyah NU menjaga kesinambungan warisan ulama salaf sekaligus relevan dengan budaya dan dinamika kehidupan umat Islam di Indonesia.

B. Mabadi' Khaira Ummah

Jatidiri NU juga dilandasi pilar-pilar yang membentuk pribadi dan umat yang terbaik yang disebut sebagai *mabadi' khaira ummah.* Dalam Munas Alim Ulama di Lampung pada 1992, *mabadi' khaira ummah* dirumuskan sebagai *al-mabadi' al-khamsah* (lima pilar) sebagai pengembangan dari *mabadi' khaira ummah* yang sudah ada sebelumnya. Jika sebelumnya *mabadi'*

khaira ummah hanya memuat tiga pilar, yaitu *as-shidqu* (jujur), *al-amanah wal wafa bil 'ahdi* (amanah dan menepati janji) dan *at-ta'awun* (gotong royong), dalam Munas Alim Ulama 1992 ditambahkan dua pilar, yaitu *al-'adalah* (bersikap adil) dan *al-istiqamah* (konsisten). Berikut ini penjelasan singkat *mabadi' khaira ummah* sebagaimana dirumuskan Munas Alim Ulama 1992:

1. *As-Shidqu* (Jujur)

Butir ini mengandung arti kejujuran/kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan. Kejujuran/kebenaran adalah satunya kata dengan perbuatan, ucapan dengan pikiran. Apa yang diucapkan sama dengan yang di bathin. Jujur dalam hal ini berarti tidak plin-plan dan tidak dengan sengaja memutarbalikkan fakta atau memberikan informasi yang menyesatkan. Jujur tidak hanya kepada orang lain, tapi juga jujur pada pada diri sendiri. Termasuk dalam pengertian ini adalah jujur dalam bertransaksi dan jujur dalam bertukar pikiran. Jujur dalam bertransaksi artinya menjauhi segala bentuk penipuan demi mengejar keuntungan. Jujur dalam bertukar pikiran artinya mencari mashlahat dan kebenaran serta bersedia mengakui dan menerima pendapat yang lebih baik.

2. *Al-amanah wal Wafa' bil-'Ahdi* (Dapat Dipercaya dan Memenuhi Janji)

Butir ini memuat dua istilah yang saling terkait, yakni *al-amanah* dan al-*wafa' bil 'ahdi*. Yang pertama secara lebih umum maliputi semua beban yang harus dilaksanakan, baik ada perjanjian maupun tidak. Sedang yang disebut belakangan hanya berkaitan dengan perjanjian. Kedua istilah ini digambungkan untuk memperoleh satu kesatuan pengertian yang meliputi: dapat dipercaya, setia dan tepat janji. Dapat dipercaya adalah sifat yang diletakkan pada seseorang yang dapat melaksanakan

semua tugas yang dipikulnya, baik yang bersifat *diniyah* maupun *ijtima'iyyah*. Dengan sifat ini orang menghindar dari segala bentuk membengkalaikan dan manipulasi tugas atau jabatan. Lawan dari amanah adalah khianat termasuk salah satu unsur sifat munafiq, yaitu orang yang apabila diberi kepercayaan untuk menjalankan Amanah tapi berkhianat.

3. *Al-'Adalah* (Bersikap Adil)

Bersikap adil *(al-'adalah)* mengandung pengertian obyektif, proposional dan taat asas. Butir ini mengharuskan orang berpegang kepada kebenaran obyektif dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Distorsi penilaian sangat mungkin terjadi akibat pengaruh emosi, sentimen pribadi atau interes tertentu. Distorsi semacam ini dapat menjerumuskan orang ke dalam kesalahan fatal dalam mengambil sikap terhadap suatu persolan. Hal ini berakibat pada kekeliruan bertindak yang bukan saja tidak menyelesaikan masalah, tetapi menambah keruwetan. Lebih-lebih jika persolan menyangkut perselisihan atau pertentangan diantara berbagai pihak. Dengan sikap obyektif dan proporsional distorsi semacam ini dapat dihindarkan.

4. *At-Ta'awun* (Gotong Royong)

At-ta'awun merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat, karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Pengertia *ta'awun* meliputi tolong menolong, setia kawan dan gotong royong dalam kebaikan dan taqwa. Imam al- Mawardi mengaitkan pengertian *al-birr* (kebaikan) dengan kerelaan manusia dan takwa dengan ridla Allah SWT. Memperoleh keduanya berarti memperoleh kebahagiaan yang sempurna. *Ta'awun* juga mengandung pengertian timbal balik dari masing-masing pihak untuk memberi dan menerima. Oleh karena itu, sikap *ta'awun* mendorong setiap orang untuk berusaha dan bersikap kreatif agar dapat memiliki sesuatu yang dapat

Dalam kerangka yang lebih luas, ***mabadi'*** ini sejatinya memiliki makna yang jauh lebih struktural dan institusional, yaitu sebagai fondasi nilai (value foundation) yang harus menjiwai seluruh tata kelola organisasi. Artinya, ***mabādi'*** ini bukan hanya diinternalisasikan pada diri kader, tetapi juga dinormalkan dalam sistem, mekanisme, dan budaya organisasi NU di semua tingkatan.

disumbangkan kepada orang lain dan kepada kepentingan bersama. Mengembangkan sikap *ta'awun* berarti juga mengupayakan konsolidasi untuk mengupayakan terwujudnya cita-cita bersama.

5. *Al-Istiqamah* (Konsisten)

Istiqamah mengandung pengertian ajeg-jejeg, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Ajeg-jejeg artinya tetap dan tidak bergeser dari jalur *(thariqah)* sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan rasul-Nya, tuntunan yang diberikan oleh *salafus shalih* dan aturan main serta rencana-rencana yang disepakati bersama. Kesinambungan artinya keterkaitan antara satu program dengan program yang lain, dan antara satu periode dengan periode yang lain. Dengan demikian *istiqamah* mengandaikan semuanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling menopang seperti sebuah bangunan. Sedangkan makna berkelanjutan adalah bahwa pelaksanaan program-program tersebut merupakan proses yang berlangsung terus menerus tanpa mengalami kemandekan, merupakan suatu proses maju melakukan kebaikan *(islahiyah)* bukannya berjalan di tempat *(stagnant).*

Mabadi' Khaira Ummah sebagai Budaya Organisasi

Mabādi' Khaira Ummah sering dipahami sebagai prinsip moral untuk membentuk kepribadian Muslim dan warga NU yang saleh secara individual. Namun, dalam kerangka yang lebih luas, *mabadi'* ini sejatinya memiliki makna yang **jauh lebih struktural dan institusional,** yaitu sebagai **fondasi nilai *(value foundation)*** yang harus menjiwai seluruh tata kelola organisasi. Artinya, *mabādi'* ini bukan hanya diinternalisasikan pada diri kader, tetapi juga **dinormalkan dalam sistem, mekanisme, dan budaya organisasi NU** di semua tingkatan.

Dalam konteks organisasi, *as-shidq* menuntut transparansi dan kejujuran dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, serta penyampaian informasi kepada jamaah. Kejujuran

tidak cukup dimaknai sebagai sifat personal pengurus, tetapi harus terwujud dalam sistem administrasi dan akuntabilitas organisasi.

Al-amānah wa al-wafā' bil 'ahd mengharuskan jabatan dan kepemimpinan dipahami sebagai **titipan jam'iyyah**, bukan sumber prestise atau kekuasaan. Amanah berarti menjalankan mandat organisasi sesuai keputusan muktamar, AD/ART, dan kesepakatan kolektif, serta menolak praktik penyalahgunaan kewenangan dan inkonsistensi terhadap garis kebijakan NU.

Al-'adālah dalam budaya organisasi NU meniscayakan pengambilan kebijakan yang proporsional, inklusif, dan tidak diskriminatif. Keadilan bukan hanya sikap personal, tetapi harus tercermin dalam sistem kaderisasi, distribusi peran, penyelesaian konflik internal, dan relasi antara struktur dan warga NU.

At-ta'āwun menegaskan bahwa kerja organisasi NU dibangun di atas semangat kolektivitas, bukan kompetisi destruktif atau dominasi kelompok tertentu. Kerja sama harus menjadi etos kelembagaan, baik dalam sinergi antar-badan otonom, antar-tingkatan kepengurusan, maupun dalam hubungan NU dengan elemen masyarakat dan negara.

Sementara itu, *al-istiqāmah* menuntut konsistensi organisasi dalam memegang nilai, keputusan, dan garis perjuangan jam'iyyah. Istiqamah berarti NU tidak mudah terombang-ambing oleh kepentingan jangka pendek, tekanan politik, atau pragmatisme sesaat yang bertentangan dengan khittah dan jati diri organisasi.

Dengan demikian, *mabādi' khaira ummah* harus dipahami sebagai **etos organisasi *(organizational ethos)*** NU. Ia menjadi ukuran tidak hanya bagi moralitas individu kader, tetapi juga bagi **kesehatan tata kelola organisasi.** Organisasi NU yang berpegang pada mabādi' ini tidak cukup diisi oleh orang-orang baik, tetapi harus dikelola dengan cara yang baik, adil, amanah, kolaboratif, dan konsisten. Dalam perspektif ini, kegagalan organisasi bukan semata karena kelemahan personal, tetapi sering kali karena ***mabādi' khaira ummah* belum sepenuhnya dibudayakan secara sistemik.** Oleh karena itu, penguatan NU ke depan menuntut

transformasi *mabādi' khaira ummah* menjadi **budaya organisasi yang hidup, operasional, dan terlembaga.**

C. Khashaish Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdhiyah

Dalam Muktamar NU ke-33 tahun 2015 di Jombang Jawa Timur, jati diri tersebut dirumuskan sebagai karakteristik *ahlussunnah wal jama'ah an-nahdhiyah* untuk membedakan dengan ahlussunnah wal jama'ah (Aswaja) yang lain. Dalam forum tertinggi organisasi tersebut, NU menegaskan bahwa Aswaja an-Nahdliyah bukan sekadar identitas doktrinal, melainkan cara beragama (*manhaj ad-tadayyun)* yang meniscayakan keseimbangan antara teks dan konteks, antara kesinambungan tradisi dan tanggung jawab sosial terhadap realitas zaman.

1. Aswaja an-Nahdliyah sebagai Islam *Wasathiyah*

Muktamar menegaskan bahwa ciri paling mendasar Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyah adalah wasathiyah (moderasi), yang terumuskan dalam tiga prinsip utama:

- *Tawassuth* (sikap tengah, tidak ekstrem),
- *Ta'adul* (keadilan dan proporsionalitas),
- *Tawazun* (keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan).

Ketiga prinsip ini dipahami NU sebagai satu kesatuan nilai yang melahirkan watak adil, proporsional, dan kontekstual dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam, baik dalam wilayah akidah, syariah, maupun kehidupan sosial-politik. Islam yang demikian dipandang mampu menjadi saksi peradaban (*syuhada 'ala al-nas*) tanpa jatuh pada sikap keras, eksklusif, atau ahistoris.

2. Berpegang pada Tradisi Ulama Muktabar dengan Kesadaran Sejarah

Aswaja an-Nahdliyah ditegaskan sebagai paham keagamaan yang berakar kuat pada tradisi keilmuan Islam Sunni klasik,

dengan rujukan utama yang membentuk fikrah Aswaja NU. Dalam Muktamar NU ke-33 menekankan bahwa keterikatan pada tradisi tersebut bukanlah taqlid beku, melainkan kesinambungan metodologis (*ittiba' manhaji*). Dengan demikian, warisan klasik dipahami melalui pemahaman kontekstual yang mempertimbangkan perubahan ruang, waktu, dan kondisi sosial (*taghayyur al-ahwal*).

3. Fleksibilitas Hukum dan Kepekaan terhadap Realitas Sosial

Salah satu penekanan penting Aswaja an-Nahdliyah adalah mengakui dinamika fatwa dan hukum seiring perubahan situasi dan kebutuhan masyarakat. Perbedaan kondisi sosial, psikologis, budaya, dan kemaslahatan publik membuka ruang perubahan penetapan hukum selama dilakukan melalui kaidah ushul fikih yang sahih dan otoritatif. Dalam konteks ini, NU memandang bahwa keadilan substantif lebih utama daripada formalisme kaku. Prinsip ini sekaligus menjadi pembeda NU dari paham keagamaan yang literalistik atau ideologis, karena Aswaja an-Nahdliyah selalu menempatkan hukum dalam kerangka rahmat, maslahat, dan kemanusiaan.

Sikap lentur yang dimiliki NU didasarkan pemahaman keagamaan yang mengacu pada *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan umum dari pensyariatan hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan *(mashlahah)* manusia lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kesimpulan ini dihasilkan dari penelitian *(istiqra')* terhadap nash-nash tasyri' (al-Quran dan al-Sunnah), hukum-hukum syar'i, *illat* dan hikmah-hikmahnya. Dengan demikian *maqashid al-syariah* tidak bisa dipisahkan dari *nushush al-syariah*, bahkan *maqashid al-syariah* tidak terwujud tanpa *nushush al-syariah*.

4. Komitmen terhadap Persatuan, Keutuhan Bangsa, dan Kemanusiaan

Aswaja an-Nahdliyah memiliki watak inklusif, toleran, dan berkomitmen pada persatuan umat serta keutuhan negara-bangsa. Sikap beragama NU tidak dilepaskan dari tanggung jawab

kebangsaan, sebagaimana tercermin dalam penerimaan NU terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final kehidupan berbangsa.

Dengan demikian, Aswaja an-Nahdliyah tidak hanya berfungsi sebagai panduan akidah, tetapi juga sebagai etos sosial dan kebangsaan, yang mendorong keterlibatan aktif dalam membangun perdamaian, keadilan sosial, dan peradaban dunia.

D. Trilogi Ukhuwah sebagai Etika Sosial Keagamaan NU

Trilogi Ukhuwah merupakan salah satu formulasi sosial-keagamaan paling penting dalam tradisi NU yang membentuk jatidirinya. Trilogi ukhuwah berfungsi sebagai kerangka etika relasional bagi warga NU dalam mengelola hubungan internal umat Islam, kehidupan kebangsaan, dan relasi kemanusiaan global. Trilogi ini bukan hasil satu keputusan tunggal, melainkan kristalisasi pandangan NU yang berkembang dalam berbagai forum resmi, terutama muktamar, munas alim ulama, dan bahtsul masail, sejak masa pra-kemerdekaan yang berpuncak pada 1984 ketika NU menyatakan Kembali ke khittah 1984. Tiga unsur Trilogi Ukhuwah—*Islamiyah, Wathaniyah, dan Basyariyah*—dirumuskan untuk memastikan bahwa keberagamaan tidak terjebak pada eksklusivisme teologis, nasionalisme tidak jatuh pada chauvinisme, dan universalitas kemanusiaan tidak mengaburkan identitas keimanan. Berikut uraian singkat trilogy ukhuwah yang membentuk jati diri NU:

1. *Ukhuwah Islamiyah:* Persaudaraan Sesama Umat Islam

Ukhuwah islamiyah dalam perspektif NU dimaknai sebagai persaudaraan antarsesama Muslim yang berlandaskan akidah Islam, tetapi dijalankan dengan prinsip *tasamuh* (toleransi) dan penghormatan terhadap keragaman pemikiran keagamaan.

NU memahami bahwa perbedaan dalam Islam adalah keniscayaan sejarah dan metodologis, terutama dalam

wilayah *furū'iyyah fiqhiyyah*, madzhab, maupun ekspresi sosial-keagamaan. Karena itu, ukhuwah tidak ditempatkan pada keseragaman pendapat, melainkan pada ikatan etis-moral sebagai sesama orang beriman.

Dengan melandaskan diri pada *i'tiqad ahlussunnah wal jama'ah an-nahdliyah* NU menghindarkan diri dari sikap yang mudah mengkafirkan sesama muslim (sikap *takfir)* yang justru akan melemahkan umat Islam. NU juga tidak mudah menyesatkan *(tabdi')* terhadap golongan atau kelompok yang mempunyai tradisi dan praktik keberagamaan yang berbeda dengan NU. NU juga menjaga diri dari sikap berlebihan yang menjadikan orang menjadi ekstrim *(tasyaddud)* dalam beragama. Dengan demikian, ukhuwah islamiyah berfungsi sebagai mekanisme perawatan keutuhan umat di tengah pluralitas internal Islam.

2. *Ukhuwah Wathaniyah:* Persaudaraan Kebangsaan

Ukhuwah wathaniyah menegaskan bahwa persaudaraan kebangsaan merupakan bagian integral dari pengamalan ajaran Islam di Indonesia. NU berpandangan bahwa hidup berbangsa dan bernegara adalah fakta *syar'i* dan historis yang menuntut tanggung jawab kolektif umat Islam. Menjaga keutuhan bangsa dan negara merupakan bentuk implementasi ajaran Islam yang melekat dalam jati diri NU. Hal ini ditegaskan dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo (1984) yang menegaskan kembali Khittah 1926, menerima Pancasila sebagai asas organisasi, dan menempatkan NKRI sebagai kesepakatan final nasional (*mu'āhadah wathaniyah*). Sebagai bentuk perjanjian, maka umat Islam mempunyai kewajiban *syar'i* untuk memenuhi janji itu.

Karena NKRI dipahami sebagai kesepakatan final, maka bagi NU, negara tidak harus berbentuk "negara Islam" secara formal untuk menjadi sah secara syar'i. Yang lebih utama adalah tercapainya keadilan (*'adl*), perlindungan hak warga, ketertiban dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

Ukhuwah wathaniyah juga mengandung makna bahwa perbedaan agama, etnis, dan budaya di Indonesia tidak boleh menjadi dasar konflik, sebab seluruh warga negara terikat oleh kontrak kebangsaan yang sah dan bermoral. Di sinilah lahir sikap khas NU: nasionalisme religius, bukan nasionalisme sekuler, dan bukan pula ideologi transnasional yang mengabaikan realitas bangsa.

3. *Ukhuwah Basyariyah (Insaniyah):* Persaudaraan Kemanusiaan Universal

Ukhuwah Basyariyah atau Insaniyah merupakan dimensi paling luas dari trilogi ukhuwah. Ia menegaskan bahwa seluruh manusia, tanpa memandang agama, ras, atau bangsa, terikat oleh persaudaraan kemanusiaan yang bersumber dari martabat manusia *(karāmat al-insān).* Dalam pandangan NU, pengakuan terhadap *ukhuwah basyariyah* bukan relativisasi iman, melainkan perwujudan etika Islam dalam ruang publik global. Islam dipandang sebagai *rahmatan lil 'alamin*, yang menuntut umatnya menghormati hak hidup manusia, menolak kekerasan dan diskriminasi, serta mengembangkan kerja sama lintas agama demi keadilan dan perdamaian.

Ukhuwah basyariyah menjadi landasan normatif NU dalam isu-isu kontemporer seperti: pentingnya NU berkontribusi perwujudan perdamaian dunia, penegakan hak asasi manusia, dan penolakan terorisme dan ekstremisme yang bisa merusak sendi-sendi agama dan kebangsaan.

Trilogi ukhuwah NU harus dipahami sebagai satu kesatuan etika utuh, bukan tiga konsep yang berdiri sendiri. *Ukhuwah islamiyah* menjaga integritas internal umat, *ukhuwah wathaniyah* mengokohkan kehidupan berbangsa, dan *ukhuwah basyariyah* membuka ruang tanggung jawab kemanusiaan universal.[]

Tiga Aspek Pembentuk Jatidiri NU

1 Fikrah

Akidah, fiqih, dan tasawuf

2 Harakah

Tawasuth, tasamuh, tawazun, i'tidal, amar ma'ruf nahi munkar

3 Amaliyah

Manifestasi nyata faham keagamaan dalam praktik warga NU

Mabadi' Khaira Ummah
sebagai etika organisasi:

- *ash-shidqu*
- *al-Amanah wal wafa' bil 'ahdi*
- *al-'adalah*
- *at-ta'awun*
- *al-istiqamah.*

Trilogi Ukhuwah:

- *Ukhuwah Islamiyah;*
- *Ukhuwah wathaniyah;*
- *Ukhuwah insaniyah*

Khasais Aswaja an-Nahdiyah

Bagian IV

Visi-Misi, Kerangka Konseptual, Arah dan Strategi Utama Menuju NU 2050

A. Kerangka Konseptual: NU Digdaya 2050

NU Digdaya 2050 berangkat dari sebuah kesadaran bahwa arah besar organisasi harus terlebih dahulu ditegaskan melalui visi yang jelas, kemudian diterjemahkan ke dalam misi yang operasional, sebelum akhirnya diwujudkan melalui strategi dan sistem yang terstruktur. Oleh karena itu, kerangka ini secara konseptual dimulai dari atas—yakni visi dan misi—lalu mengalir ke bawah dalam bentuk desain transformasi yang utuh.

Visi: Arah Besar Transformasi NU

NU Digdaya 2050:

Tegaknya Islam Ahlussunnah wal Jama'ah (ASWAJA), terwujudnya kesejahteraan masyarakat, kemaslahatan bangsa, serta terciptanya rahmat bagi semesta melalui kepemimpinan Jam'iyah NU yang mandiri, terpercaya, dan bermartabat.

Beberapa kata kunci rumusan visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Visi NU Digdaya 2050

"Tegaknya Islam Aswaja dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, kemaslahatan bangsa, dan rahmat bagi semesta melalui kepemimpinan Jam'iyah NU yang mandiri, terpercaya, dan bermartabat."

Khidmah Peradaban

- Peradaban Dunia
- Kemaslahatan Bangsa

Pilar Kemaslahatan

- Pengembangan Pesantren & Aswaja
- Keunggulan SDM NU
- Kesejahtearaan Sosial Ekonomi
- Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan

Landasan Transformasi

Transformasi Konsolidasi Jam'iyah

- Transformasi Digital
- Kaderisasi
- Tata Kelola

Jatidiri NU

Misi

3

Khidmah Bangsa & Dunia
Peran NU dalam kemaslahatan bangsa dan peradaban dunia.

2

Pewujudan Kesejahteraan Rakyat
Aswaja, pesantren, SDM, sosial ekonomi, dan lingkungan.

1

Transformasi Konsolidasi Jam'iyah
Tata kelola, kaderisasi, dan transformasi digital.

- **NU Digdaya**: kondisi Nahdlatul Ulama yang kuat, berwibawa, berpengaruh, dan mampu menjadi kekuatan strategis dalam kehidupan keagamaan, sosial, dan kebangsaan.
- **Tegaknya Islam ASWAJA:** terimplementasinya nilai dan ajaran secara nyata dalam kehidupan individu, masyarakat, dan negara.
- **Kesejahteraan Masyarakat:** kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial) secara adil dan merata.
- **Kemaslahatan Bangsa:** segala sesuatu yang membawa kebaikan dan mencegah kerusakan bagi bangsa Indonesia.
- **Rahmat bagi Semesta:** prinsip bahwa Islam hadir sebagai kasih sayang universal bagi seluruh makhluk, bukan hanya umat Islam.
- **Mandiri:** kemampuan berdiri sendiri tanpa ketergantungan yang melemahkan.
- **Terpercaya:** memiliki integritas, kredibilitas, dan akuntabilitas tinggi.
- **Bermartabat**: memiliki kehormatan, etika, dan nilai luhur.

Visi ini mencerminkan tiga orientasi utama sekaligus:

1. Orientasi keislaman (nilai). Orientasi ini menegaskan peran NU dalam menjaga dan mengembangkan ajaran Islam berhalauan ahlussunnah wal jama'ah dengan karakteritiknya yang moderat, seimbang, dan inklusif.
2. Orientasi kebangsaan (kesejahteraan). Orientasi ini untuk memastikan bahwa keberadaan NU memberikan manfaat riil yang bisa dirasakan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa.
3. Orientasi kemanusiaan global (peradaban). Orinetasi ini untuk memperluas peran NU sebagai aktor dalam membawa nilai rahmat bagi seluruh umat manusia.

Dengan demikian, visi ini tidak hanya menggambarkan kondisi ideal, tetapi juga menjadi arah strategis jangka panjang yang mengintegrasikan dimensi agama, sosial, dan global dalam satu kesatuan tak terpisahkan.

Misi: Tahapan Strategis Menuju Visi

Untuk mewujudkan visi besar tersebut, ditetapkan tiga misi utama yang menggambarkan tahapan perjalanan transformasi NU.

Misi 1: Penguatan Transformasi Konsolidasi Jam'iyah dalam Tata Kelola, Konsolidasi dan Transformasi Digital

Misi pertama menekankan pentingnya membangun kekuatan dari dalam jam'iyah. Misi ini difokuskan pada:

- Penguatan tata kelola organisasi
- Pengembangan kaderisasi
- Transformasi digital

Misi ini berangkat dari kesadaran bahwa organisasi yang besar tidak akan efektif tanpa sistem yang kuat. Karena itu, NU perlu memastikan bahwa seluruh struktur organisasi memiliki kapasitas yang kurang lebih sama, sistem yang terintegrasi, dan kemampuan kerja yang modern.

Misi 2: Pewujudan Kesejahteraan Rakyat Melalui Penguatan ASWAJA, Pengembangan Pesantren, Keunggulan SDM, Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan

Setelah penguatan internal, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa kekuatan tersebut berdampak nyata bagi masyarakat.

Misi ini menegaskan peran NU dalam:

- Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi
- Mengembangkan pendidikan dan pesantren

- Meningkatkan kualitas SDM
- Menjaga keberlanjutan lingkungan

Pada tahap ini, NU hadir secara langsung dalam kehidupan masyarakat sebagai agen perubahan sosial yang membawa manfaat konkret, manfaat yang langsung bisa dirasakan masyarakat terutama warga NU.

Misi 3: Penguatan Peran NU dalam Khidmah Kemaslahatan Bangsa dan Peradaban Dunia

Misi terakhir memperluas cakupan peran NU ke tingkat yang lebih tinggi, bukan hanya untuk kepentingan Indonesia tapi juga untuk peradaban global.

Misi ini berfokus mengarahkan NU untuk:

- Berkontribusi dalam isu-isu global
- Menjadi rujukan dalam pemikiran keislaman dan kemanusiaan
- Berperan dalam membangun peradaban dunia yang berkeadilan

Urutan tiga misi tersebut menunjukkan logika transformasi yang sangat jelas: dimulai dari penguatan internal, kemudian berdampak sosial, dan akhirnya berperan global.

Khidmah Peradaban: Orientasi Implementasi Misi

Tiga misi sebagaimana disebutkan di atas bermuara pada konsep Khidmah Peradaban, yaitu bentuk pengabdian NU pada kehidupan manusia secara global yang melampaui batas-batas wilayah negara.

Khidmah ini diwujudkan dalam dua ruang utama:

- Kemaslahatan Bangsa dengan memperkuat kontribusi NU terhadap pembangunan nasional
- Peradaban Dunia dengan memberikan kontribusi terhadap isu-isu global lintas bangsa.

Hal ini mencerminkan perluasan peran NU dari organisasi keagamaan menjadi aktor perubahan sosial; dari aktor sosial menjadi aktor peradaban dunia. Dengan demikian, NU tidak hanya melayani kebutuhan internal umat Islam dan Indonesia, tetapi juga menjawab tantangan besar umat manusia secara global.

Pilar Kemaslahatan: Bidang Kerja Strategis

Untuk mengoperasionalkan khidmah tersebut, ditetapkan empat pilar utama sebagai bidang intervensi strategis bagi NU, yaitu:

1. **Pengembangan Pesantren dan Aswaja**

Sebagai basis nilai dan tradisi, pesantren menjadi pusat pembentukan karakter, pemikiran, dan identitas keislaman NU. NU tidak bisa dipisahkan dengan pesantren, tidak ada NU tanpa pesantren sebagai pusat Pendidikan dan penanaman Islam ahlussunnah wal jama'ah.

2. **Keunggulan SDM NU**

SDM menjadi faktor penentu daya saing organisasi, sehingga penguatan kapasitas manusia menjadi prioritas utama. Keunggulan SDM NU dalam berbagai bidang akan memperkuat NU dalam Pembangunan bangsa dan khidmah peradaban.

3. **Kesejahteraan Sosial Ekonomi**

NU berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui berbagai program ekonomi dan pemberdayaan. Peran NU untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi dilakukan dengan berbagai strategi yang memungkinkan peran NU bisa dirasakan oleh masyarakat.

4. **Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan**

NU mengambil bagian dalam menjawab krisis ekologis dengan pendekatan berbasis nilai keagamaan. Krisis ekologi sekarang ini menjadi fakta yang membawa dampak pada kehidupan manusia secara keseluruhan.

Keempat pilar ini menunjukkan bahwa NU mengusung pendekatan yang menyeluruh (holistik) dengan menggabungkan dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan ekologis.

Landasan Transformasi: Penguat Sistem Internal

Agar seluruh pilar dapat berjalan efektif, diperlukan landasan transformasi yang kuat, yang meliputi:

- Konsolidasi Jam'iyah. Hal ini dilakukan untuk menyatukan struktur dan arah organisasi
- Transformasi Digital. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan jam'iyah dan memperluas jangkauan layanan NU.
- Kaderisasi untuk menjamin keberlanjutan kepemimpinan jam'iyah.
- Tata Kelola jam'iyah untuk memastikan profesionalitas dan akuntabilitas.

Landasan ini berfungsi sebagai *enabling system*, yaitu sistem yang memungkinkan seluruh strategi dapat berjalan secara optimal.

Jati Diri NU: Penjaga Arah dan Identitas

Seluruh proses tersebut berpijak pada jati diri NU sebagai fondasi nilai. Jati diri ini penting agar transformasi tidak menghilangkan karakter dasar organisasi.

Dengan jati diri ini:

- Modernisasi tetap berakar pada tradisi;
- Inovasi tetap berlandaskan nilai;
- Perubahan tetap memiliki arah moral yang jelas.

Melalui kerangka ini, NU diproyeksikan tidak hanya menjadi organisasi yang besar, tetapi juga kuat, relevan, dan berperan dalam membentuk masa depan peradaban.

Lima Tahapan Peta Jalan NU 2050

1

2026–2030

Transformasi Jam'iyah

Pembenahan mendasar organisasi, sistem, dan budaya kerja untuk membangun fondasi yang adaptif, modern, dan berdaya saing.

2

2031–2035

Akselerasi Transformasi

Percepatan implementasi hasil transformasi melalui penguatan kapasitas, inovasi, dan ekspansi program agar menghasilkan dampak yang lebih luas.

3

2036–2040

Kemandirian Jam'iyah

Kemandirian dalam pengelolaan sumber daya, program, dan pengambilan keputusan, sehingga organisasi tidak bergantung pada pihak eksternal.

4

2041–2045

Kepemimpinan Etik

Penguatan peran sebagai rujukan kepemimpinan berbasis nilai etika yang memberi kontribusi strategis di tingkat nasional dan internasional.

5

2046–2050

Ekosistem Peradaban

Pembangunan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan, di mana nilai, institusi, dan praktik sosial membentuk peradaban maju

B. Tahapan Pencapaian Peta Jalan NU 2050

Tahapan Peta Jalan NU 2050 disusun sebagai berikut:

1. Transformasi Jam'iyah (2026–2030):

Tahap ini merupakan fase rekonstruksi mendasar yang bertujuan membangun ulang fondasi organisasi agar selaras dengan tantangan dan perubahan dunia yang begitu cepat. Transformasi tidak sekadar perubahan administratif, tetapi mencakup reorientasi paradigma gerakan dari pola tradisional menuju organisasi berbasis sistem, data, dan inovasi. Pembenahan dilakukan pada struktur kelembagaan, sistem tata kelola *(governance)*, mekanisme pengambilan keputusan, serta pola relasi antar-unit organisasi.

Di tingkat kultural, tahap ini menjadi momentum membangun etos kerja baru yang menjunjung profesionalitas, integritas, dan kolaborasi lintas sektor. NU diarahkan untuk menginternalisasi budaya organisasi yang adaptif terhadap disrupsi digital, perubahan sosial, dan dinamika global. Di fase ini pula dibangun fondasi digitalisasi organisasi, standardisasi prosedur, serta pemetaan potensi kader dan sumber daya secara sistematis.

Dengan demikian, tahap ini berfungsi sebagai "peletakan batu pertama peradaban organisasi baru", di mana NU mulai bertransformasi dari organisasi berbasis tradisi menjadi organisasi modern tanpa kehilangan akar nilai Aswaja.

2. Akselerasi Transformasi Jam'iyah (2030–2035)

Jika tahap pertama bersifat internal dan struktural, maka tahap kedua menitikberatkan pada akselerasi dan ekspansi hasil transformasi. Fokusnya adalah memastikan bahwa perubahan yang telah dirancang benar-benar diimplementasikan secara luas dan menghasilkan dampak yang terukur.

Penguatan kapasitas dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia yang unggul, peningkatan kualitas kepemimpinan kader, serta penguatan institusi pendidikan,

ekonomi, dan sosial yang berada di bawah NU. Inovasi menjadi kata kunci pada fase ini—baik dalam model dakwah, pelayanan publik, maupun pengembangan ekonomi umat.

Di sisi lain, NU mulai memperluas jangkauan programnya secara geografis dan sektoral, sehingga kehadirannya semakin terasa di berbagai lapisan masyarakat. Indikator keberhasilan tahap ini adalah munculnya dampak nyata *(impact-driven organization)* yang dapat diukur dalam bidang kesejahteraan, pendidikan, dan pemberdayaan.

Tahap ini menjadikan NU sebagai organisasi yang tidak hanya "berubah", tetapi mampu menghadirkan perubahan bagi lingkungan sekitarnya.

3. Independensi Jam'iyah (2036–2040)

Tahap ketiga adalah fase konsolidasi menuju kemandirian strategis. Pada titik ini, NU diharapkan telah memiliki kapasitas untuk mengelola sumber daya secara mandiri, baik dalam aspek keuangan, program, maupun pengambilan keputusan.

Independensi tidak hanya berarti bebas dari ketergantungan eksternal, tetapi juga mencerminkan ketahanan organisasi *(organizational resilience)* dalam menghadapi krisis atau perubahan global. NU memiliki ekosistem ekonomi yang menopang aktivitasnya, sistem kaderisasi yang berkelanjutan, serta kepemimpinan yang mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat.

Selain itu, tahap ini juga ditandai dengan penguatan jejaring internal yang solid antarstruktur NU, sehingga tercipta sinergi yang efektif dari tingkat pusat hingga akar rumput. NU tidak lagi reaktif terhadap dinamika eksternal, tetapi menjadi organisasi yang proaktif, otonom, dan berdaya tawar tinggi. Dengan kata lain, fase ini merupakan titik di mana NU berdiri sebagai entitas yang berdaulat secara organisasi.

Tahap ketiga adalah fase konsolidasi menuju kemandirian strategis. Pada titik ini, NU diharapkan telah memiliki kapasitas untuk mengelola sumber daya secara mandiri, baik dalam aspek keuangan, program, maupun pengambilan keputusan.

4. Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional & Global (2041–2045)

Memasuki tahap ini, NU melampaui batas sebagai organisasi nasional dan mulai memainkan peran sebagai aktor moral global. Dengan modal kemandirian yang telah dibangun, NU diproyeksikan menjadi rujukan dalam praktik kepemimpinan berbasis nilai etik, khususnya dalam konteks Islam moderat *(wasathiyah)* dan kemanusiaan universal.

Peran ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti diplomasi kebudayaan, forum internasional, advokasi perdamaian, serta kontribusi dalam penyelesaian konflik global. NU hadir sebagai kekuatan yang menawarkan paradigma alternatif terhadap ekstremisme, polarisasi, dan krisis kemanusiaan.

Di tingkat nasional, NU memperkuat perannya dalam memberikan arah moral bagi kebijakan publik, tanpa harus larut dalam politik praktis. Di tingkat global, NU menjadi *"moral compass"* yang menjembatani nilai-nilai keagamaan dengan isu-isu global seperti keadilan, lingkungan, dan keberlanjutan. Tahap ini menjadikan NU sebagai rujukan kepemimpinan etik lintas bangsa dan peradaban.

5. Ekosistem Peradaban (2046–2050)

Tahap terakhir adalah fase visioner yang melampaui kerangka organisasi menuju pembentukan ekosistem peradaban yang utuh. Pada tahap ini, NU tidak lagi sekadar menjalankan program, tetapi telah berkontribusi dalam membangun peradaban.

Ekosistem ini mencakup integrasi antara nilai-nilai keagamaan, institusi sosial, sistem ekonomi, pendidikan, serta praktik budaya yang harmonis dan berkelanjutan. NU menjadi bagian dari arsitektur peradaban yang menghubungkan dimensi spiritual, sosial, dan material secara seimbang.

Ciri utama tahap ini adalah terciptanya masyarakat yang tidak hanya maju secara ekonomi dan teknologi, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai etika, keadilan, dan kemanusiaan.

NU berfungsi sebagai katalis yang memastikan bahwa modernitas tidak tercerabut dari nilai, dan tradisi tidak terasing dari kemajuan. Dengan demikian, fase ini merupakan puncak perjalanan panjang NU menuju peran sebagai aktor pembentuk peradaban masa depan, yang tidak hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia.

Elaborasi tersebut menunjukkan bahwa Peta Jalan NU 2050 pada hakikatnya adalah proyek transformasi historis, yang menempatkan NU sebagai kekuatan sosial-keagamaan yang berevolusi menjadi arsitek peradaban global berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.

C. Tujuh Dimensi Perubahan

Dalam peta jalan 25 tahun NU (2026-2050), ada tujuh dimensi area yang saling berkorelasi. Tujuh dimensi tersebut adalah:

1. Penguatan Konsolidasi Jam'iyah, yang mencakup:
    a. Tata Kelola
    b. Kaderisasi
    c. Transformasi Digital
2. Kesejahteraan Sosial Ekonomi
    a. Ekonomi
    b. Kesehatan
    c. Keluarga dan Kesetaraan Gender
3. Keunggulan SDM NU
    a. Pendidikan Dasar Menengah
    b. Pendidikan Tinggi
    c. Pendidikan Vokasi
4. Pengembangan Pesantren dan Aswaja
    a. Pengembangan Pesantren
    b. Penguatan Aswaja

5. Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan
    a. Respons Perubahan Iklim
    b. Pengembangan Inovasi Alih Energi Tepat Guna untuk Rakyat
6. Penguatan Peran NU dalam Kemaslahatan Bangsa
    a. Politik, Hukum, dan Demokrasi
    b. Kepemimpinan dalam Gerakan Masyarakat Sipil
    c. Kebijakan Publik
7. Penguatan Peran NU dalam Peradaban Dunia
    a. Penguatan Diplomasi Kultural
    b. Perluasan Jejaring Internasional
    c. Promosi Islam Nusantara

Kategori	2026-2030 Transformasi	2031-2035 Akselerasi	2036-2040 Kemandirian	2041-2045 Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global	2046-2050 Ekosistem Peradaban
1. PENGUATAN KONSOLIDASI JAM'IYYAH					
Tata Kelola	Organisasi NU dari Pusat sampai Daerah yang terkonsolidasi dan terintegrasi melalui Konsolidasi Organisasi dan Konsolidasi Aksi	Sistem jam'iyah berjalan secara mantap, dengan kerja yang dijalankan secara efektif dan efisien	Jam'iyah berkembang, berdampak semakin luas, dengan standar dan model kerja yang bisa direplikasi dan adaptasi.	Jam'iyah menjadi rujukan dalam isu-isu penting.	Jam'iyah memainkan peran penting dalam membangun peradaban global, sehingga memiliki dampak yang lebih luas dan panjang.
Kaderisasi	Penguatan kader dalam ekosistem internal melalui sistem pengkaderan yang terstruktur dan konsisten.	Penguatan Kader Profesional melalui konsolidasi SDM NU profesional yang selama ini berada di luar sistem.	Konsolidasi Kader Diaspora Internasional melalui konsolidasi SDM NU internasional.	Kaderisasi menghasilkan pemimpin yang berpengaruh di dalam dan luar organisasi, di dalam dan di luar negeri.	Kaderisasi menghasilkan kepemimpinan peradaban, yang membawa Jam'iyah NU menjadi bagian dari peradaban kemanusiaan universal.
Transformasi Digital	Terbangunnya ekosistem digital sebagai basis pengorganisasian dan pengembangan NU	Terbangunnya jaringan kolaboratif antara NU dengan ekosistem digital nasional	Terwujudnya infrastruktur teknologi digital NU beserta seluruh lembaganya	NU diakui sebagai rujukan etik pemanfaatan teknologi dan AI dibidang agama dan sosial	NU menjadi rujukan global dalam membangun peradaban berbasis teknologi digital
2. KESEJAHTERAAN SOSIAL EKONOMI					
Ekonomi	Terberdayakannya basis-basis ekonomi kerakyatan warga Nahdliyyin	Akselerasi mobilitas vertikal warga Nahdliyyin	Terwujudnya kemandirian sosial ekonomi warga Nahdliyyin	NU menjadi rujukan dalam membangun sistem pengamanan kesejahteraan sosial ekonomi	Model kesejahteraan sosial ekonomi NU menjadi model global
Kesehatan	Akses Kesehatan jamaah dan prasarana Kesehatan NU yang tersebar merata	Layanan kesehatan NU selaras dengan system kesehatan nasional	Rekognisi layanan dan sistem kesehatan NU dalam dunia kesehatan Indonesia	Layanan dan sistem kesehatan NU berperan aktif dalam perkembangan isu kesehatan nasional	Sistem kesehatan NU menjadi salah satu rujukan di Kawasan regional
Keluarga Maslahat dan Kesetaraan Gender	Penguatan dan terbangunnya cross cutting issues antara nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyyah dengan program organisasi dan fondasi sosial bagi keadilan gender dan keluarga maslahat.	Menjadi driver of social transformation dalam isu-isu keadilan gender dan keluarga yang terakui	NU mencapai Tingkat keberlanjutan dan kematangan institusional dalam isu kesetaraan gender dan ketahanan keluarga.	NU menjadi rujukan etis dalam isu keadilan gender, etika keluarga, dan pengembangan sosial.	NU menjadi salah satu rujukan penting dalam Pembangunan peradaban global yang mempromosikan martabat, keadilan, kemaslahatan keluarga, dan keadilan gender.

Kategori	2026-2030 Transformasi	2031-2035 Akselerasi	2036-2040 Kemandirian	2041-2045 Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global	2046-2050 Ekosistem Peradaban
3. KEUNGGULAN SDM WARGA NU					
Pendidikan Dasar dan Menengah	Kuatnya fondasi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas NU sambil tetap melestarikan identitas keagamaan dan budaya NU.	Percepatan inovasi pendidikan, integrasi digital, profesionalisme guru, dan daya saing institusional di tingkat nasional dan regional.	Sekolah dasar hingga menengah NU menjadi sekolah yang kuat secara akademis, berkelanjutan secara finansial, maju secara teknologi, dan mandiri secara institusional.	Sekolah-sekolah NU menjadi pusat kepemimpinan etis, nilai-nilai Islam moderat, pendidikan perdamaian, dan tanggung jawab sosial di tingkat nasional dan internasional.	Sekolah-sekolah NU menjadi rujukan global dalam mengintegrasikan nilai-nilai universal agama, kemajuan ilmiah, kemanusiaan, keberlanjutan, dan etika teknologi dalam pendidikan dasar dan menengah.
Pendidikan Tinggi	Modernisasi sistem pembelajaran, reformasi tata kelola, transformasi digital, pengembangan dosen, dan standardisasi kualitas.	Percepatan inovasi untuk menguatkan daya saing kelembagaan di tingkat nasional.	Menjadi Lembaga Pendidikan tinggi yang otonom secara akademis, berkelanjutan secara finansial, maju secara teknologi, dan berpengaruh secara nasional yang berakar pada nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyyah.	Institusi pendidikan tinggi NU menjadi pusat-pusat terkemuka dalam kepemimpinan etis, pemikiran Islam moderat, pembangunan perdamaian, keterlibatan kemanusiaan, dan dialog peradaban.	Institusi pendidikan tinggi NU menjadi penggerak kemajuan peradaban global melalui integrasi nilai-nilai Islam, inovasi ilmiah, keberlanjutan, etika, dan kemanusiaan.
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Pengarus-utamaan pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai agenda prioritas NU	Percepatan terwujudnya peningkatan daya saing kerja, produktivitas kerja, keterampilan kerja dan profesionalitas kerja di kalangan warga NU serta meningkatnya jumlah warga NU yang bekerja di sektor formal.	Terwujudnya kondisi warga NU yang terampil, produktif dan terserap di pasar kerja domestik dan global serta meningkatnya jumlah warga NU yang terampil dan produktif dalam kewirausahaan	Lahirnya pemimpin dan manajer di perusahaan-perusahaan milik pemerintah maupun swasta dalam negeri atau swasta luar negeri	Ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi di NU menjadi rujukan bagi dunia
4. PESANTREN DAN ASWAJA					
Pesantren	Penguatan fondasi kelembagaan melalui pembenahan tata kelola, kepengasuhan, kurikulum, serta integrasi antara tradisi keilmuan klasik dan kebutuhan modern.	Percepatan kualitas dan ekspansi peran, di mana inovasi pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan mulai menjadi perhatian.	Pesantren mencapai kemandirian dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan pengelolaan. Tidak lagi bergantung pada bantuan eksternal secara dominan.	Pesantren menjadi rujukan kepemimpinan moral dan etika, baik di tingkat nasional maupun global.	Pesantren berperan sebagai penggerak utama peradaban, tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan.
Aswaja	Mengarusutamakan pemahaman Aswaja Nahdliyah sebagai manhaj berpikir, bukan semata-mata identitas organisasi.	Percepatan dan perluasan kesadaran Aswaja An-Nahdliyyah sebagai manhaj al-fikr dengan berfokus pada penguatan Nahdliyin-cultural Nahdliyin dengan konsolidasi core-engaged Nahdliyin.	Mantapnya kelembagaan pusat-pusat studi Aswaja NU di dunia internasional.	Nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyyah menjadi *reference values* bagi masyarakat menengah-kota yang kian bertumbuh	Aswaja menjadi manhaj berpikir dalam menyelesaikan masalah-masalah peradaban kemanusiaan universal.

Kategori	2026-2030 Transformasi	2031-2035 Akselerasi	2036-2040 Kemandirian	2041-2045 Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global	2046-2050 Ekosistem Peradaban
. 5. PELESTARIAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN					
	Terbangunnya kesadaran secara kuat keadilan ekologis, pelestarian lingkungan, dan kehidupan berkelanjutan yang berakar pada pesan *rahmatan lil 'alamin*, disertai aksi lingkungan di level *grassroots*.	Percepatan skala dan dampak program lingkungan. Inisiatif yang sebelumnya bersifat pilot berkembang menjadi gerakan masif lintas wilayah dengan dukungan teknologi dan jejaring nasional.	Kemandirian dalam pengelolaan program lingkungan. Ekosistem yang dibangun mampu berjalan berkelanjutan secara finansial, sosial, dan kelembagaan.	Menjadi referensi etis nasional dalam isu keadilan lingkungan, spiritualitas ekologis, dan Pembangunan berkelanjutan.	Berkontribusi signifikan dalam membangun peradaban ekologis yang berakar pada nilai-nilai etis Islam rahmatan lil alamin.
6. PENGUATAN PERAN NU DALAM KEMASLAHATAN BANGSA					
Politik	Penguatan nilai-nilai Islam Inklusif dalam politik kebangsaan NU.	Penguatan kontribusi NU dalam menjaga stabilitas, moderasi, dan kesejahteraan umat dalam ranah politik.	NU menjadi organisasi yang mandiri secara politik	NU mampu melahirkan pemimpin nasional dan global yang berkualitas	NU memainkan peran penting dalam membangun ekosistem kepemimpinan global
Hukum	Penguatan pemahaman hukum yang selaras dengan nilai dan prinsip Aswaja NU berbasis pada keadilan substantif dan perlindungan kelompok rentan	Percepatan kontribusi NU dalam pembaharuan hukum nasional yang responsif terhadap nilai keadilan sosial dan kemanusiaan	NU menjadi sebagai salah satu rujukan moral dan intelektual dalam penguatan sistem hukum yang adil	NU memimpin pengarusutamaan hukum yang berkeadilan di tingkat nasional dan internasional	Terbangunnya ekosistem hukum yang menjunjung keadilan dan kemanusiaan universal
Demokrasi	Penguatan nilai dan prinsip demokrasi substantif berbasis Aswaja di semua tingkatan NU	NU sebagai kekuatan masyarakat sipil penopang demokrasi yang berkeadilan dan inklusif	NU mampu menjaga keseimbangan kekuasaan dan kepentingan publik secara berdaulat	NU sebagai rujukan kepemimpinan etik yang menjunjung tinggi demokrasi dan HAM	Terbangunnya ekosistem peradaban demokrasi yang berakar pada nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan universal
Kepemimpinan Masyarakat Sipil	Konsolidasi Sumber daya dan orientasi kepemimpinan gerakan sipil NU	Mantapnya Kekuatan NU dalam gerakan masyarakat sipil	NU menjadi role model dalam Gerakan Masyarakat Sipil.	Mantapnya Kepemimpinan NU dalam gerakan masyarakat sipil, baik Tingkat nasional maupun internasional	Berperan aktif dalam Gerakan Masyarakat Sipil internasional.

Kategori	2026-2030 Transformasi	2031-2035 Akselerasi	2036-2040 Kemandirian	2041-2045 Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global	2046-2050 Ekosistem Peradaban
7. PERAN NU DALAM PERADABAN DUNIA					
	NU menjadi rujukan Islam moderat sekaligus menjadi simpul Islam global	NU menjadi episentrum global Islam Humanitarian dan keilmuan moderat	NU diakui sebagai otoritas moral lintas peradaban dunia Menjadi rujukan global dalam etika Aswaja Nahdliyah yang berfungsi sebagai landasan moral lintas agama, bangsa, dan peradaban di tengah krisis kepemimpinan global.	Kepemimpinan Nahdliyin berpengaruh di lembaga global strategis	Model peradaban Nahdliyin diakui dan diadopsi secara global Islam Nusantara berbasis Aswaja, Pancasila, dan kearifan lokal menjadi rujukan bagi dunia Muslim maupun komunitas global dalam membangun tatanan peradaban yang inklusif, damai, dan adaptif terhadap era post-AGI.

Dimensi I

Penguatan Konsolidasi Jam'iyah

1. Tata Kelola
2. Kaderisasi
3. Transformasi Digital Jam'iyah

Tata Kelola

2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050
Transformasi Jam'iyah	**Akselerasi Transformasi Jam'iyah**	**Kemandirian Jam'iyah**	**Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global**	**Ekosistem Peradaban**
Organisasi NU dari Pusat sampai Daerah yang terkonsolidasi dan terintegrasi melalui Konsolidasi Organisasi dan Konsolidasi Aksi	Sistem jam'iyah berjalan secara mantap, dengan kerja yang dijalankan secara efektif dan efisien	Jam'iyah berkembang, berdampak semakin luas, dengan standar dan model kerja yang bisa direplikasi dan adaptasi.	Jam'iyah menjadi rujukan dalam isu-isu penting.	Jam'iyah memainkan peran penting dalam membangun peradaban global, sehingga memiliki dampak yang lebih luas dan panjang.
Outcome: • Organisasi stabil. • Sistem berjalan. • Kinerja mulai terukur.	**Outcome:** • Organisasi berjalan efisien. • Hasil kerja meningkat dan berdampak.	**Outcome:** • Organisasi berkembang dan berdampak lebih luas. • Organisasi punya model yang bisa direplikasi.	**Outcome:** Organisasi berpengaruh, inovatif, dan memimpin di isu-isu terkait	**Outcome:** Organisasi yang berpengaruh secara global, dampak jangka Panjang
Strategi: • Institusionalisasi Badan Perencanaan Pengembangan NU (Bappenu) • Implementasi program kerja berbasis rencana strategis • Penguatan tata kelola organisasi (Sertifikasi ISO) • Penerapan sistem monitoring & evaluasi (M&E) yang rutin dan terukur • Pengumpulan baseline data untuk pengambilan Keputusan • Konsolidasi dan manajemen seluruh asset Jam'iyah • Pengembangan kapasitas SDM (pelatihan dasar dan manajemen organisasi) • Membangun budaya kerja yang disiplin, akuntabel, dan kolaboratif	**Strategi:** • Optimalisasi program berbasis hasil evaluasi periode sebelumnya • Integrasi teknologi dalam operasional dan M&E • Penguatan kepemimpinan dan kaderisasi internal • Standarisasi kualitas output dan layanan • Memperkuat kemitraan strategis eksternal	**Strategi:** • Replikasi program unggulan ke wilayah atau unit baru • Eskalasi dampak organisasi • Penguatan branding dan positioning organisasi • Diversifikasi sumber daya (pendanaan, SDM, jaringan) • Pengembangan inovasi program	**Strategi:** • Menjadi rujukan (benchmark) bagi organisasi lain • Mendorong inovasi berbasis riset dan data • Berperan dalam kebijakan atau advokasi di tingkat lebih tinggi • Penguatan sistem digital dan otomatisasi • Peningkatan kualitas SDM ke level ahli/spesialis	**Strategi:** • Membangun regenerasi kepemimpinan yang kuat melalui distribusi SDM ke berbagai bidang. • Membangun legacy atau warisan dampak organisasi.

1. Tata Kelola

Dimensi Penguatan Konsolidasi Jam'iyah pada dasarnya merupakan upaya untuk menata kembali, memperkuat, dan mengarahkan seluruh potensi yang dimiliki NU agar bergerak dalam satu sistem yang koheren dan utuh. Dimensi sangat penting karena besarnya cakupan organisasi, keragaman kapasitas antarwilayah, serta kompleksitas program yang selama ini berjalan sering kali belum sepenuhnya terkoneksi dalam satu arah strategis yang sama.

Oleh karena itu, konsolidasi tidak hanya dimaknai sebagai penataan struktur organisasi, tetapi juga sebagai proses membangun kesadaran kolektif, sistem kerja yang terintegrasi, serta budaya organisasi yang berbasis kinerja dan nilai. Dalam jangka panjang, kekuatan Jam'iyah tidak hanya akan ditentukan oleh jumlah pengikut, tetapi oleh sejauh mana organisasi ini mampu bekerja secara efektif, terukur, dan berdampak.

Perjalanan konsolidasi merupakan proses bertahap yang berkembang dari waktu ke waktu—dimulai dari membangun keteraturan internal, kemudian meningkatkan kinerja, memperluas dampak, hingga akhirnya berperan dalam membentuk arah peradaban.

Fase 1. Transformasi Jam'iyah (2026–2030): Membangun Keteraturan dan Fondasi Bersama

Pada fase awal ini, perhatian utama diarahkan pada upaya menciptakan keteraturan di dalam tubuh organisasi. Dalam konteks organisasi besar seperti NU, tantangan yang sering muncul adalah adanya perbedaan tingkat kemajuan antarwilayah, belum meratanya standar kerja, serta belum terbangunnya sistem pengelolaan yang terpadu.

Karena itu, langkah pertama adalah memastikan bahwa seluruh struktur organisasi—dari pusat hingga daerah—benar-benar terkonsolidasi dan saling terhubung melalui platform

DIGDAYA. Perencanaan mulai ditata secara sistematis, program kerja diselaraskan dengan arah strategis organisasi, dan mekanisme evaluasi mulai diterapkan secara rutin.

Pada tahap ini mulai terlihat perubahan penting: organisasi tidak lagi berjalan semata-mata berdasarkan kebiasaan, tetapi mulai berlandaskan pada data dan perencanaan. Kehadiran sistem monitoring dan evaluasi memungkinkan kinerja organisasi mulai diukur secara lebih objektif. Dengan demikian, Jam'iyah perlahan bergerak dari pola kerja yang sporadis menuju pola kerja yang terstruktur dan terarah.

Hasil dari fase ini adalah organisasi yang mulai stabil—di mana sistem sudah berjalan, arah sudah jelas, dan kerja-kerja organisasi mulai dapat dipetakan secara terukur.

Fase 2. Akselerasi Transformasi (2031–2035)

Menguatkan Kinerja dan Efisiensi

Setelah keteraturan terbentuk, tantangan berikutnya adalah bagaimana membuat organisasi bekerja lebih efektif dan menghasilkan dampak nyata. Pada fase ini, Jam'iyah NU memasuki tahap akselerasi, yaitu fase di mana kualitas kerja menjadi fokus utama.

Program-program yang dijalankan tidak lagi hanya sekadar terlaksana, tetapi mulai dievaluasi secara serius untuk melihat sejauh mana manfaatnya. Pengalaman dari periode sebelumnya menjadi dasar untuk menyempurnakan program berikutnya. Di sinilah peran data menjadi sangat penting, karena keputusan-keputusan organisasi mulai didasarkan pada bukti nyata, bukan sekadar intuisi.

Di saat yang sama, pemanfaatan teknologi mulai diperluas untuk mendukung operasional organisasi. Proses kerja menjadi lebih efisien, koordinasi lebih cepat, dan jangkauan layanan semakin luas. Kualitas kepemimpinan juga diperkuat melalui kaderisasi yang lebih sistematis. Pada titik ini, Jam'iyah tidak hanya

menjadi organisasi yang tertata, tetapi mulai berkembang menjadi organisasi yang produktif, efisien, dan memiliki daya guna yang jelas bagi masyarakat.

Fase 3. Kemandirian (2036–2040)
Memperluas Pengaruh dan Dampak

Memasuki fase berikutnya, Jam'iyah NU mulai menunjukkan kapasitas yang lebih matang. Organisasi tidak hanya kuat secara internal, tetapi juga mulai mampu memperluas pengaruhnya ke berbagai wilayah dan sektor.

Program-program yang terbukti berhasil tidak berhenti di satu tempat, tetapi mulai direplikasi dan dikembangkan di wilayah lain. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki model kerja yang teruji dan dapat diadaptasi sesuai kebutuhan. Dampak yang dihasilkan pun semakin luas, menjangkau lebih banyak masyarakat dengan kualitas yang tetap terjaga.

Di sisi lain, kemandirian organisasi juga mulai diperkuat, terutama dalam hal sumber daya. Tidak hanya bergantung pada satu sumber dukungan, Jam'iyah mulai mengembangkan berbagai bentuk pembiayaan, jaringan kemitraan, dan penguatan kapasitas internal.

Pada fase ini, Jam'iyah tampil sebagai organisasi yang percaya diri, mandiri, dan mampu memperluas manfaatnya secara sistematis.

Fase 4. Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global (2041–2045)
Menjadi Rujukan dan Pengarah

Ketika organisasi telah mandiri dan berdampak luas, muncul tahap yang lebih tinggi, yaitu tahap kepemimpinan. Pada fase ini, Jam'iyah tidak lagi hanya berperan sebagai pelaksana program, tetapi mulai menjadi rujukan dalam berbagai isu penting, baik di tingkat nasional maupun global.

Peran ini ditandai dengan meningkatnya keterlibatan organisasi dalam forum-forum strategis, dialog kebijakan, serta pengembangan gagasan dan solusi atas persoalan masyarakat. Jam'iyah tidak hanya merespons masalah, tetapi ikut menentukan arah penyelesaiannya.

Kekuatan utama pada fase ini terletak pada kombinasi antara nilai-nilai etik yang menjadi dasar organisasi dan kemampuan intelektual yang terus berkembang. Hasilnya, Jam'iyah hadir sebagai organisasi yang tidak hanya berpengaruh, tetapi juga memberikan arah dan inspirasi.

Fase V Membangun Ekosistem Peradaban (2046–2050)

Pada fase terakhir, peran Jam'iyah mencapai tingkat yang lebih luas dan mendalam. Organisasi tidak lagi berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem yang lebih besar dalam membangun peradaban.

Fokus tidak lagi semata pada program jangka pendek, melainkan pada penciptaan dampak jangka panjang yang dapat diwariskan lintas generasi. Kaderisasi kepemimpinan menjadi sangat penting, agar kesinambungan organisasi tetap terjaga. Pada saat yang sama, kerja sama global semakin diperkuat untuk memperluas jangkauan pengaruh.

Jam'iyah dalam fase ini bukan hanya hadir di tengah masyarakat, tetapi ikut berkontribusi dalam membentuk nilai, arah, dan masa depan peradaban. Dampaknya tidak hanya terasa di tingkat lokal atau nasional, tetapi meluas hingga tingkat global.

Kaderisasi

2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050
Transformasi Jam'iyah	**Akselerasi Transformasi Jam'iyah**	**Kemandirian Jam'iyah**	**Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global**	**Ekosistem Peradaban**
Penguatan kader dalam ekosistem internal melalui sistem pengkaderan yang terstruktur dan konsisten.	Penguatan Kader Profesional melalui konsolidasi SDM NU profesional yang selama ini berada di luar sistem.	Konsolidasi Kader Diaspora Internasional melalui konsolidasi SDM NU internasional.	Kaderisasi menghasilkan pemimpin yang berpengaruh di dalam dan luar organisasi, di dalam dan di luar negeri.	Kaderisasi menghasilkan kepemimpinan peradaban, yang membawa Jam'iyah NU menjadi bagian dari peradaban kemanusiaan universal.
Outcome: • Sistem pengkaderan berjalan rapi, terukur, dan konsisten	**Outcome:** • Talent mapping • Konsolidasi SDM Profesional • Kader profesional mulai menjadi motor penggerak organisasi.	**Outcome:** • Memperkuat talent mapping • Konsolidasi SDM NU internasional • Kader NU internasional menjadi spokesperson NU di dunia internasional. • Kultur kader unggul dan berprestasi semakin meluas	**Outcome:** Kader menjadi pemimpin yang diakui dan membawa pengaruh luas	**Outcome:** • Terbentuknya pemimpin yang visioner, berintegritas, dan berorientasi dampak jangka panjang • Munculnya inovasi dan solusi strategis terhadap tantangan besar (kompleks dan lintas sektor) • Terjaganya kesinambungan nilai dan arah organisasi lintas generasi.
Strategi: • Review dan/atau redesign kurikulum kaderisasi berdasarkan kebutuhan kader maupun perkembangan (nilai, ideologi, kompetensi) • Pembentukan database kader (profil, perkembangan, potensi)	**Strategi:** • Pengelompokan kader berdasarkan minat dan potensi (talent mapping) • Pelatihan khusus bagi para professional Nahdliyin. • Mulai membangun kultur kader unggul dan berprestasi	**Strategi:** • Pengelompokan kader NU internasional berdasarkan minat dan potensi (talent mapping) • Pelatihan khusus bagi para kader professional NU internasional.	**Strategi:** • Penempatan kader pada posisi strategis (internal maupun eksternal) • Penguatan kapasitas advokasi, kepemimpinan publik, dan pengambilan kebijakan • Mendorong kader menjadi representasi organisasi di berbagai forum • Penguatan reputasi kader secara individu dan kolektif.	**Strategi:** • Internalisasi nilai dan visi besar: menanamkan orientasi peradaban dalam setiap proses kaderisasi dan kepemimpinan • Penguatan kapasitas kepemimpinan transformatif: pelatihan yang menekankan critical thinking, sistem berpikir, dan etika publik • Pemberian ruang kepemimpinan nyata: kader diberi kesempatan memimpin program strategis dan berdampak luas • Kolaborasi lintas sektor: membangun jejaring dengan berbagai aktor untuk memperluas pengaruh dan dampak

2. Kaderisasi

Subdimensi ini sesungguhnya tidak hanya menggambarkan tahapan program, tetapi merepresentasikan transformasi paradigma kaderisasi: dari model tradisional berbasis loyalitas dan partisipasi menuju model kepemimpinan strategis berbasis kapasitas, jaringan, dan dampak *(impact-driven leadership ecosystem).* Setiap fase tidak berdiri sendiri, melainkan bersifat kumulatif dan progresif, sehingga keberhasilan fase awal menjadi prasyarat bagi akselerasi pada fase berikutnya.

Fase 1. Transformasi (2026–2030): Fondasi Sistemik dan Standardisasi

Fase ini merupakan digital dan *institutional turning point*, di mana organisasi mulai memiliki *institutional memory* dan *data capital* yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat organisasi. Dalam fase ini NU bertransisi menjadi knowledge-based organization, bukan hanya mass-based organization.

Transformasi bukan sekadar menyusun kurikulum kaderisasi, tetapi menggeser pola kaderisasi dari *event-based* menjadi *system-based;* dari berbasis figur menjadi berbasis sistem dan institusi; dari pengalaman informal menuju *competency framework* melalui sistem kaderisasi berjenjang. Kaderisasi di banom-banom NU harus terintegrasi dalam satu-kesatuan sistem kaderisasi NU.

Tahapan ini dilakukan dengan melakukan dan memperkuat:

- Evaluasi dan desain kurikulum berbasis kompetensi inti: ideologi Ahlussunnah wal Jamaah, kepemimpinan, literasi tata kelola dan regulasi organisasi; literasi digital, dan kemampuan kolaborasi
- Digitalisasi kaderisasi: membangun *dashboard kader nasional* berbasis data *real-time*
- Standardisasi jenjang kaderisasi dari dasar hingga lanjutan

Dengan basis massa yang dimiliki NU, maka target reliatis kaderisasi adalah 1–2% menjadi kader aktif terstruktur atau sekitar 1,5 juta kader dalam setiap 5 tahun yang terdokumentasi secara digital.

Fase 2. Akselerasi Transformasi (2031–2035): Integrasi Profesional dan Meritokrasi

Fase ini menjawab problem klasik: keterputusan antara kader struktural dan profesional NU di luar organisasi. Transformasi diarahkan menuju organisasi meritokratis berbasis kompetensi dengan tetap berakar pada kultur dan tradisi NU. Mobilisasi kapital sosial dan intelektual NU yang selama ini tersebar di berbagai sektor harus terkonsolidasi.

Hal ini dilakukan melalui strategi antara lain:

a. Talent mapping berbasis AI/analytics sederhana untuk mengidentifikasi:
    1. sektor keahlian (akademisi, birokrat, entrepreneur, profesional global)
    2. level pengaruh (lokal, nasional, internasional)
b. Program *fast-track leadership* bagi kader profesional
c. Pembentukan komunitas epistemik *(epistemic community)* di sektor strategis

Fase 3: Kemandirian (2036–2040): Globalisasi dan Diaspora Engagement

Fase ini menunjukkan lompatan penting: dari kekuatan domestik menuju aktor global berbasis nilai. NU tidak hanya hadir sebagai organisasi keagamaan Indonesia, tetapi sebagai produsen gagasan Islam moderat global dan sebagai *norm entrepreneur* dalam isu toleransi dan perdamaian. NU memasuki fase *global embeddedness*, menjadi bagian dari arsitektur jaringan internasional.

Fase kemandirian ini dilakukan dengan strategi, antara lain:

- Pembentukan hub diaspora NU global dengan menafaatkan jaringan PCI NU
- Penguatan *branding* kader sebagai akademisi global, diplomat kultural dan aktor komunitas internasional
- Kemitraan strategis dengan lembaga global (universitas, NGO, think tank dan sebagainya)

Fase 4: Kepemimpinan Etik (2041–2045): Pengaruh dan Legitimasi

Pada fase ini, keberhasilan kaderisasi diukur dari pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan publik. NU menjadi moral and *intellectual leadership hub* yang diakui secara luas. Dengan demikian, kepemimpinan NU tidak hanya diartikan untuk menjadikan kader NU mempunyai posisi strategis dalam berbagai sektor, tatapi menjadi legitimasi moral dengan kapasitas intelektual yang dimiliki dan kemampuan mempengaruhi kebijakan.

Hal ini dilakukan dengan sejumlah strategi antara lain:

- Penempatan kader di pemerintahan (eksekutif-legislatif); lembaga internasional; sektor strategis (pendidikan, ekonomi, teknologi)
- Penguatan kapasitas sebagai *policy analysis; public communication*; dan *strategic negotiation.*

Fase 5. Ekosistem Peradaban (2046–2050): Dampak Lintas Generasi

Fase ini tampak abstrak tetapi sekaligus paling strategis: pergeseran dari organisasi ke ekosistem peradaban. NU menjadi bagian dari *global civilizational actor*, setara dengan kekuatan-kekuatan jaringan global lainnya. Di sini NU tidak hanya menjadi aktor, tetapi menjadi *platform ekosistem* dan penghubung lintas sektor dan lintas generasi.

Strategi yang bisa dilakukan untuk implementasi fase ini antara lain adalah:

a. Internalisaasi visi peradaban dalam seluruh proses kaderisasi
b. Inkubasi inovasi sosial dan kebijakan publik
c. Mendorong kolaborasi multi-aktor (negara, masyarakat, pasar)

3. Transformasi Digital Jam'iyah (2026–2050)

Ttransformasi digital bukan sekadar modernisasi alat, tetapi merupakan reorientasi total cara Jam'iyah bekerja, berinteraksi, dan memproduksi pengaruh. Digitalisasi diposisikan sebagai tulang punggung pengorganisasian, pelayanan umat, dan produksi pengetahuan keagamaan di era baru.

Jika kaderisasi menghasilkan aktor, maka transformasi digital menghasilkan platform dan ekosistem tempat aktor tersebut bergerak.

Fase 1. 2026–2030 Fondasi Ekosistem Digital NU

Pada tahap ini, NU memulai pergeseran dari organisasi berbasis jaringan sosial tradisional menuju organisasi berbasis platform digital *(platform-based religious organization).* Fase ini adalah fase *digital foundation building*, di mana NU mengumpulkan *data capital* dan *user base*.

Transformasi ini krusial karena saat ini penetrasi internet Indonesia telah mencapai ± 78–80% populasi (±220 juta pengguna). Lebih dari 60% aktivitas keagamaan generasi muda mulai beririsan dengan platform digital (kajian online, dakwah media sosial, dll.) Artinya, jika NU tidak hadir kuat di ruang digital, maka otoritas keagamaan akan bergeser ke aktor digital non-otoritatif.

Ecosystem Digdaya NU berbasis layanan akan menjadikan NU tidak hanya hadir sebagai organisasi, tetapi sebagai *multi-platform service ecosystem* (pendidikan, fatwa, sosial, ekonomi). Satu data NU terkait anggota, Lembaga, aktivitas dan kebutuhan

Transformasi Digital

2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050
Transformasi Jam'iyah	**Akselerasi Transformasi Jam'iyah**	**Kemandirian Jam'iyah**	**Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global**	**Ekosistem Peradaban**
Terbangunnya ekosistem digital sebagai basis pengorganisasian dan pengembangan NU	Terbangunnya jaringan kolaboratif antara NU dengan ekosistem digital nasional	Terwujudnya infrastruktur teknologi digital NU beserta seluruh lembaganya	NU diakui sebagai rujukan etik pemanfaatan teknologi dan AI di bidang agama dan sosial	NU menjadi rujukan global dalam membangun peradaban berbasis teknologi digital
Outcome: • Terwujudnya Ekosistem Digdaya NU berbasis layanan. • Terwujudnya sistem Satu Data NU. • NU Online menjadi rujukan utama keagamaan di Indonesia.	**Outcome:** • Terintegrasinya jaringan teknologi dan layanan NU secara nasional • Lahirnya pusat unggulan NU di bidang AI dan inovasi digital • Menguatnya kolaborasi NU dalam ekosistem teknologi nasional.	**Outcome:** • Terwujudnya kemandirian infrastruktur dan pengelolaan teknologi NU • Pesantren dan institusi pendidikan NU menjadi pusat talenta digital • Menguatnya layanan sosial dan ekonomi berbasis teknologi	**Outcome:** • Menguatnya kontribusi NU dalam tata kelola teknologi global • Lahirnya tokoh teknologi Nahdliyin berpengaruh di tingkat internasional	**Outcome:** • Terwujudnya ekosistem teknologi dan peradaban digital berbasis Aswaja • Institusi teknologi dan riset NU menjadi rujukan global • Terbangunnya regenerasi talenta teknologi Nahdliyin yang berkelanjutan
Strategi: • Perluasan ekossistem Digdaya berbasis layanan • Pengembangan Infrastruktur data NU terpadu — cloud NU nasional, single sign-on Nahdliyin • Pengembangan NU Online SuperApps sebagai platform raksasa keagamaan	**Strategi:** • Integrasi ekosistem teknologi NU dari pusat hingga daerah • Penguatan pusat riset, AI, dan inovasi digital berbasis kebutuhan umat • Kolaborasi strategis dengan industri teknologi dan ekosistem startup	**Strategi:** • Penguatan kemandirian teknologi dan pengelolaan data NU • Transformasi pesantren dan pendidikan NU menjadi pusat inovasi digital • Pengembangan layanan sosial, kesehatan, dan ekonomi berbasis teknologi	**Strategi:** • Penguatan kepemimpinan etik dalam pemanfaatan AI dan teknologi global • Pengembangan diplomasi digital dan jejaring pengetahuan internasional • Mendorong lahirnya pemimpin teknologi Nahdliyin di tingkat global	**Strategi:** • Integrasi teknologi, nilai Aswaja, dan tata kelola kelembagaan modern • Pengembangan institusi teknologi, riset, dan pengetahuan bertaraf global • Penguatan ekosistem inovasi dan regenerasi talenta digital berkelanjutan

umat menjadi aset strategis, bukan hanya untuk kepentingan pengembangan program-program NU tapi juga menjadi kekuatan sosial ekonomi.

Fase 2. 2031–2035: Integrasi Nasional dan Kolaborasi Ekosistem

Pada fase ini NU tidak hanya membangun sistem internal, tetapi mulai menjadi *hub* dalam ekosistem digital nasional yang bisa berinteraksi secara dinamis dengan pemerintah, industri teknologi, dan komunitas digital. NU menjadi *network orchestrator*, bukan hanya pengguna teknologi.

Fase ini akan NU akan menghasilkan integrasi jaringan teknologi dari pusat ke daerah; lahirnya pusat unggulan AI dan inovasi digital NU; dan kolaborasi nyata dalam ekosistem teknologi nasional. Hal ini bisa dilakukan dengan kemitraan strategis berbagai kelompok seperti kampus teknologi, BUMN digital dan sebagainya.

Fase 3. 2036–2040: Kemandirian Teknologi dan Produksi Inovasi

Pada fase ini NU mengalami transisi dari pengguna dan kolaborator menjadi produsen teknologi dan inovasi berbasis nilai keislaman. NU menjadi *producer of digital knowledge and solutions*, bukan sekadar distributor.

Dengan demikian, NU didorong memiliki infrastruktur digital mandiri; pesantren dan Lembaga-lembaga Pendidikan NU sebagai pusat inovasi digital; sehingga layanan berbasis teknologi menjangkau sektor sosial dan ekonomi.

Beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk ketercapaian fase ini, antara lain:

- Pengembangan:
    - sistem AI untuk fatwa dan edukasi
    - platform ekonomi umat berbasis data

- Transformasi pesantren menjadi:
  - *digital innovation hubs*
  - inkubator startup berbasis santri

Fase 4. 2041–2045: Kepemimpinan Etik dalam Teknologi dan AI

Pada titik ini, tantangan global bukan lagi akses teknologi, tetapi etika penggunaan teknologi. NU menjadi *ethical anchor* dalam dunia teknologi global. Pengembangan AI, big data dan algoritma akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan etis terkait agama dan teknologi. Di sini NU mengambil posisi sebagai otoritas moral dalam tata kelola teknologi global.

Dalam konteks ini, NU perlu melakukan pengembangan *framework* mengenai *ethical AI* berbasis Aswaja; diplomasi digital dengan partisipasi dalam forum global (UN, G20 *digital governance*) dan sebagainya. Dengan otoritas moral yang dimiliki NU akan mampu melakukan pengeuatan kepemimpinan teknologi.

Fase 5. 2046–2050: Ekosistem Peradaban Digital

Tahap puncak: NU tidak hanya memanfaatkan atau mengatur teknologi, tetapi menjadi arsitek ekosistem peradaban digital global. NU menjadi *global civilizational actor* berbasis teknologi dan nilai keislaman. Di sini NU sudah memiliki ekosistem teknologi berbasis nilai Aswaja; institusi riset NU menjadi rujukan dunia; regenerasi talenta digital berkelanjutan.

Hal ini bisa dilakukan dengan mengintegrasikan nilai, teknologi dan kelembagaan NU untuk penciptaan *global innovation networks* dan peradaban digital inklusif.[]

Dimensi II

Kesejahteraan Sosial-Ekonomi

1. Ekonomi
2. Kesehatan
3. Keluarga Maslahat dan Kesetaraan Gender

Tantangan NU di abad ke-2 semakin kompleks. Perubahan demografi, transformasi teknologi, urbanisasi, disrupsi ekonomi digital, perubahan struktur keluarga, hingga meningkatnya tuntutan terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial menuntut NU untuk tidak hanya berperan sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam pembangunan sosial-ekonomi bangsa.

Dengan basis warga yang sangat besar, jaringan kelembagaan yang menjangkau hingga tingkat desa, serta modal sosial yang kuat,

NU memiliki potensi unik untuk menjadi kekuatan penggerak kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, kesejahteraan sosial-ekonomi tidak hanya dipahami sebagai peningkatan pendapatan atau akses terhadap layanan dasar, tetapi juga mencakup kualitas kesehatan, ketahanan keluarga, kesetaraan kesempatan, perlindungan kelompok rentan, serta kemampuan masyarakat untuk hidup secara bermartabat.

Roadmap NU 2026–2050 pada dimensi Kesejahteraan Sosial-Ekonomi disusun sebagai arah strategis jangka panjang yang mengintegrasikan tiga pilar utama, yaitu ekonomi, kesehatan, serta keluarga maslahat dan kesetaraan gender. Ketiga pilar tersebut saling berkaitan dan membentuk fondasi bagi terwujudnya masyarakat yang kuat, mandiri, dan berkeadilan.

Secara bertahap, roadmap ini dibangun melalui lima fase perkembangan organisasi. Periode 2026–2030 menjadi fase Transformasi Jam'iyah yang berfokus pada pembangunan fondasi kelembagaan. Periode 2031–2035 merupakan fase Akselerasi Transformasi Jam'iyah yang menitikberatkan pada perluasan program dan penguatan sistem. Periode 2036–2040 merupakan fase Kemandirian Jam'iyah ketika berbagai inisiatif telah mencapai kematangan dan keberlanjutan. Selanjutnya, periode 2041–2045 diarahkan untuk menjadikan NU sebagai rujukan nasional dan global dalam berbagai bidang sosial-ekonomi. Akhirnya, periode 2046–2050 menjadi fase Ekosistem Peradaban ketika seluruh sistem yang dibangun berkembang menjadi model peradaban Islam yang relevan bagi Indonesia dan dunia.

Melalui roadmap ini, NU diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai penggerak kemaslahatan umat sekaligus mitra strategis negara dalam mewujudkan Indonesia yang maju, inklusif, dan berkeadilan.

1. Bidang Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu fondasi utama bagi terwujudnya masyarakat yang kuat dan berdaya.

Ekonomi

2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050
Transformasi Jam'iyah	**Akselerasi Transformasi Jam'iyah**	**Kemandirian Jam'iyah**	**Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global**	**Ekosistem Peradaban**
Terberdayakannya basis-basis ekonomi kerakyatan warga Nahdliyyin	Akselerasi mobilitas vertikal warga Nahdliyyin	Terwujudnya kemandirian sosial ekonomi warga Nahdliyyin	NU menjadi rujukan dalam membangun system pengamanan kesejahteraan sosial ekonomi	Model kesejahteraan sosial ekonomi NU menjadi model global
Outcome: • Database kesejahteraan warga NU lengkap & berbasis data • Akses pendidikan tinggi Nahdliyin meningkat signifikan • UMKM Nahdliyin naik kelas dari mikro kekecil-menengah	**Outcome:** • Jutaan warga NU naik kelaske menengah & menengah-atas • Talenta NU terserap di posisi strategis korporasi & pemerintahan • Ekonomi Nahdliyin tumbuh di atas rata-rata nasional	**Outcome:** • Warga NU memiliki perlindungan sosial yang kokoh • Kemandirian finansial keluarga Nahdliyin tercapai lintas generasi • Sandwich generation Nahdliyin tertopang sistem yang sehat	**Outcome:** • Warga NU dominan di kepemimpinan nasional & berpengaruh global • Tingkat kesejahteraan Nahdliyin setara warga negara maju • •Diaspora Nahdliyin jadikekuatan ekonomi-budayainternasional	**Outcome:** • Warga NU menjaditolok ukurkesejahteraanumat Islam global • Model welfare Nahdliyin diadopsi sebagai inspirasi peradaban • Kesejahteraan lintas generasi Nahdliyin berkelanjutan & bermakna
Strategi: • Pemetaan & profiling Nahdliyin terpadu — Single-ID Nahdliyin, basis data sosio-ekonomi warga NU, indekskesejahteraanNahdliyin • Akselerasi pendidikan tinggi & vokasi — beasiswa massal S1–S3, sekolah vokasi NU berbasis industri, sertifikasi kompetensi nasional • Pemberdayaan UMKM & ekonomi informal Nahdliyin — pendampingan digitalisasi UMKM, akses pembiayaan syariah, koperasi NU modern • Jaring pengaman sosial NU — Lazisnu produktif, santunan terstruktur untuk dhuafa Nahdliyin, asuransi kesehatan mikro berbasis takaful	**Strategi:** • Akselerasi mobilitas vertikal Nahdliyin — program "Nahdliyin Naik Kelas", talent pipeline untuk korporasi & sektor publik, networking profesional terstruktur • Penguatan SDM unggul berbasis STEM & ekonomi kreatif — sekolah unggulan NU, beasiswa LPDP-NU, fellowship riset & inovasi • Ekosistem ekonomi syariah Nahdliyin — bank syariah NU, fintech umat, marketplace produk Nahdliyin, halal value chain • Reskilling & upskilling massalwarga NU — platform pembelajaran digital NU, sertifikasi profesi, transisi pekerja informal ke formal.	**Strategi:** • Sistem Jaminan Sosial Nahdliyin terpadu — asuransi kesehatan-pensiun berbasis takaful, dana pensiun NU, perlindungan pekerja informal • Endowment fund & wakaf produktif skala nasional — dana abadi NU untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan • Kemandirian ekonomi keluarga Nahdliyin — kepemilikan aset produktif, literasi keuangan keluarga, asset-building program • Industri care economy NU — perawatan lansia, pendidikan anak usia dini, kesehatan keluarga sebagai sektor strategis	**Strategi:** • Keunggulan global Nahdliyin — talenta NU di lembaga internasional, korporasi multinasional, akademisi kelas dunia • Diaspora Nahdliyin sebagai aset strategis — jaringan profesional global, transfer pengetahuan & investasi • Filantropi Nahdliyin kelas dunia — yayasan amal NU berskala global, kontribusi pada kemanusiaan internasional • Standar kesejahteraan Nahdliyin setara negara maju — kualitas hidup, akses kesehatan-pendidikan premium, kesejahteraan psikologis	**Strategi:** • Ekosistem kesejahteraan multi generasi Nahdliyin — model pemberdayaan lintas generasi, peran produktif lansia, solidaritas antar-usia • Legacy welfare institutions — universitas, rumah sakit, pusat kebudayaan NU sebagai warisan kesejahteraan abadi • Kesejahteraan holistik berbasis Aswaja — kesejahteraan fisik, mental, spiritual, sosial sebagai model peradaban • Model peradaban welfare Islam Nusantara — sistem kesejahteraan NU jadi rujukan dunia Muslim & negara berkembang

Dalam perspektif NU, pembangunan ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan, melainkan pada penciptaan kemaslahatan yang luas, pemerataan kesempatan, dan penguatan kemandirian masyarakat.

Indonesia akan memasuki fase bonus demografi hingga sekitar tahun 2035. Pada saat yang sama, ekonomi digital diperkirakan akan menjadi salah satu mesin pertumbuhan terbesar di Asia Tenggara. Namun peluang tersebut juga disertai tantangan berupa ketimpangan ekonomi, konsentrasi kepemilikan aset, rendahnya produktivitas usaha mikro, serta kesenjangan akses terhadap modal dan teknologi.

NU memiliki posisi strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Jaringan pesantren, koperasi, lembaga zakat, badan usaha milik NU, serta jutaan pelaku usaha mikro yang berasal dari warga Nahdliyin merupakan modal besar untuk membangun ekonomi umat yang lebih kuat.

Pada fase Transformasi Jam'iyah (2026–2030), fokus utama diarahkan pada pembangunan fondasi ekonomi kelembagaan. Pada periode ini, prioritas diberikan pada pemetaan potensi ekonomi warga, digitalisasi data ekonomi, penguatan koperasi dan badan usaha, serta pengembangan ekosistem kewirausahaan berbasis pesantren. Penguatan literasi keuangan dan kewirausahaan juga menjadi agenda penting agar warga NU mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi yang semakin digital.

Fase berikutnya, yaitu Akselerasi Transformasi Jam'iyah (2031–2035), ditandai dengan pengembangan jaringan ekonomi yang lebih luas. Berbagai unit usaha dan koperasi NU mulai terhubung dalam sebuah ekosistem ekonomi yang terintegrasi. Pada tahap ini, NU tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai penghubung antara pelaku usaha mikro dengan akses pembiayaan, pasar, dan teknologi. Digitalisasi rantai pasok, pengembangan marketplace komunitas, serta penguatan industri halal menjadi bagian penting dari strategi akselerasi tersebut.

Memasuki fase Kemandirian Jam'iyah (2036–2040), sistem ekonomi NU diharapkan telah mencapai tingkat keberlanjutan yang tinggi. Berbagai badan usaha dan koperasi NU mampu menjadi sumber pembiayaan yang mendukung program-program sosial dan pendidikan organisasi. Kemandirian ekonomi ini penting agar berbagai program kemaslahatan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal.

Pada tahap ini, NU dapat mengembangkan model social enterprise atau usaha sosial yang tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang luas. Model ini memungkinkan keuntungan usaha digunakan kembali untuk mendukung layanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, pada fase Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global (2041–2045), NU diharapkan menjadi rujukan dalam pengembangan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pengalaman panjang NU dalam membangun ekonomi berbasis komunitas dapat menjadi model alternatif di tengah meningkatnya ketimpangan global. NU dapat berperan aktif dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional, pengembangan ekonomi syariah, serta pembangunan ekonomi berbasis nilai dan etika.

Pada fase Ekosistem Peradaban (2046–2050), berbagai infrastruktur ekonomi yang telah dibangun berkembang menjadi sebuah ekosistem peradaban. Ekonomi tidak lagi dipandang sebagai aktivitas yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pendidikan, kesehatan, teknologi, lingkungan, dan pembangunan sosial. NU menjadi pusat pengembangan model ekonomi umat yang modern, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Melalui tahapan tersebut, ekonomi NU tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga Nahdliyin, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional yang lebih adil dan berkelanjutan.

2. Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu prasyarat utama bagi pembangunan manusia. Masyarakat yang sehat memiliki produktivitas yang lebih tinggi, kualitas hidup yang lebih baik, serta kemampuan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Indonesia menghadapi berbagai tantangan kesehatan yang terus berkembang. Selain persoalan klasik seperti stunting, kematian ibu dan anak, serta akses layanan kesehatan yang belum merata, muncul pula tantangan baru berupa penyakit tidak menular, kesehatan mental, penuaan penduduk, dan dampak perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat.

Sebagai organisasi yang memiliki jaringan rumah sakit, klinik, pesantren, dan lembaga sosial yang luas, NU memiliki peluang besar untuk mengambil peran strategis dalam pembangunan kesehatan masyarakat.

Pada fase Transformasi Jam'iyah (2026–2030), fokus utama diarahkan pada konsolidasi dan pemetaan seluruh aset layanan kesehatan NU. Rumah sakit, klinik, balai kesehatan, dan layanan kesehatan pesantren perlu diintegrasikan dalam satu sistem informasi yang terhubung. Pada tahap ini juga dilakukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, digitalisasi layanan, serta penguatan program kesehatan preventif berbasis komunitas.

Selanjutnya, pada fase Akselerasi Transformasi Jam'iyah (2031–2035), jaringan layanan kesehatan NU mulai berkembang menjadi sistem yang lebih terintegrasi. Berbagai layanan kesehatan di tingkat wilayah dan cabang dapat saling terhubung melalui platform digital, sehingga kualitas layanan menjadi lebih merata. Program promosi kesehatan berbasis masjid, pesantren, dan komunitas juga diperluas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.

Memasuki fase Kemandirian Jam'iyah (2036–2040), sebagaimana tergambar dalam roadmap, NU diharapkan memperoleh rekognisi nasional atas sistem layanan kesehatannya.

Kesehatan

2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050
Transformasi Jam'iyah	**Akselerasi Transformasi Jam'iyah**	**Kemandirian Jam'iyah**	**Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global**	**Ekosistem Peradaban**
Akses Kesehatan jamaah dan prasarana Kesehatan NU yang tersebar merata	Layanan kesehatan NU selaras dengan system kesehatan nasional	Rekognisi layanan dan sistem kesehatan NU dalam dunia kesehatan Indonesia.	Layanan dan sistem kesehatan NU berperan aktif dalam perkembangan isu kesehatan nasional	Sistem kesehatan NU menjadi salah satu rujukan di Kawasan regional
Outcome: • Ekosistem kesehatan NU dengan awareness yang baik dan prasarana kesehatan yang terstandarisasi	**Outcome:** • Layanan kesehatan NU terintegrasi dengan system jaminan nasional yang mandiri dan professional	**Outcome:** • Sistem layanan kesehatan NU terkoneksi dengan sistem layanan kesehatan nasional	**Outcome:** • Sistem layanan kesehatan NU bersinergi dengan perencanan kesehatan nasional	**Outcome:** • Layanan kesehatan NU terintegrasi dengan system kesehatan regional
Strategi: • Penguatan database dan asistensi, termasuk bagi asosiasi profesi kesehatan NU • Pembangunan dan/atau perluasan layanan Kesehatan • Promosi Kesehatan bagijamaah	**Strategi:** • Manajemen data jamaah penerima manfaat layanan kesehatan NU • Membangun system layanan Kesehatan terpadu yang menghubungan antarlayanan dan antara Nahdliyyin sebagai penerima manfaat dengan layanan kesehatan NU • Melanjutkan Pembangunan layanan kesehatan	**Strategi:** • Penguatan jejaring layanan kesehatan secara nasional • Membangun layanan Kesehatan bertaraf nasional di setiap satuan kepengurusan wilayah	**Strategi:** • Mengembangan rumah sakit rujukan nasional • Berpartisipasi dan melakukan advokasi isu-isu kesehatan di forum nasional	**Strategi:** • Mengembangkan rumah sakit rujukan Kawasan dalamkeunggulan tertentu • Berpartisipasi dan melakukan advokasi isu-isu kesehatan di forum internasional

Sistem kesehatan NU telah terkoneksi dengan sistem layanan kesehatan nasional sehingga mampu berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.

Outcome yang ingin dicapai pada fase ini adalah terbentuknya sistem layanan kesehatan NU yang terhubung dengan sistem kesehatan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang ditempuh antara lain penguatan jejaring layanan kesehatan secara nasional serta pembangunan layanan kesehatan bertaraf nasional di setiap wilayah kepengurusan.

Tahap ini menandai perubahan penting dari pendekatan yang sebelumnya berbasis proyek menjadi sistem yang berkelanjutan. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan NU tidak lagi berdiri sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari jaringan yang saling mendukung dalam pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan inovasi kesehatan.

Pada fase Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global (2041–2045), peran NU meningkat dari penyedia layanan menjadi aktor yang berkontribusi dalam perumusan arah pembangunan kesehatan nasional. Roadmap menargetkan agar layanan dan sistem kesehatan NU berperan aktif dalam perkembangan isu kesehatan nasional.

Outcome yang diharapkan adalah terjalinnya sinergi antara sistem layanan kesehatan NU dan perencanaan kesehatan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, strategi yang dilakukan meliputi pengembangan rumah sakit rujukan nasional serta partisipasi aktif dalam advokasi berbagai isu kesehatan pada forum nasional.

Pada fase ini, NU dapat mengambil peran dalam isu-isu strategis seperti kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, kesehatan mental, kesehatan lansia, bioetika, hingga dampak teknologi terhadap kesehatan manusia.

Memasuki fase Ekosistem Peradaban (2046–2050), sistem kesehatan NU berkembang menjadi model pelayanan kesehatan Islam yang modern, inklusif, dan berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Rumah sakit, pusat penelitian, institusi pendidikan kesehatan, dan

sistem layanan berbasis komunitas membentuk sebuah ekosistem kesehatan yang memberikan manfaat tidak hanya bagi warga NU, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia secara luas.

Dalam jangka panjang, keberhasilan pembangunan kesehatan NU akan menjadi salah satu kontribusi paling nyata organisasi terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.

3. Keluarga Maslahat dan Kesetaraan Gender

Keluarga merupakan unit sosial paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Kualitas keluarga sangat menentukan kualitas generasi masa depan. Oleh karena itu, pembangunan keluarga tidak dapat dipisahkan dari agenda besar pembangunan peradaban.

Indonesia sedang menghadapi berbagai perubahan sosial yang memengaruhi kehidupan keluarga. Urbanisasi, digitalisasi, perubahan pola kerja, meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya tingkat fertilitas, serta perubahan nilai sosial menciptakan tantangan baru yang membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif.

Di sisi lain, isu kesetaraan gender semakin memperoleh perhatian dalam pembangunan nasional maupun global. Kesetaraan gender bukan hanya persoalan keadilan, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas pembangunan. Berbagai studi menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan kepemimpinan memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Dalam konteks NU, pembangunan keluarga maslahat dan kesetaraan gender merupakan bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan berkemajuan tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah.

Pada fase Transformasi Jam'iyah (2026–2030), fokus diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan yang menangani isu keluarga dan perempuan. Program pendidikan keluarga,

Keluarga Maslahat dan Kesetaraan Gender

2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050
Transformasi Jam'iyah	**Akselerasi Transformasi Jam'iyah**	**Kemandirian Jam'iyah**	**Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global**	**Ekosistem Peradaban**
Penguatan dan terbangunnya cross cutting issues antara nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyyah dengan program organisasi dan fondasi sosial bagi keadilan gender dan keluarga maslahat.	Menjadi driver of social transformation dalamisu-isu keadilan gender dan keluarga yang terakui	NU mencapai Tingkat keberlanjutan dan kematangan institusional dalam isu kesetaraan gender dan ketahanan keluarga.	NU menjadi rujukan etis dalam isu keadilan gender, etika keluarga, dan pengembangan sosial.	NU menjadi salah satu rujukanpenting dalam Pembangunan peradaban global yang mempromosikan martabat, keadilan, kemaslahatan keluarga, dan keadilan gender.
Outcome: • Semakin kuatnya ketahanan keluarga di level grassroot • Kebijakan organisasi yang responsive gender di semua institusi NU • Meningkatnya partisipasi Perempuan dalam kepemimpinan • Semakin berkurangnya praktik-praktik yang membahayakan keluarga (missal: kawin anak, KDRT).	**Outcome:** • Framework keadilan gender dan ketahanan keluarga ala NU diadopsi oleh kalangan luas. • Program-program penguatan ekonomi Perempuan (women-led economic empowerment programs) semakin meluas • Konseling dan system perlindungan keluarga beroperasi dalam jaringan NU • Semakin banyak Perempuan terlibat dalam pembuatan keputusan organisasi.	**Outcome:** • Mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan untuk program-program sosial • Sistem perlindungan berbasis komunitas (Community-based protection system) berfungsi dengan baik • Berkurangnya secara signifikan kekerasan berbasis gender dan kerentanan keluarga	**Outcome:** • Framework NU diadopsi dalam kebijakan nasional. • NU terakui sebagai mediator terpercaya dalam isu-isu keluarga dan etika sosial. • Kuatnya kepercayaan public terhadap kepemimpinan inklusif NU • NU menjadi model pengembangan keluarga Muslim moderat ala Indonesia.	**Outcome:** • Rekognisi internasional terhadap model gender dan keluarga NU • Terbangunnya jejaring global dalam membangun humanisme Islam dan ketahanan keluarga • Kuatnya kontribusi terhadap perdamaian, etika, dan agenda-agenda internasional. • Lahirnya ekosistem pengetahuan dan kepemimpinan transnasional.
Strategi: • Massifikasi kesadaran keadilan gender dan keluarga maslahat berbasis Aswaja An-Nahdliyah (missal: fiqh gender dan keluarga) • Pengarusutamaan gender di pesantren, madrasah, dan institusi-institusi NU. • Pelatihan bagi para kiai/ nyai/ ustadz/ ustadzah/ muballigh/ muballighat dan fasilitator komunitas • Memperkuat kemitraan gender dalam pemerintahan dan civil society	**Strategi:** • Mengintegrasikan pembiayaan dan tata Kelola yang responsive gender • Mendirikan NU centers untuk ketahanan keluarga dan kepemimpinan Perempuan. • Memperkuat literasi digital dan perlindungan online bagi keluarga • Mempromosikan narasi keagamaan yang inklusif.	**Strategi:** • Membangun usaha sosial (social enterprise) yang berfungsi memberi dukunganbagi kesejahteraan keluarga. • Pelembagaan kepemimpinan Perempuan • Penguatan kapasitas advokasi kebijakan dalam isu gender dan keluarga • Mengembangkan model-model keluarga maslahat	**Strategi:** • Membuat dialog nasional tentang etika Pembangunan dan kebijakan keluarga • Memproduksi kitab keagamaan otoritatif yang berisi isu-isu sosial baru yang membutuhkan pemecahan • Memperkuat aliansi nasional dengan perguruan tinggi, Kementerian, dan media. • Mempromosikan keluarga maslahat dalam penggunaan teknologi digital.	**Strategi:** • Mendirikan global centers for Islamic civilization and family studies • Mengekspo best practices NU dalamisu gender dan keluarga melalui Pendidikan dan diplomasi. • Memimpin inisitaif-inisiatif kemanusiaan dan perdamaian. • Mengembangkan dialog antar peradaban berbasis islam rahmatan lil alamin dan martabat kemanusiaan

penguatan ketahanan rumah tangga, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, serta peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan menjadi prioritas utama.

Pada fase Akselerasi Transformasi Jam'iyah (2031–2035), berbagai program yang telah dibangun diperluas skalanya. Sistem perlindungan keluarga berbasis komunitas mulai dibentuk dan diperkuat melalui jaringan masjid, pesantren, majelis taklim, dan organisasi perempuan NU. Pada tahap ini, keluarga maslahat tidak lagi dipandang sebagai isu privat, melainkan sebagai bagian dari pembangunan sosial yang lebih luas.

Memasuki fase Kemandirian Jam'iyah (2036–2040), roadmap menargetkan agar NU mencapai tingkat keberlanjutan dan kematangan institusional dalam isu kesetaraan gender dan ketahanan keluarga.

Outcome yang ingin dicapai meliputi terbentuknya mekanisme pembiayaan berkelanjutan bagi program-program sosial, berfungsinya sistem perlindungan berbasis komunitas, serta berkurangnya secara signifikan kekerasan berbasis gender dan kerentanan keluarga.

Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa strategi utama yang ditempuh adalah membangun usaha sosial yang mendukung kesejahteraan keluarga, memperkuat kepemimpinan perempuan, meningkatkan kapasitas advokasi kebijakan, dan mengembangkan berbagai model keluarga maslahat yang dapat direplikasi secara luas.

Tahap ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa isu keluarga tidak hanya ditangani melalui pendekatan moral dan edukatif, tetapi juga melalui pendekatan ekonomi, kelembagaan, dan kebijakan publik.

Pada fase Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global (2041–2045), NU diharapkan menjadi rujukan etis dalam isu keadilan gender, etika keluarga, dan pengembangan sosial.

Roadmap menargetkan empat outcome utama, yaitu diadopsinya framework NU dalam kebijakan nasional, pengakuan terhadap NU sebagai mediator terpercaya dalam isu keluarga dan etika sosial, meningkatnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan inklusif NU, serta berkembangnya model keluarga Muslim moderat ala Indonesia.

Untuk mewujudkannya, NU akan mengembangkan dialog nasional mengenai etika pembangunan dan kebijakan keluarga, memproduksi literatur keagamaan yang menjawab berbagai isu sosial kontemporer, memperkuat aliansi dengan perguruan tinggi, kementerian, dan media, serta mempromosikan konsep keluarga maslahat dalam menghadapi tantangan era digital.

Pada fase Ekosistem Peradaban (2046–2050), keluarga maslahat menjadi salah satu pilar utama peradaban NU. Berbagai model penguatan keluarga, pendidikan karakter, perlindungan sosial, dan kepemimpinan perempuan berkembang menjadi sistem sosial yang berkelanjutan. Pengalaman NU dalam membangun ketahanan keluarga dapat menjadi rujukan bagi berbagai komunitas Muslim di dunia.

Pembangunan keluarga maslahat dan kesetaraan gender bukan sekadar program sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat, berakhlak, produktif, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Di sinilah NU dapat memainkan peran historisnya sebagai penjaga nilai sekaligus penggerak perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berperadaban.

Dimensi III

Keunggulan Sumber Daya Manusia NU

1. Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Pendidikan Tinggi
3. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

1. Pendidikan Dasar dan Menengah

Dimensi Keunggulan SDM Warga NU pada bidang Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan pilar strategis dalam membangun generasi Nahdlatul Ulama yang unggul, berkarakter, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan peradaban dunia. Transformasi ini dirancang secara bertahap selama lima periode pembangunan, mulai dari penguatan fondasi pendidikan pada tahun 2026 hingga terwujudnya ekosistem pendidikan berkelas dunia pada tahun 2050.

Pendidikan Dasar dan Menengah #1

2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050
Transformasi Jam'iyah	**Akselerasi Transformasi Jam'iyah**	**Kemandirian Jam'iyah**	**Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global**	**Ekosistem Peradaban**
Kuatnya fondasi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas NU sambil tetap melestarikan identitas keagamaan dan budaya NU.	Percepatan inovasi pendidikan, integrasi digital, profesionalisme guru, dan daya saing institusional di tingkat nasional dan regional.	Sekolah dasar hingga menengah NU menjadi sekolah yang kuat secara akademis, berkelanjutan secara finansial, maju secara teknologi, dan mandiri secara institusional	Sekolah-sekolah NU menjadi pusat kepemimpinan etis, nilai-nilai Islam moderat, pendidikan perdamaian, dan tanggung jawab sosial di tingkat nasional dan internasional.	Sekolah-sekolah NU menjadi rujukan global dalam mengintegrasikan nilai-nilai universal agama, kemajuan ilmiah, kemanusiaan, keberlanjutan, dan etika teknologi dalam pendidikan dasar dan menengah.
Outcome: • Kurikulum NU terintegrasi untuk sekolah dasar hingga menengah atas • Sistem pembelajaran berbasis digital di sekolah • Kerangka kerja tata kelola sekolah yang terstandarisasi • Basis data nasional sekolah dan guru NU • Program peningkatan kompetensi guru • Standar kualitas minimum untuk semua sekolah NU	**Outcome:** • Ekosistem sekolah cerdas • Platform pembelajaran berbasis AI • Sekolah-sekolah NU yang berdaya saing nasional • Penguatan STEM dan kejuruan yang kuat • Peningkatan akreditasi dan hasil prestasi siswa.	**Outcome:** • Sistem sekolah NU yang berkelanjutan secara finansial • Kapasitas inovasi kurikulum yang mandiri • Sekolah model nasional dalam jaringan NU • Lingkungan pembelajaran digital dan berbasis riset yang canggih • Lulusan yang berdayasaing global	**Outcome:** • Model pendidikan berbasis etika dan moderasi • Program kepemimpinan siswa dan duta perdamaian • Pengakuan internasional terhadap nilai-nilai sekolah NU • Budaya pendidikan kewarganegaraan dan kemanusiaan yang kuat • Kemitraan global dalam pendidikan karakter	**Outcome:** • Model sekolah NU yang diakui secara internasional • Ekosistem pembelajaran digital global • Kerangka pendidikan berorientasi peradaban • Platform kolaborasi siswa internasional • Lulusan berkontribusi pada perdamaian dan keberlanjutan global
Strategi: **1. Sistem Pembelajaran** • Mengintegrasikan nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyah, sains, literasi, numerasi, teknologi, dan pendidikan karakter • Memperkenalkan pembelajaran campuran dan ruang kelas digital • Memperkuat literasi bahasa Arab, Inggris, dan digital sejak kelas awal • Menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa (student-centered learning) dan berbasis proyek • Mengembangkan kearifan lokal dan pendidikan lingkungan	**Strategi:** **1. Sistem Pembelajaran** • Menerapkan sistem pembelajaran yang dipersonalisasi dan adaptif • Memperkuat pendidikan STEM, pemrograman, robotika, dan kewirausahaan • Memperluas program dwibahasa dan berorientasi internasional • Mengintegrasikan pendidikan keberlanjutan, etika, dan kewarganegaraan global	**Strategi:** **1. Sistem Pembelajaran** • Mengembangkan program pengayaan kurikulum otonom • Mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan etika Islam • Memperluas pendidikan penelitian, inovasi, dan kewirausahaan siswa	**Strategi:** **1. Sistem Pembelajaran** • Mengintegrasikan kepemimpinan etis dalam roses pendidikan • Memperkuat pemahaman antar agama dan pendidikan toleransi • Mengembangkan tanggung jawab sosial dan kemanusiaan • Mempromosikan pengalaman belajar global yang kolaboratif	**Strategi:** **1. Sistem Pembelajaran** • Mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada peradaban • Memperkuat kompetensi siswa berorientasi masa depan dan adaptif

Pendidikan Dasar dan Menengah #2

2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050
Transformasi Jam'iyah	**Akselerasi Transformasi Jam'iyah**	**Kemandirian Jam'iyah**	**Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global**	**Ekosistem Peradaban**
2. Tata Kelola • Menstandarisasi sistem manajemen sekolah di seluruh sekolah NU. • Menerapkan sistem keuangan dan administrasi yang transparan • Mengembangkan perencanaan strategis sekolah dan manajemen kinerja. • Memperkuat kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi manajerial	**2. Tata Kelola** • Memperkuat manajemen sekolah berbasis data • Mengembangkan model keberlanjutan keuangan sekolah • Memperkuat tata kelola sekolah yang otonom namun akuntabel • Membangun sistem informasi sekolah terintegrasi	**2. Tata Kelola** • Mengembangkan sistem pendanaan sekolah dan wakaf yang independen • Menerapkan manajemen sekolah kewirausahaan • Memperkuat perencanaan strategis dan otonomi kelembagaan • Memanfaatkan analitik pendidikan prediktif untuk pengambilan keputusan kebijakan	**2. Tata Kelola** • Memperkuat tata kelolasekolah berbasis nilai dan partisipatif • Membangun lingkungan pendidikan inklusif • Menerapkan standar kepemimpinan etis untuk pemimpin sekolah • Mempromosikan kebijakan institusional yang bertanggung jawab secara sosial	**2. Tata Kelola** • Mengembangkan sistem tata kelola sekolah yang terhubung secara global • Membangun ekosistem pendanaan pendidikan yang berkelanjutan • Menerapkan manajemen kolaborasi pendidikan transnasional • Memperkuat perencanaan yang berorientasi pada perubahan di masa depan
3. Jaringan • Memperkuat jaringan sekolah dasar hingga menengah NU secara nasional • Membangun kolaborasi antar sekolah, pesantren, orang tua, dan Masyarakat • Memperkuat kemitraan dengan pemerintah dan sektor swasta • Membangun komunitas belajar guru regional	**3. Jaringan** • Mengembangkan kemitraan dengan sekolah dan institusi ASEAN • Memperkuat jaringan keterlibatan alumni dan orang tua • Membangun kolaborasi industri dan universitas untuk jalur karier • Membuat forum inovasi sekolah NU	**3. Jaringan** • Membangun aliansi sekolah nasional dan internasional • Memperluas kolaborasi Pendidikan dengan lembaga global • Memperkuat kolaborasi digital antar sekolah NU di seluruh dunia • Mengembangkan inisiatif diplomasi pendidikan	**3. Jaringan** • Membangun kemitraan global • Mengembangkan program pertukaran global siswa dan guru • Memperkuat keterlibatan masyarakat dan berbagai stakeholders lain	**3. Jaringan** • Membangun kemitraan sekolah NU di seluruh dunia • Membangun platform pendidikan digital global • Berkolaborasi dengan pusat inovasi pendidikan dasar-menegah global • Memperkuat inisiatif Pendidikan kemanusiaan
4. Sumber Daya Manusia • Peningkatan kompetensi guru berkelanjutan • Program pengembangan kepemimpinan kepala sekolah • Pelibatan pendidik muda dengan kemampuan digital	**4. Sumber Daya Manusia** • Paparan dan pertukaran internasional untuk guru dan kepala sekolah • Program pengembangan bakat untuk siswa dan pendidik berprestasi • Sistem kesejahteraan dan insentif guru yang kompetitif • Pengembangan guru spesialis di bidang STEM dan bahasa	**4. Sumber Daya Manusia** • Mengembangkan guru-guru ahli dan pemimpin pendidikan • Memperkuat budaya penelitian dan inovasi pendidik • Membangun standar kompetensi global untuk guru • Menerapkan sistem suksesi kepemimpinan	**4. Sumber Daya Manusia** • Mengembangkan pendidik sebagai pemimpin moral dan masyarakat • Memperkuat kompetensi konseling dan pembinaan karakter • Mendorong partisipasi pendidik dalam forum global • Membangun sistem kolaborasi pendidik internasional	**4. Sumber Daya Manusia** • Mengembangkan pendidik dan siswa yang berwawasan global • Memperkuat kompetensi pengajaran interdisipliner • Mempromosikan pembaruan profesional berkelanjutan

Pendidikan Dasar dan Menengah #3

2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050
Transformasi Jam'iyah	**Akselerasi Transformasi Jam'iyah**	**Kemandirian Jam'iyah**	**Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global**	**Ekosistem Peradaban**
5. Penjaminan Mutu • Menetapkan standar mutu sekolah NU • Melakukan evaluasi akademik dan manajemen secara berkala • Mengembangkan program bantuan akreditasi sekolah • Membuat sistem pemantauan kinerja Sekolah	**5. Penjaminan Mutu** • Tolok ukur NU Sekolah-sekolah dengan standar nasional dan internasional • Menerapkan evaluasi Pendidikan berbasis hasil • Memanfaatkan sistem pemantauan kualitas digital • Memperkuat penilaian kompetensi siswa	**5. Penjaminan Mutu** • Mencapai standar akreditasi nasional dan internasional • Mengembangkan Unit evaluasi pendidikan independen • Melaksanakan program benchmarking global • Memperkuat sistem pelacakan kualitas lulusan	**5. Penjaminan Mutu** • Mengukur hasil karakter, etika, dan dampak sosial • Memperkuat evaluasi kepuasan masyarakat • Mengembangkan indikator kepemimpinan moral • Melakukan penilaian tinjauan sejawat internasional	**5. Penjaminan Mutu** • Mengembangkan indikator dampak pendidikan global • Mengintegrasikan keberlanjutan dan etika ke dalam sistem evaluasi • Melakukan tinjauan inovasi dan tolok ukur secara berkelanjutan • Mengukur kontribusi jangka panjang bagi masyarakat dan peradaban

Roadmap ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas akademik, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses pendidikan tetap berakar pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, tradisi keilmuan Islam yang moderat, serta semangat pengabdian sosial yang menjadi ciri khas NU.

Roadmap ini menggambarkan perjalanan transformasi yang dimulai dari penguatan fondasi, dilanjutkan dengan akselerasi inovasi, mencapai kemandirian institusi, melahirkan kepemimpinan etik, hingga membangun ekosistem peradaban global. Transformasi ini bertujuan menghasilkan generasi warga NU yang memiliki kedalaman spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kecanggihan teknologi, kepemimpinan yang beretika, serta komitmen kuat terhadap kemanusiaan dan keberlanjutan.

Dengan demikian, sekolah-sekolah NU akan berkembang dari lembaga pendidikan berbasis komunitas menjadi pusat unggulan pendidikan dunia yang tetap berakar pada nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyah dan berkontribusi aktif dalam membangun peradaban global yang damai, adil, dan berkelanjutan.

Fase 1. Transformasi (2026–2030): Penguatan Fondasi

Pada fase pertama, fokus utama adalah memperkuat fondasi pendidikan dasar dan menengah NU agar memiliki standar kualitas yang merata dan mampu menjaga identitas keislaman serta kebudayaan NU di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Fase ini menjadi tahap konsolidasi nasional yang bertujuan membangun sistem pendidikan yang kokoh, terstandarisasi, dan terintegrasi. Sekolah-sekolah NU didorong untuk tidak hanya menjadi lembaga pendidikan formal, tetapi juga menjadi pusat pembentukan karakter, penguatan nilai keagamaan, dan pengembangan kompetensi dasar abad ke-21.

Penguatan system pembelajaran dilakukan melalui melalui integrasi nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyah dengan berbagai disiplin ilmu modern seperti sains, teknologi, literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Sekolah-sekolah NU mulai mengembangkan

model pembelajaran yang memadukan metode konvensional dengan teknologi digital (*blended learning*), sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan relevan.

Penguatan kompetensi bahasa Arab, bahasa Inggris, serta literasi digital juga menjadi prioritas untuk meningkatkan kesiapan siswa menghadapi lingkungan global. Pendidikan berbasis kearifan lokal, pelestarian budaya, dan kepedulian lingkungan diperkuat sebagai bagian dari pembentukan identitas warga NU yang moderat dan berakar pada tradisi. Selain itu, paradigma pembelajaran bergeser dari *teacher-centered learning* menuju *student-centered learning* yang mendorong kreativitas, kolaborasi, pemecahan masalah, dan pembelajaran berbasis proyek.

Pada aspek tata kelola, seluruh sekolah NU mulai menerapkan sistem manajemen yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Standar operasional, sistem penjaminan mutu, mekanisme evaluasi kinerja, serta penggunaan data dalam pengambilan keputusan mulai diterapkan secara sistematis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan.

Transformasi pendidikan dasar dan menengah NU tidak hanya ditentukan oleh kualitas kurikulum dan pembelajaran, tetapi juga oleh kekuatan jejaring kelembagaan, kualitas sumber daya manusia pendidikan, serta sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan. Ketiga elemen ini menjadi fondasi strategis yang memastikan seluruh proses transformasi dapat berjalan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

Melalui penguatan jaringan, NU membangun ekosistem pendidikan yang terkoneksi dari tingkat lokal hingga global. Melalui pengembangan sumber daya manusia, NU memastikan tersedianya guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan yang profesional serta berkarakter. Sementara itu, melalui sistem penjaminan mutu, NU membangun mekanisme evaluasi dan peningkatan kualitas yang memungkinkan sekolah-sekolah NU terus berkembang menuju standar nasional dan internasional.

Pada tahap ini, NU berupaya membangun keterhubungan

yang lebih kuat di antara seluruh satuan pendidikan yang berada dalam ekosistemnya. Jaringan sekolah dasar dan menengah NU diperkuat melalui pembentukan forum komunikasi nasional yang memungkinkan pertukaran pengalaman, praktik baik, serta kolaborasi program antar lembaga pendidikan. Kolaborasi antara sekolah, pesantren, perguruan tinggi, dan masyarakat mulai dikembangkan secara sistematis sehingga tercipta kesinambungan pendidikan dalam satu ekosistem keilmuan dan pembinaan karakter. Di samping itu, kemitraan dengan pemerintah daerah, kementerian terkait, dunia usaha, serta organisasi masyarakat diperluas untuk mendukung pengembangan program pendidikan yang lebih berkualitas.

Guru dan tenaga kependidikan menjadi aktor utama dalam transformasi pendidikan. Karena itu, pada periode ini dilakukan peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan melalui pelatihan pedagogik, penguatan literasi digital, peningkatan kapasitas pembelajaran berbasis teknologi, serta penguatan nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyah. Program kepemimpinan bagi kepala sekolah mulai dikembangkan untuk memperkuat kemampuan manajerial, kepemimpinan perubahan, serta tata kelola lembaga yang profesional. NU juga mulai membuka ruang yang lebih besar bagi pendidik muda yang memiliki kompetensi digital dan semangat inovasi untuk terlibat aktif dalam transformasi pendidikan.

Pada fase awal ini, NU membangun fondasi sistem mutu pendidikan yang terintegrasi. Standar mutu sekolah NU ditetapkan sebagai acuan nasional yang mencakup aspek akademik, tata kelola, karakter, lingkungan belajar, serta integrasi nilai-nilai keislaman. Evaluasi akademik dan manajemen sekolah dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap sekolah bergerak menuju standar yang sama. Program pendampingan akreditasi juga diperkuat agar seluruh sekolah mampu memenuhi standar nasional pendidikan. Sistem pemantauan kinerja sekolah mulai dibangun berbasis data sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih objektif dan terukur.

Pada akhir periode ini diharapkan tercapai:

a. Kurikulum khas NU yang terintegrasi dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
b. Sistem pembelajaran berbasis digital yang diterapkan secara bertahap di seluruh sekolah NU.
c. Kerangka tata kelola sekolah yang terstandarisasi secara nasional.
d. Basis data nasional sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik NU yang terintegrasi.
e. Program peningkatan kompetensi guru yang berkelanjutan.
f. Standar kualitas minimum yang menjadi acuan seluruh sekolah NU di Indonesia.

Fase 2. Akselerasi Transformasi (2031–2035)

Setelah fondasi terbentuk, fase kedua difokuskan pada percepatan inovasi pendidikan, integrasi teknologi digital yang lebih mendalam, profesionalisasi guru, dan peningkatan daya saing institusi pendidikan NU di tingkat nasional maupun regional. Periode ini menjadi masa akselerasi di mana sekolah-sekolah NU mulai bergerak dari sekadar memenuhi standar menuju pencapaian keunggulan kompetitif.

Sekolah NU mulai menerapkan pembelajaran yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan, minat, dan potensi peserta didik. Pemanfaatan *artificial intelligence* atau kecerdasan buatan memungkinkan penyusunan jalur belajar yang lebih efektif sehingga siswa dapat berkembang secara optimal.

Pendidikan STEM *(Science, Technology, Engineering, Mathematics)* diperluas melalui laboratorium modern, pembelajaran robotika, pemrograman, desain teknologi, dan inovasi digital. Di saat yang sama, pendidikan kewirausahaan dikembangkan agar siswa memiliki mental kreatif, mandiri, dan produktif. Tidak hanya itu, program *bilingual* dan kerja sama internasional diperluas sehingga siswa memiliki kemampuan

komunikasi global yang lebih baik. Materi tentang keberlanjutan, etika global, dan kewarganegaraan dunia mulai menjadi bagian penting dalam kurikulum sekolah NU.

Manajemen sekolah semakin mengandalkan analisis data untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dan efektivitas pengambilan keputusan.

Pada tahap ini, jaringan pendidikan NU mulai melampaui batas nasional. Kemitraan dengan sekolah-sekolah dan institusi pendidikan di kawasan ASEAN diperluas untuk membuka akses terhadap praktik pendidikan terbaik di tingkat regional. Jaringan alumni dan orang tua diperkuat sebagai bagian dari ekosistem pendukung pendidikan yang aktif berkontribusi dalam pengembangan sekolah.

Kerja sama dengan dunia industri dan perguruan tinggi semakin intensif untuk memperkuat relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masa depan. Forum inovasi sekolah NU dibentuk sebagai wadah kolaborasi nasional dalam mengembangkan berbagai model pendidikan unggulan.

Guru dan kepala sekolah mulai mendapatkan kesempatan mengikuti program paparan internasional, pertukaran pendidikan, dan pelatihan global. Program pengembangan bakat bagi siswa berprestasi dan pendidik unggul diperluas sehingga muncul kelompok-kelompok talenta yang dapat menjadi penggerak inovasi pendidikan. Sistem kesejahteraan dan insentif guru diperkuat untuk meningkatkan motivasi, profesionalisme, dan keberlanjutan karier. Selain itu, dilakukan pengembangan guru spesialis pada bidang-bidang strategis seperti STEM, kecerdasan buatan, literasi digital, bahasa asing, dan pendidikan karakter.

Sistem penjaminan mutu berkembang dari sekadar pemenuhan standar menuju pencapaian keunggulan. NU mulai mengembangkan tolok ukur mutu sekolah yang mengacu pada standar nasional dan praktik internasional. Evaluasi pendidikan berbasis hasil (*outcome-based evaluation*) diterapkan untuk mengukur dampak nyata pendidikan terhadap perkembangan

peserta didik. Pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan mutu semakin diperluas sehingga data kualitas pendidikan dapat dipantau secara real time.

Hasil yang diharapkan adalah:

a. Terbangunnya ekosistem sekolah cerdas (*smart school*).
b. Tersedianya platform pembelajaran berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*).
c. Meningkatnya daya saing sekolah NU secara nasional.
d. Penguatan pendidikan STEM dan pendidikan kejuruan.
e. Peningkatan akreditasi sekolah serta prestasi akademik dan non-akademik siswa.

Fase 3. Kemandirian (2036–2040)

Pada tahap ini, sekolah-sekolah NU diharapkan telah berkembang menjadi institusi pendidikan yang kuat secara akademis, mandiri secara finansial, maju secara teknologi, dan mampu mengelola inovasi pendidikan secara berkelanjutan. Kemandirian menjadi kata kunci utama pada periode ini.

Di tahap ini, sekolah-sekolah NU memiliki ruang lebih terbuka untuk mengembangkan kurikulum yang kontekstual sesuai kebutuhan lokal tanpa kehilangan identitas ke-NU-an. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan agar tetap berlandaskan prinsip moral dan etika Islam. Sehingga, lulusan sekolah NU tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab sosial yang kuat. Budaya penelitian mulai dibangun sejak pendidikan dasar dan menengah melalui proyek ilmiah, laboratorium inovasi, serta program kewirausahaan siswa. Untuk menopang kebutuhan pendanaan, sekolah didorong mengembangkan model pendanaan berkelanjutan melalui wakaf produktif, kemitraan strategis, dan usaha pendidikan yang profesional.

Pada tahap ini, jaringan pendidikan NU berkembang menjadi komunitas pembelajaran global yang mandiri dan

inovatif. Sekolah-sekolah NU membangun aliansi strategis dengan sekolah nasional dan internasional yang memiliki visi serupa dalam pengembangan pendidikan berkualitas. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dunia diperluas dalam bentuk penelitian bersama, pengembangan kurikulum, pertukaran sumber daya pendidikan, dan program pembelajaran kolaboratif. Jaringan digital antar sekolah NU di berbagai negara mulai terbentuk sehingga memungkinkan pertukaran pengetahuan dan inovasi secara berkelanjutan. Program diplomasi pendidikan juga dikembangkan untuk memperkenalkan model pendidikan NU kepada masyarakat internasional.

Guru-guru NU didorong menjadi ahli dalam bidang masing-masing dan mampu menghasilkan inovasi pendidikan yang berdampak luas. Budaya penelitian dan publikasi ilmiah tumbuh kuat di kalangan pendidik. Standar kompetensi guru berbasis praktik global mulai diterapkan untuk memastikan kualitas tenaga pendidik setara dengan standar internasional. Sistem kaderisasi dan suksesi kepemimpinan pendidikan dibangun agar regenerasi berjalan secara berkelanjutan.

Sekolah-sekolah NU mulai mencapai berbagai standar akreditasi nasional maupun internasional. Unit evaluasi pendidikan independen dibentuk untuk menjamin objektivitas proses penilaian mutu. *Benchmarking* global dilakukan secara berkala agar sekolah-sekolah NU mampu belajar dari praktik terbaik dunia. Sistem pelacakan kualitas lulusan dikembangkan untuk mengukur relevansi dan dampak pendidikan dalam kehidupan nyata.

Hasil yang diharapkan adalah:

a. Terbangunnya sistem sekolah NU yang berkelanjutan secara finansial.
b. Meningkatnya kapasitas inovasi kurikulum secara mandiri.
c. Hadirnya sekolah model nasional dalam jaringan NU.
d. Terbentuknya lingkungan pembelajaran berbasis riset dan teknologi canggih.
e. Lulusan yang memiliki daya saing global.

Fase 4. Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global (2041–2045)

Pada fase ini, sekolah NU diarahkan menjadi pusat pembentukan pemimpin masa depan yang memiliki kecerdasan intelektual, kematangan spiritual, kepekaan sosial, dan kemampuan berkontribusi pada level nasional maupun internasional. Kepemimpinan tidak hanya diajarkan sebagai kompetensi manajerial, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan pengabdian kepada masyarakat.

Sekolah menjadi ruang pembelajaran yang menumbuhkan sikap toleran, inklusif, dan menghargai keberagaman. Peserta didik dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, lingkungan hidup, dan pengabdian masyarakat. Program pertukaran pelajar, kolaborasi internasional, dan proyek lintas negara dikembangkan secara luas untuk memperkuat wawasan global siswa. Sistem pengelolaan sekolah semakin menekankan partisipasi, integritas, transparansi, dan keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan universal.

Kemitraan global diperluas melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi internasional, dan jaringan sekolah lintas negara. Program pertukaran siswa dan guru berkembang menjadi agenda reguler yang memperkuat wawasan global peserta didik. Masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan semakin aktif dilibatkan dalam pengembangan pendidikan.

Guru tidak lagi hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pemimpin moral dan agen transformasi sosial. Kompetensi konseling, pembinaan karakter, dan kepemimpinan sosial diperkuat. Pendidik didorong terlibat dalam forum-forum global sehingga mampu berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan dunia. Kolaborasi internasional antar pendidik menjadi bagian dari budaya profesional yang mapan.

Di sisi lain, sistem mutu mulai mengukur aspek yang lebih luas dibanding capaian akademik. Indikator karakter, etika, kepemimpinan moral, kontribusi sosial, dan dampak kemanusiaan

menjadi bagian penting dalam evaluasi kualitas sekolah. Penilaian sejawat internasional (*international peer review*) diterapkan untuk memperoleh perspektif global terhadap kualitas pendidikan NU.

Hasil yang diharapkan adalah:

a. Model pendidikan berbasis etika dan moderasi yang menjadi rujukan nasional.
b. Program kepemimpinan siswa dan duta perdamaian.
c. Pengakuan internasional terhadap nilai-nilai pendidikan NU.
d. Budaya pendidikan kewarganegaraan dan kemanusiaan yang kuat.
e. Kemitraan global dalam pendidikan karakter.

Fase 5. Ekosistem Peradaban (2046–2050)

Periode terakhir merupakan puncak transformasi Pendidikan dasar dan menengah NU. Sekolah-sekolah NU diharapkan telah menjadi bagian dari ekosistem pendidikan global yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam *rahmatan lil 'alamin* dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban manusia. Pada tahap ini, NU tidak lagi hanya menjadi peserta dalam perkembangan pendidikan dunia, tetapi menjadi salah satu rujukan utama dalam membangun pendidikan masa depan yang berkeadaban.

Pendidikan diarahkan untuk membentuk generasi yang mampu memimpin peradaban masa depan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kemanusiaan, dan keberlanjutan. Untuk itu, siswa dibekali kemampuan berpikir sistemik, kecerdasan digital, kreativitas, kepemimpinan global, kemampuan adaptasi tinggi, serta kecakapan menghadapi perubahan yang sangat cepat.

Sekolah-sekolah NU terhubung dalam jaringan pendidikan internasional yang memungkinkan kolaborasi riset, pertukaran pengetahuan, dan inovasi pendidikan lintas negara. Lulusan sekolah NU diharapkan menjadi agen perdamaian, pelopor pembangunan berkelanjutan, pemimpin global yang beretika, dan penjaga nilai-nilai kemanusiaan universal.

Sekolah-sekolah NU terhubung dalam jaringan pendidikan global yang mencakup berbagai negara dan kawasan dunia. *Platform* pendidikan digital global memungkinkan kolaborasi pembelajaran tanpa batas geografis. NU menjalin kemitraan dengan pusat-pusat inovasi pendidikan dunia dalam pengembangan model pendidikan masa depan. Inisiatif pendidikan kemanusiaan dan perdamaian global menjadi salah satu identitas utama jaringan pendidikan NU.

Pendidik dan peserta didik NU berkembang menjadi warga dunia yang tetap berakar pada nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Kompetensi pengajaran interdisipliner menjadi kebutuhan utama untuk menghadapi tantangan kompleks masa depan. Budaya pembelajaran sepanjang hayat dan pembaruan profesional berkelanjutan menjadi bagian integral dari profesi pendidik.

Sistem mutu berkembang menjadi sistem pengukuran dampak peradaban. Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kemajuan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, perdamaian, dan kemanusiaan global. Indikator keberlanjutan, etika, inovasi, dan dampak sosial terintegrasi dalam seluruh proses evaluasi pendidikan. Tinjauan inovasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan sekolah-sekolah NU selalu relevan dengan perkembangan zaman.

Pada akhirnya, pendidikan NU tidak hanya menghasilkan lulusan yang sukses secara individu, tetapi juga melahirkan generasi yang mampu memimpin perubahan, membangun masyarakat yang berkeadaban, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan umat manusia.

Hasil yang diharapkan:

a. Model sekolah NU yang diakui secara internasional.
b. Ekosistem pembelajaran digital global.
c. Kerangka pendidikan berorientasi peradaban.
d. Platform kolaborasi siswa lintas negara.
e. Lulusan yang berkontribusi terhadap perdamaian dunia dan keberlanjutan global.

Transformasi Pendidikan Dasar dan Menengah NU pada periode 2026–2050 merupakan perjalanan panjang dari konsolidasi menuju kepemimpinan peradaban. Melalui penguatan jaringan, NU membangun ekosistem pendidikan yang saling terhubung dari tingkat lokal hingga global. Melalui pengembangan sumber daya manusia, NU menciptakan guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan yang profesional, inovatif, dan berkarakter. Sementara melalui sistem penjaminan mutu yang terus berkembang, NU memastikan bahwa setiap proses transformasi menghasilkan dampak yang nyata dan berkelanjutan.

Pada tahun 2050, sekolah-sekolah NU diharapkan tidak hanya menjadi lembaga pendidikan yang unggul secara akademik, tetapi juga menjadi pusat pembentukan karakter, pengembangan kepemimpinan moral, inovasi sosial, dan pembangunan peradaban dunia yang berlandaskan nilai-nilai Islam *rahmatan lil 'alamin*, kemanusiaan universal, serta keberlanjutan global.

2. Pendidikan Tinggi

Transformasi Pendidikan Tinggi NU dirancang sebagai perjalanan panjang yang bertahap, sistematis, dan visioner untuk menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga akar nilai Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah. *Roadmap* ini terbagi ke dalam lima fase besar yang masing-masing memiliki karakteristik, fokus strategis, serta capaian yang saling berkelanjutan.

Pendidikan Tinggi #1

2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050
Transformasi Jam'iyah	**Akselerasi Transformasi Jam'iyah**	**Kemandirian Jam'iyah**	**Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global**	**Ekosistem Peradaban**
Modernisasi sistem pembelajaran, reformasi tata kelola, transformasi digital, pengembangan dosen, dan standardisasi kualitas.	Percepatan inovasiuntukmenguatkandaya saing kelembagaan di tingkat nasional.	Menjadi Lembaga Pendidikan tinggi yang otonom secara akademis, berkelanjutan secara finansial, maju secara teknologi, dan berpengaruh secara nasional yang berakar pada nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyyah.	Institusi pendidikan tinggi NU menjadi pusat-pusat terkemuka dalam kepemimpinan etis, pemikiran Islam moderat, pembangunan perdamaian, keterlibatan kemanusiaan, dan dialog peradaban.	Institusi pendidikan tinggi NU menjadi penggerak kemajuan peradaban global melalui integrasi nilai-nilai Islam, inovasi ilmiah, keberlanjutan, etika, dan kemanusiaan.
Outcome: • Kerangka kerja pendidikan tinggi NU yang terintegrasi • Sistem pembelajaran dan manajemen akademik digital • Model tata kelola standar untuk pendidikan tinggi NU • Penguatan kualifikasi dan kompetensi dosen • Integrasi nasional lembaga Pendidikan tinggi NU • Peningkatan jaminan kualitas dan akreditasi dasar	**Outcome:** • Ekosistem kampus cerdas • Program kolaborasi akademik internasional • Pusat penelitian dan inovasi • Peningkatan publikasi, paten, dan inovasi komunitas • Akreditasi dan peringkat institusional yang lebih kuat • Lulusan yang kompetitif dan selaras dengan industri masa depan	**Outcome:** • Lembaga pendidikan tinggi yang independen dan berkelanjutan • Ekosistem wakaf universitas yang kuat • Program akademik dan penelitian yang diakui secara internasional • Universitas riset dan pusat keunggulan • Lulusan dan inovasi yang berdaya saing global	**Outcome:** • Pusat-pusat kepemimpinan etis dan studi moderasi Islam • Forum internasional tentang peradaban dan perdamaian • Lulusan yang berperan sebagai pemimpin moral dan intelektual • Inisiatif kemanusiaan dan kebijakan publik yang kuat • Pengakuan internasional dalam pendidikan etika dan sosial	**Outcome:** • Ekosistem pendidikan tinggi NU global • Model pendidikan dan penelitian yang berorientasi pada peradaban • Platform universitas dan penelitian digital internasional • Jaringan inovasi global dan kolaborasi kemanusiaan • Lulusan berkontribusi pada peradaban global yang berkelanjutan
Strategi: **1. Sistem Pembelajaran** • Mengintegrasikan ilmu-ilmu Islam, ilmu- ilmu modern, teknologi, kewirausahaan, dan tanggung jawab sosial • Menerapkan Pendidikan Berbasis Hasil (Outcome-Based Education/OBE) dan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa • Mengembangkan sistem pembelajaran hibrida: konvensional dan digital • Memperkuat studi interdisipliner dan pembelajaran berbasis penelitian • Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, Arab, penulisan akademik, dan literasi digital	**Strategi:** **1. Sistem Pembelajaran** • Menerapkan sistem pembelajaran adaptif dan berbasis AI • Memperkuat program STEM, teknologi digital, ekonomi kreatif, dan ekonomi hijau • Memperluas kelas internasional dan program gelar bersama (dual degree) • Mempromosikan kewirausahaan dan pendidikan berbasis inovasi • Mengintegrasikan studi keberlanjutan dan teknologi etis	**Strategi:** **1. Sistem Pembelajaran** • Mengembangkan sistem inovasi kurikulum otonom • Mengintegrasikan ilmu pengetahuan tingkat lanjut dengan etika dan kemanusiaan Islam • Memperluas program interdisipliner dan transdisipliner • Memperkuat pembelajaran sepanjang hayat dan pendidikan profesional	**Strategi:** **1. Sistem Pembelajaran** • Mengintegrasikan kepemimpinan etis, studi perdamaian, dan dialog peradaban ke dalam kurikulum • Memperkuat kebijakan publik, studi kemanusiaan, dan antaragama • Mempromosikan penelitian yang berdampak sosial dan berbasis komunitas • Mengembangkan pengalaman pembelajaran kolaboratif global	**Strategi:** **1. Sistem Pembelajaran** • Mengembangkan pendidikan interdisipliner yang berpusat pada peradaban • Mengintegrasikan AI, spiritualitas, etika, keberlanjutan, dan studi kemanusiaan • Mempromosikan penelitian dan inovasi kolaboratif global • Memperkuat studi peradaban dan ketahanan masa depan

Pendidikan Tinggi #2

2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050
Transformasi Jam'iyah	**Akselerasi Transformasi Jam'iyah**	**Kemandirian Jam'iyah**	**Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global**	**Ekosistem Peradaban**
2. Tata Kelola • Menstandarisasi tata kelola institusional dan administrasi akademik • Menerapkan sistem manajemen yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi • Mengembangkan perencanaan strategis dan manajemen kinerja institusional • Memperkuat kapasitas kepemimpinan bagi rektor, dekan, dan kepala prodi	**2. Tata Kelola** • Mengembangkan manajemen institusional berbasis data • Memperkuat keberlanjutan keuangan institusional • Menerapkan sistem tata kelola digital terintegrasi • Meningkatkan otonomi institusional dengan akuntabilitas	**2. Tata Kelola** • Mengembangkan tata kelola institusional yang berjiwa wirausaha dan independen • Memperkuat sistem wakaf, investasi, dan pendanaan alternatif • Membangun lembaga pemikir dan pusat kebijakan institusional • Memanfaatkan analitik prediktif untuk perencanaan institusional	**2. Tata Kelola** • Memperkuat tata kelola berbasis nilai dan partisipatif • Membangun kebijakan kelembagaan yang bertanggung jawab secara sosial • Mengembangkan diplomasi Pendidikan dan sistem keterlibatan global • Mempromosikan lingkungan kampus yang inklusif dan multikultural	**2. Tata Kelola** • Mengembangkan sistem tata kelola transnasional • Membangun ekosistem wakaf dan pendanaan global yang berkelanjutan • Menerapkan sistem kepemimpinan yang terdistribusi dan kolaboratif • Memperkuat ketahanan institusional dan kesiapan masa depan
3. Jaringan • Memperkuat jaringan nasional institut, sekolah tinggi, dan universitas NU • Membangun kemitraan dengan pemerintah, industri, pesantren, dan lembaga penelitian • Memperkuat kolaboras iantar lembaga pendidikan tinggi NU • Mengembangkan sistem keterlibatan alumni dan pemangku kepentingan	**3. Jaringan** • Membangun kemitraan akademik ASEAN dan global • Memperkuat kolaborasi dengan industry dan ekosistem inovasi • Mengembangkan mobilitas mahasiswa dan dosen internasional • Membangun konsorsium inovasi pendidikan tinggi NU	**3. Jaringan** • Membangun aliansi universitas global strategis • Memperkuat jaringan kolaborasi penelitian internasional • Mengembangkan keterlibatan alumni dan diaspora internasional • Memperluas kemitraan di seluruh Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika	**3. Jaringan** • Berkolaborasi dengan universitas dan organisasi internasional • Memperkuat kemitraan kemanusiaan dan pembangunan perdamaian global • Mengembangkan platform diplomasi akademik internasional • Memperluas jaringan kolaborasi antarbudaya dan antaragama	**3. Jaringan** • Membangun kemitraan Pendidikan tinggi NU di seluruh dunia • Berkolaborasi dengan lembaga pemikir global, pusat inovasi, dan universitas • Membangun ekosistem pembelajaran dan penelitian digital internasional • Memperkuat inisiatif kemanusiaan dan pendidikan global
4. Sumber Daya Manusia • Mempercepat sertifikasi dosen dan kualifikasi pascasarjana • Fasilitasi untuk studi magister, doktoral, dan pascadoktoral • Melibatkan akademisi muda di bidang-bidang strategis • Peningkatan kompetensi kepemimpinan dan manajemen akademik	**4. Sumber Daya Manusia** • Paparan internasional dan program pertukaran bagi dosen • Akselerasi talenta bagi peneliti dan inovator • Meningkatkan kesejahteraan dosen dan insentif kinerja • Mengembangkan spesialis di bidang strategis dan bidang baru.	**4. Sumber Daya Manusia** • Mengembangkan cendekiawan, peneliti, dan pemimpin akademik kelas dunia • Memperkuat budaya inovasi dan penelitian • Menerapkan standar kompetensi global untuk dosen • Mengembangkan sistem regenerasi kepemimpinan	**4. Sumber Daya Manusia** • Mengembangkan akademisi-diplomat dan intelektual publik • Memperkuat kompetensi kepemimpinan dalam tata kelola global • Mendorong partisipasi dosen dalam forum kebijakan global • Membangun keahlian dalam pembangunan perdamaian dan mediasi	**4. Sumber Daya Manusia** • Mengembangkan cendekiawan, inovator, dan pemimpin peradaban global • Memperkuat kompetensi interdisipliner dan adaptif • Membangun sistem pendampingan dan regenerasi internasional • Mempromosikan pembaruan profesional dan akademik yang berkelanjutan

Pendidikan Tinggi #3

2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050
Transformasi Jam'iyah	**Akselerasi Transformasi Jam'iyah**	**Kemandirian Jam'iyah**	**Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global**	**Ekosistem Peradaban**
5. Penjaminan Mutu • Mengembangkan Standar Mutu Pendidikan Tinggi NU • Memperkuat sistem penjaminan mutu internal • Audit institusional dan pendampingan akreditasi • Menetapkan indikator kinerja institusional	**5. Penjaminan Mutu** • Tolok ukur terhadap standar Pendidikan tinggi internasional • Memperkuat sistem akreditasi berbasis hasil • Menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi digital • Mengukur kemampuan kerja lulusan dan dampak penelitian	**5. Penjaminan Mutu** • Mencapai standar internasional Akreditasi dan sertifikasi • Melakukan benchmarking global dan tinjauan sejawat • Memperkuat sistem pemeringkatan institusional • Mengembangkan lembaga evaluasi independen	**5. Penjaminan Mutu** • Mengembangkan indikator dampa ketika dan sosial • Mengukur kontribusi institusional terhadap masyarakat dan kemanusiaan • Melakukan pengakuan dan penilaian sejawat internasional • Memperkuat sistem evaluasi tata kelola dan kepemimpinan	**5. Penjaminan Mutu** • Mengembangkan indikator dampak peradaban dan keberlanjutan • Melakukan inovasi berkelanjutan dan tinjauan tolok ukur global • Mengukur kontribusi jangka panjang bagi masyarakat global • Menerapkan sistem penjaminan mutu yang adaptif dan berorientasi masa depan

Fase 1. Transformasi Jam'iyah (2026–2030)

Fase awal ini merupakan fondasi utama yang menitikberatkan pada pembenahan internal secara menyeluruh. Fokus utamanya adalah modernisasi sistem pembelajaran, reformasi tata kelola, transformasi digital, serta peningkatan kualitas dosen dan standar mutu pendidikan.

Pada tahap ini, Pendidikan Tinggi NU diarahkan untuk membangun sistem yang terintegrasi secara nasional. Kurikulum mulai menggabungkan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu modern, teknologi, kewirausahaan, dan tanggung jawab sosial. Pendekatan pembelajaran berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) mulai diterapkan secara luas, dengan penekanan pada relevansi hasil belajar terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Transformasi digital menjadi pilar penting, dengan pengembangan sistem pembelajaran *hybrid* (konvensional dan digital), serta penguatan literasi digital di kalangan mahasiswa dan dosen. Di sisi lain, peningkatan kapasitas akademik dilakukan melalui penguatan kemampuan bahasa asing, penulisan ilmiah, dan penelitian.

Dalam aspek tata kelola, fase ini menekankan standardisasi sistem administrasi dan manajemen akademik, serta penguatan sistem penjaminan mutu dan akreditasi dasar. Dengan demikian, pada akhir fase ini diharapkan telah terbentuk kerangka pendidikan tinggi NU yang solid, terstandar, dan siap bertransformasi lebih lanjut.

Pada fase ini, Pendidikan Tinggi NU memulai proses konsolidasi tata kelola dengan membangun sistem perencanaan strategis berbasis kinerja. Institusi diarahkan untuk memiliki: Perencanaan strategis yang terukur dan berbasis data; Sistem manajemen kinerja institusional yang transparan; dan Penguatan kapasitas kepemimpinan di level rektorat, fakultas, hingga program studi. Sementara itu, kepemimpinan tidak lagi bersifat administratif semata, tetapi mulai diarahkan menjadi kepemimpinan transformasional yang mampu mengelola perubahan.

Fase ini ditandai dengan penguatan jaringan internal dan nasional. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa strategi, antara lain: Konsolidasi antar perguruan tinggi NU; Kemitraan dengan pemerintah, industri, pesantren, dan lembaga riset; Penguatan kolaborasi lintas kampus NU; dan Pelibatan alumni dan stakeholder dalam pengembangan institusi. Arah utamanya adalah membangun ekosistem kolaboratif nasional sebagai fondasi ekspansi global di masa depan.

Pengembangan SDM difokuskan pada peningkatan kualifikasi dan kapasitas dasar. Sertifikasi dosen dan peningkatan jenjang pendidikan (S2, S3, postdoctoral. Regenerasi akademisi muda di bidang strategis. Penguatan kompetensi kepemimpinan akademik. Pada fase ini, SDM dipersiapkan sebagai agen transformasi internal.

Sementara itu, sistem mutu mulai distandarkan penyusunan standar mutu internal Pendidikan Tinggi NU; penguatan sistem penjaminan mutu internal (SPMI); audit mutu dan pendampingan akreditasi; dan penetapan indikator kinerja utama institusi.

Pada akhirnya, fase ini menghasilkan *baseline* kualitas nasional yang seragam.

Fase 2. Akselerasi Transformasi (2031–2035)

Memasuki fase kedua, fokus bergeser dari pembenahan internal menuju percepatan inovasi dan peningkatan daya saing di tingkat nasional. Pendidikan Tinggi NU mulai bergerak lebih progresif dengan membangun ekosistem kampus cerdas dan inovatif.

Sistem pembelajaran menjadi lebih adaptif dengan integrasi kecerdasan buatan, teknologi digital, serta pendekatan interdisipliner. Program-program unggulan seperti STEM, ekonomi kreatif, dan ekonomi hijau dikembangkan untuk menjawab tantangan global. Kolaborasi akademik internasional

mulai diperluas melalui program pertukaran pelajar, dual degree, serta kerja sama riset lintas negara. Selain itu, budaya kewirausahaan dan inovasi ditanamkan secara kuat dalam ekosistem kampus.

Dalam aspek kelembagaan, peningkatan kualitas institusi diwujudkan melalui akreditasi yang lebih tinggi dan peningkatan peringkat nasional maupun internasional. Produktivitas akademik juga meningkat signifikan melalui publikasi ilmiah, paten, dan inovasi berbasis komunitas.

Transformasi berlanjut menuju implementasi tata kelola digital terintegrasi. Dan peningkatan otonomi institusi berbasis akuntabilitas. Institusi mulai bergerak ke arah *smart governance*.

Ekspansi jaringan mulai melampaui batas nasional. Ekspansi jaringan bisa dilakukan melalui beberapa strategi: Kemitraan akademik ASEAN dan global; Kolaborasi dengan industri dan ekosistem inovasi; Mobilitas mahasiswa dan dosen secara internasional; dan Pembentukan konsorsium inovasi Pendidikan Tinggi NU. Melalui strategi ini, diharapkan terbentuk jejaring strategis global awal.

Sementara itu, SDM mulai diarahkan ke tingkat global melalui: Program pertukaran internasional; Akselerasi talenta peneliti dan innovator; Peningkatan kesejahteraan berbasis kinerja; dan Pengembangan spesialisasi bidang strategis. Melalui cara-cara ini, SDM diharapkan menjadi aktor kompetitif dalam ekosistem global.

Mutu Pendidikan tinggi mulai diukur secara kompetitif melalui *benchmarking* internasional; sistem akreditasi berbasis hasil; evaluasi digital berkelanjutan; pengukuran employability lulusan

Fase ini menghasilkan institusi yang kompetitif secara nasional dan mulai diakui global. Pada akhir fase ini, diharapkan lulusan Pendidikan Tinggi NU menjadi lebih kompetitif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan industri masa depan.

Fase 3. Kemandirian (2036–2040)

Fase ini menandai tahap kematangan institusional, di mana Pendidikan Tinggi NU mulai mencapai kemandirian akademik, finansial, dan teknologi. Perguruan tinggi NU berkembang menjadi institusi yang otonom dengan sistem tata kelola yang profesional dan berjiwa kewirausahaan. Ekosistem pendanaan berbasis wakaf dan investasi mulai diperkuat sebagai sumber keberlanjutan finansial.

Dalam bidang akademik, inovasi kurikulum otonom dikembangkan dengan integrasi ilmu pengetahuan tingkat lanjut yang berlandaskan etika Islam dan nilai kemanusiaan. Program interdisipliner dan transdisipliner menjadi semakin dominan, mencerminkan kompleksitas tantangan global. Penelitian dan pengembangan mencapai tingkat yang lebih tinggi, dengan lahirnya universitas riset dan pusat-pusat keunggulan (*centers of excellence*). Kolaborasi internasional semakin intensif, memperkuat posisi Pendidikan Tinggi NU di kancah global. Lulusan pada fase ini diharapkan tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga mampu menghasilkan inovasi yang memiliki dampak nyata secara global.

Dalam aspek tata Kelola, institusi Pendidikan tinggi NU mencapai kematangan, dengan dicirikan pada hal-hal sebagai berikut: Tata kelola berbasis kewirausahaan (*entrepreneurial university*); Penguatan sistem wakaf, investasi, dan pendanaan mandiri; Penggunaan analitik prediktif untuk perencanaan strategis; Pembentukan think tank dan pusat kebijakan. Dengan ini, institusi menjadi mandiri, adaptif, dan visioner.

Jaringan Pendidikan tinggi NU berkembang menjadi aliansi global strategis dengan beraliansi dengan universitas dunia; kolaborasi riset internasional intensif; keterlibatan alumni global dan diaspora; dan ekspansi kemitraan lintas kawasan dunia. Dengan ini, perguruan tinggi NU menjadi bagian dari arsitektur akademik global.

Di tahap ini, SDM NU mencapai kelas dunia. Perguruan tinggi NU melahirkan cendekiawan dan pemimpin akademik global. Budaya riset dan inovasi tumbuh dengan kuat. Perguruan tinggi NU memenuhi standar kompetensi internasional.

Hasil di akhir fase ini Adalah SDM NU menjadi *knowledge leader* global. Fase ini juga menghasilkan institusi Pendidikan tinggi berkelas dunia (world-class university ecosystem).

Fase 4. Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global (2041–2045)

Pada fase keempat, Pendidikan Tinggi NU memasuki peran strategis sebagai pusat kepemimpinan etik dan intelektual, baik di tingkat nasional maupun global. Institusi pendidikan tinggi NU menjadi rujukan dalam pengembangan keilmuan, pemikiran Islam moderat, pembangunan perdamaian, dan dialog antarperadaban. Kurikulum mengintegrasikan sains, nilai-nilai kepemimpinan etik, kemanusiaan, dan keberagaman secara mendalam.

Penelitian diarahkan pada isu-isu strategis seperti perdamaian dunia, keadilan sosial, dan keberlanjutan global. Keterlibatan dalam forum internasional semakin intens, menjadikan NU sebagai aktor penting dalam percaturan global.

Dalam tata kelola, pendekatan berbasis nilai dan partisipatif menjadi ciri utama. Tata kelola berbasis nilai: Kepemimpinan partisipatif dan etis; berorientasi dampak sosial; diplomasi pendidikan global; dan kampus inklusif dan multicultural. Intinya, institusi menjadi role model governance berbasis nilai Islam moderat.

Pengembangan jaringan dijadikan sebagai instrumen peradaban. Hal ini bisa dilakukan melalui: kolaborasi global lintas budaya dan agama; platform diplomasi akademik internasional; dan kemitraan kemanusiaan dan perdamaian dunia. Dengan ini, NU berperan sebagai jembatan peradaban global.

Penjaminan mutu dilaksanakan berbasis pada dampak: indikator dampak sosial dan etika; pengakuan global; dan evaluasi kontribusi terhadap kemanusiaan. Mutu tidak lagi hanya akademik, tetapi peradaban.

Kebijakan kelembagaan dirancang untuk memberikan dampak sosial yang luas, termasuk dalam bidang kebijakan publik.

Sementara itu, sumber daya manusia diarahkan untuk menjadi akademisi-diplomat; intelektual public; pakar resolusi konflik dan perdamaian. Lulusan perguruan tinggi NU di tahap ini diharapkan menjadi pemimpin moral dunia. Lulusan pada fase ini tampil sebagai pemimpin moral dan intelektual yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun peradaban yang damai dan berkeadilan.

Fase 5. Ekosistem Peradaban (2046–2050)

Fase terakhir merupakan puncak transformasi, di mana Pendidikan Tinggi NU berperan sebagai penggerak utama peradaban global. Institusi pendidikan tinggi NU tidak lagi hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi berkembang menjadi ekosistem peradaban yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, nilai-nilai Islam, inovasi teknologi, dan keberlanjutan global.

Pendekatan pendidikan menjadi sepenuhnya interdisipliner dan berbasis peradaban, dengan integrasi antara kecerdasan buatan, spiritualitas, etika, dan studi kemanusiaan. Penelitian dan inovasi dilakukan dalam skala global melalui kolaborasi lintas negara dan lintas sektor.

Ekosistem wakaf global menjadi salah satu pilar utama keberlanjutan, mendukung pengembangan pendidikan dan penelitian secara berkelanjutan. Sistem kepemimpinan juga berkembang menjadi lebih terdistribusi dan kolaboratif.

Penjaminan mutu diarahkan pada dampak peradaban; evaluasi jangka panjang global; dan sistem mutu adaptif masa depan. Sehingga, mutu menjadi alat ukur kontribusi terhadap keberlanjutan dunia.

Pada tahap ini, system tata Kelola bersifat internasional. Pendidikan tinggi NU tidak hanya mengembangkan manajemen Pendidikan tinggi yang hanya melayani kebutuhan nasional, tapi global. Sehingga, Institusi menjadi platform peradaban global.

Hal ini juga tercermin dalam jaringan. Pada fase ini, terbangun jaringan pendidikan global NU. Para akademisi NU berkolaborasi dengan think tank dan pusat inovasi dunia membentuk ekosistem riset digital global. Dari sini, lahir berbagai inisiatif kemanusiaan global. Dengan kata lain, fase ini Adalah fase di mana terbentuk jejaring peradaban dunia berbasis nilai Islam yang dimotori para akademisi NU.

SDM NU adalah kumpulan cendekiawan peradaban, inovator global, dan pemimpin lintas generasi dan lintas budaya. Intinya, SDM menjadi arsitek masa depan dunia. Pada tahap ini, lulusan Pendidikan Tinggi NU diharapkan menjadi agen perubahan global yang berkontribusi dalam membangun peradaban dunia yang berkelanjutan, beretika, dan berkeadaban.

Roadmap ini menunjukkan bahwa transformasi Pendidikan Tinggi NU bukan sekadar perubahan teknis, melainkan sebuah perjalanan peradaban. Dimulai dari penguatan fondasi internal, berkembang menuju daya saing nasional, mencapai kemandirian, memimpin secara etik di tingkat global, hingga akhirnya menjadi aktor utama dalam membangun ekosistem peradaban dunia.

Keseluruhan proses ini berakar kuat pada nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyah, sehingga modernisasi yang dilakukan tidak kehilangan jati diri, melainkan justru memperkuat peran NU sebagai penjaga tradisi sekaligus pelopor masa depan.

3. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Fase 1. Transformasi Jam'iyah (2026–2030): Pengarusutamaan Vokasi sebagai Agenda Strategis NU

Pada fase awal ini, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi NU ditempatkan sebagai agenda prioritas strategis jam'iyah, bukan

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi #1

2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050
Transformasi Jam'iyah	**Akselerasi Transformasi Jam'iyah**	**Kemandirian Jam'iyah**	**Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global**	**Ekosistem Peradaban**
Pengarus-utamaan pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai agenda prioritas NU	Percepatan terwujudnya peningkatan daya saing kerja, produktivitas kerja, keterampilan kerja dan profesionalitas kerja di kalangan warga NU serta meningkatnya jumlah warga NU yang bekerja di sektor formal.	Terwujudnya kondisi warga NU yang terampil, produktiv dan terserap di pasar kerja domestik dan global serta meningkatnya jumlah warga NU yang terampil dan produktiv dalam kewirausahaan	Lahirnya pemimpin dan manajer di perusahaan-perusahaan milik pemerintah maupun swasta dalam negeri atau swasta luar negeri	Ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi di NU menjadi rujukan bagi dunia
Outcome: • Terwujudnya agenda pengarus-utamaan pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai agenda prioritas NU • Tersedianya database pendidikan dan pelatihan vokasi di lingkungan NU yang lengkap & terdayagunakan	**Outcome:** • Naiknya jumlah warga NU yang bekerja di sektor formal • Naiknya jumlah warga NU profesional, terampil, dan berdaya saing	**Outcome:** • Naiknya jumlah warga NU yang bekerja di sektor formal baik di dalam negeri maupun di luar negeri • Naiknya jumlah warga NU yang menciptakan kewirausahaan atau usaha formal yang mampu menyerap tenaga kerja dari warga NU	**Outcome:** • Naiknya jumlah warga NU yang menjadi pemimpin dan manajer di perusahaan-perusahaan pemerintah, swasta dalam negeri dan swasta luar negeri	**Outcome:** • Naiknya jumlah warga NU yang menjadi penggerak, ahli, instruktur dan praktisi pendidikan dan pelatihan vokasi di tingkat lokal, nasional dan global
Strategi: 1. Mengembangkan perencanaan dan implementasi program pendidikan dan pelatihan vokasi yang integratif, koheren, berdampak dan berkelanjutan. 2. Pengembangan peta & profil lembaga pendidikan vokasi, lembaga pelatihan kerja (LPK) dan lembaga sertifikasi profesi (LSP) di lingkungan NU 3. Melaksanakan pemetaan sumber daya manusia dan angkatan kerja di lingkungan NU 4. Mendirikan lembaga pendidikan vokasi, LPK dan LSP berdasar potensi pasar kerja (STEM, ekonomi kreatif dan ekonomi perawatan) dan kewirausahaan	**Strategi:** 1. Perluasan akses pendidikan vokasi, pelatihan kerja, sertifikasi profesi, pemagangan dan penempatan baik di dalam negeri maupun luar negeri 2. Mengembangkan tenaga pendidik vokasi, instruktur pelatihan kerja dan asesor kompetensi profesi 3. Mengembangkan kurikulum pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang sesuai kebutuhan industri, konsumen dan potensi ekonomi 4. Mengembangkan teaching or training factory yang sesuai dengan perkembangan DUDIKA (Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja)	**Strategi:** 1. Penguatan kolaborasi di tingkat nasional dan internasional dalam pengembangan metode pengajaran, pelatihan, praktikum dan sertifikasi 2. Mengembangkan kolaborasi di tingkat nasional dan internasional dalam inkubasi kewirausahaan 3. Mengembangkan skema permodalan usaha dan akses pasar bagi kewirausahaan yang dijalankan oleh warga NU	**Strategi:** 1. Perluasan distribusi atau penempatan warga NU untuk posisi pimpinan dan manajer di berbagai institusi pemerintah dan swasta, baik di dalam negeri maupun luar negeri 2. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan kerja tingkat lanjut yang fokus pada soft-skills (leadership, managerial, problem solving, decision making etc.)	**Strategi:** 1. Mengembangkan ekosistem pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis organisasi keagamaan 2. Mengembangkan jejaring ahli, praktisi, pemangku kebijakan dan industri untuk menjadi penggerak pendidikan vokasi dan pelatihan kerja di tingkat lokal, nasional dan global

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi #2

2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050
Transformasi Jam'iyah	**Akselerasi Transformasi Jam'iyah**	**Kemandirian Jam'iyah**	**Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global**	**Ekosistem Peradaban**
5. Mengembangkan program akses pendidikan vokasi, pelatihan, sertifikasi, pemagangan dan penempatan 6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap program-kegiatan bidang pendidikan dan pelatihan vokasi di lingkungan NU 7. Mengembangkan pendekatan kolaborasi baik dengan pemerintah maupun swasta dalam agenda pendidikan dan pelatihan vokasi	5. Mengembangkan platfom digital pemagangan dan pasar kerja 6. Menyelenggarakan bursa kerja dan job-matching di berbagai wilayah 7. Melaksanakan survei pemetaan pasar kerja di domestik dan global 8. Melaksanakan pendampingan dan advokasi akses pendidikan vokasi, pelatihan kerja, sertifikasi pemagangan dan penempatan kerja 9. Mengembangkan kolaborasi dengan pemerintah dan korporasi swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk terciptanya SDM berdaya saing, produktiv, terampilan dan professional	4. Mengembangkan beasiswa pendidikan vokasi, pelatihan kerja, sertifikasi dan pemagangan kerja 5. Mengembangkan beasiswa bagi instruktur di dalam dan di luar negeri 6. Mengembangkan talent-scouting dan talent pipeline di kalangan NU untuk penempatan kerja di internal dan eksternal	3. Mengembangkan pasar lokal, domestik dan global atas produk hasil kewirausahaan berbasis halal value chain yang dijalankan oleh warga NU 4. Mengembangkan "best practices" tentang pendidikan vokasi dan pelatihan kerja serta menyebarkannya di tingkat nasional dan global	3. Mempromosikan pendekatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis organisasi keagamaan menjadi ekosistem peradaban dunia

lagi sebagai pelengkap dari pendidikan formal. Kesadaran kolektif dibangun bahwa kekuatan umat tidak hanya ditentukan oleh pendidikan akademik, tetapi juga oleh keterampilan kerja, produktivitas, dan kemandirian ekonomi.

Langkah pertama yang dilakukan adalah membangun arsitektur sistem vokasi yang terintegrasi, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Program pendidikan dan pelatihan vokasi dirancang secara sistemik, memastikan keterhubungan antara lembaga pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan dunia kerja.

Salah satu capaian penting pada fase ini adalah tersusunnya peta ekosistem vokasi NU, yang mencakup:

a. Identifikasi lembaga pelatihan kerja (LPK)
b. Lembaga sertifikasi profesi (LSP)
c. Potensi sektor unggulan berbasis wilayah
d. Profil kebutuhan tenaga kerja di lingkungan NU

Selain itu, dilakukan pemetaan sumber daya manusia dan angkatan kerja NU, sehingga intervensi program menjadi berbasis data, bukan asumsi. Institusi juga mulai mendirikan dan mengembangkan lembaga pendidikan vokasi; LPK berbasis kebutuhan pasar; dan LSP untuk standarisasi kompetensi.

Program akses diperluas melalui pelatihan, sertifikasi, magang, dan penempatan kerja. Pendampingan dan advokasi diberikan untuk memastikan kelompok rentan juga mendapatkan akses terhadap pendidikan vokasi.

Kolaborasi menjadi kunci utama. NU harus membangun kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha dan industry, pesantren, dan lembaga riset. Dengan demikian, pada akhir fase ini, terbentuk fondasi ekosistem vokasi NU yang terstruktur, berbasis data, dan inklusif.

Fase 2. Akselerasi Transformasi (2031–2035): Peningkatan Daya Saing dan Integrasi dengan Dunia Kerja

Memasuki fase akselerasi, fokus bergeser pada peningkatan daya saing tenaga kerja NU. Pendidikan vokasi tidak hanya

menghasilkan lulusan, tetapi tenaga kerja profesional yang siap bersaing di tingkat nasional dan global. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi diperluas secara signifikan melalui: sertifikasi profesi yang diakui industry; program pemagangan dalam dan luar negeri; dan penempatan kerja lintas wilayah.

Kurikulum vokasi mulai disesuaikan secara dinamis dengan kebutuhan industri (*demand-driven*), memastikan relevansi kompetensi yang dihasilkan. Model pembelajaran berbasis produksi seperti *teaching factory* dan *training factory* dikembangkan, sehingga peserta didik tidak hanya belajar, tetapi juga terlibat dalam proses produksi nyata.

Platform digital mulai digunakan untuk memastikan *job matching,* informasi pasar kerja, dan mobilitas tenaga kerja. Selain itu, dilakukan survei pasar kerja domestik dan global secara berkala untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan tenaga kerja.

Peran instruktur dan tenaga pendidik vokasi juga diperkuat melalui peningkatan kompetensi dan sertifikasi. Kolaborasi dengan industri semakin intensif untuk memastikan transfer pengetahuan dan teknologi.

Pada akhir fase ini, diharapkan terjadi peningkatan signifikan:

a. Jumlah tenaga kerja NU di sektor formal
b. Jumlah tenaga kerja profesional dan tersertifikasi
c. Daya saing tenaga kerja di tingkat nasional

Fase 3. Kemandirian Jam'iyah (2036–2040): Produktivitas, Kewirausahaan, dan Ekspansi Global

Fase ini menandai pergeseran dari sekadar penyerapan tenaga kerja menuju penciptaan lapangan kerja dan kemandirian ekonomi. Warga NU tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga wirausahawan, pencipta lapangan kerja, dan pelaku ekonomi produktif.

Kolaborasi nasional dan internasional diperkuat, khususnya dalam pengembangan metode pelatihan, sertifikasi kompetensi

global, dan inkubasi bisnis. Program inkubasi kewirausahaan menjadi pilar penting, didukung oleh skema pembiayaan usaha; akses pasar; dan pendampingan bisnis.

Beasiswa vokasi juga diperluas, baik untuk peserta didik maupun instruktur, termasuk kesempatan belajar di luar negeri. Sistem *talent scouting* dan *talent pipeline* mulai dikembangkan untuk mengidentifikasi talenta unggul; menempatkan tenaga kerja secara strategis; menghubungkan kebutuhan industri dengan potensi SDM NU.

Pada akhir fase ini, diharapkan akan terjadi:

a. Peningkatan jumlah wirausahawan NU
b. Bertambahnya usaha yang menyerap tenaga kerja
c. Keterlibatan tenaga kerja NU di pasar global

Fase 4. Kepemimpinan Etik (2041–2045): Transformasi Menuju Kepemimpinan dan Nilai Tambah Global

Pada fase ini, Pendidikan Vokasi NU tidak hanya menghasilkan pekerja atau pengusaha, tetapi pemimpin dan manajer profesional di berbagai sektor strategis. Warga NU mulai menempati posisi kepemimpinan di perusahaan pemerintah, korporasi swasta, dan institusi internasional.

Pengembangan pendidikan vokasi tingkat lanjut difokuskan pada *soft skills* (kepemimpinan, *problem solving*, pengambilan keputusan); *managerial and strategic thinking*; dan adaptasi terhadap kompleksitas global. Pada fase ini, produk-produk berbasis vokasi mulai menembus pasar global, dengan pendekatan: *halal value chain*, etika bisnis, dan keberlanjutan. Bersamaa dengan ini, distribusi tenaga kerja NU menjadi lebih luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Selain itu, praktik terbaik (*best practices*) dalam pendidikan vokasi NU mulai didokumentasikan, dikembangkan, dan disebarluaskan secara nasional dan global. Fase ini menempatkan NU sebagai aktor penting dalam ekonomi global berbasis nilai.

Pendekatan khas NU—yang mengintegrasikan nilai agama, etika, dan profesionalisme—menjadi model alternatif global dalam pendidikan vokasi.

Fase 5. Ekosistem Peradaban (2046–2050): Menjadi Rujukan Global Pendidikan Vokasi Berbasis Nilai

Fase puncak ini menandai lahirnya ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi NU sebagai rujukan dunia. Pendidikan vokasi NU berkembang menjadi sistem global yang terintegrasi secara kelembagaan, berbasis nilai keagamaan, dan responsif terhadap perubahan zaman

Ekosistem ini mencakup jaringan lembaga vokasi global; kolaborasi dengan industri internasional; dan platform pembelajaran dan pelatihan digital global.

Dari sini, NU diharapkan melahirkan ahli dan praktisi vokasi kelas dunia, instruktur dan *trainer* global, pembuat kebijakan dan pemimpin sektor vokasi.

Pendekatan khas NU—yang mengintegrasikan nilai agama, etika, dan profesionalisme—menjadi model alternatif global dalam pendidikan vokasi. Pada tahap ini, pendidikan vokasi NU tidak hanya berkontribusi pada ekonomi, tetapi juga pada pembangunan peradaban, keadilan sosial, dan keberlanjutan global. Dengan fondasi nilai Aswaja An-Nahdliyah, Pendidikan Vokasi NU berpotensi menjadi model global pendidikan berbasis keterampilan yang berakar pada etika, spiritualitas, dan kemanusiaan.[]

Dimensi IV

Pesantren dan Aswaja

1. Pesantren
2. Aswaja

1. Pesantren

Jika keseluruhan *roadmap* ini dilihat sebagai sebuah perjalanan peradaban, maka pesantren sesungguhnya adalah "ruang rahim" tempat seluruh proses ini bertumbuh, diuji, dan dimatangkan. Sejak fase awal, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi sebagai ekosistem yang menjaga kesinambungan tradisi sekaligus memungkinkan lahirnya pembaruan.

Pesantren

2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050
Transformasi Jam'iyah	**Akselerasi Transformasi Jam'iyah**	**Kemandirian Jam'iyah**	**Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global**	**Ekosistem Peradaban**
Penguatan fondasi kelembagaan melalui pembenahan tata kelola, kepengasuhan, kurikulum, serta integrasi antara tradisi keilmuan klasik dan kebutuhan modern.	**Percepatan kualitas dan ekspansi peran, di mana inovasi pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan mulai menjadi perhatian.**	**Pesantren mencapai kemandirian dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan pengelolaan. Tidak lagi bergantung pada bantuan eksternal secara dominan.**	**Pesantren menjadi rujukan kepemimpinan moral dan etika, baik di tingkat nasional maupun global.**	**Pesantren berperan sebagai penggerak utama peradaban, tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan.**
Outcome: • Standarisasi tata kelola pesantren • Kurikulum integratif (agama, sains, keterampilan hidup) • Digitalisasi administrasi dan pembelajaran awal • Kekerasan seksual dan bullying menurun. • Tersedianya database dan sistem akreditasi yang terintegrasi dan dapat diakses public • Tersusunnya skema pengembangan pesantren NU di wilayah 3T dan luar Jawa • Karya kader pesantren dan ulama NU mulai tersosialisasi secara luas .	**Outcome:** • Lulusan berdaya saing tinggi (religius dan profesional) • Ekosistem kewirausahaan pesantren • Kemitraan nasional yang luas • Di setiap provinsi terluar terdapat satu pesantren representatif besar di bawah naungan NU • Tersedianya pesantren lansia NU di kota-kota satelit • Berdirinya pesantren internasional. • Pesantren mulai berkembang sebagai sentra ekonomi agraris dan pemberdayaan Masyarakat • Terbangunnya fondasi integrasi koperasi pesantren dan koperasi NU menuju pembentukan bank NU · .	**Outcome:** • Kemandirian finansial pesantren • Sistem pendidikan mandiri dan berkelanjutan • Model pesantren sebagai pusat pemberdayaan Masyarakat • Terbentuknya Bank NU sebagai institusi keuangan berbasis ekosistem pesantren dan jamaah • Pesantren berkembang sebagai pusat produksi pangan dan distribusi ekonomi komunitas • Pesantren mulai memegang otoritas keilmuan dunia melalui karya dan publikasi internasional • Hubungan kelembagaan NU dan pesantren menjadi semakin integratif, saling menopang, dan berkelanjutan .	**Outcome:** • Lahirnya pemimpin berintegritas dan berpengaruh global • Pengakuan internasional terhadap model pesantren • Diplomasi pendidikan dan budaya berbasis pesantren • Pesantren modern dan tradisional NU secara bersama-sama menjadi role model pendidikan etik dalam skala nasional dan global • Ma'had 'Aly pesantren NU diakui sebagai institusi pengkaderan ulama yang berotoritas • Pesantren NU semakin identik dengan pengembangan ekonomi kerakyatan dan ekonomi sirkuler berbasis komunitas • Santri dan kader NU mulai menempati posisi-posisi strategis di tingkat nasional dan global • Integrasi kelembagaan pesantren dan NU semakin kuat sebagai fondasi kepemimpinan sosial-keagamaan masa depan .	**Outcome:** • Pesantren sebagai pusat inovasi peradaban • Kontribusi nyata dalam solusi global (lingkungan, kemanusiaan, teknologi) • Model peradaban berbasis nilai spiritual dan keberlanjutan • Tokoh-tokoh kharismatik NU mulai menduduki posisi strategis di organisasi Islam internasional • Pesantren modern maupun tradisional NU terintegrasi secara penuh dengan perkembangan teknologi dan sistem pendidikan global • Pesantren NU berkembang sebagai institusi pendidikan Islam global yang berdaya saing dan berpengaruh

Pesantren

2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050
Transformasi Jam'iyah	**Akselerasi Transformasi Jam'iyah**	**Kemandirian Jam'iyah**	**Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global**	**Ekosistem Peradaban**
Strategi: • Reformasi manajemen berbasis good governance • Pelatihan SDM (kiai, ustaz, tenaga kependidikan) • Penguatan infrastruktur digital dan jaringan kolaborasi • Pembangunan database pesantren terafiliasi NU yang terintegrasi dengan sistem akreditasi pesantren NU. • Perluasan sosialisasi SAKA Pesantren, hotline pengaduan, serta integrasi dengan LBH-NU dan mekanisme pendampingan korban . • Merancang pengembangan pesantren luar Jawa dan daerah 3T • Transformasi kurikulum pesantren dengan mulai memperkuat vokasi dan STEM. • Mengintegrasikan AI dalam pembelajarannya	**Strategi**: • Pengembangan inkubator bisnis pesantren • Integrasi teknologi (AI, e-learning, smart campus) • Kolaborasi dengan industri, pemerintah, dan akademisi • Pengembangan Pesantren Luar Jawa • Perintisan model pesantren masa depan melalui pengembangan pesantren lansia, pesantren internasional, dan model pendidikan berbasis kebutuhan masyarakat kontemporer • Transformasi pesantren sebagai sentra ekonomi berbasis agraris dan komunitas melalui pengembangan akuakultur, pertanian, perkebunan, dan industri turunan berbasis pesantren • Integrasi koperasi pesantren dan koperasi NU melalui penguatan jaringan distribusi, sistem keuangan bersama, dan konsolidasi ekonomi berbasis jamaah menuju didirikannya lembaga keuangan	**Strategi**: • Diversifikasi usaha dan wakaf produktif • Penguatan koperasi dan unit bisnis pesantren • Pengembangan program sosial berbasis kebutuhan umat • Integrasi ekonomi kelembagaan NU dan pesantren melalui pembentukan Bank NU berbasis konsolidasi koperasi pesantren dan koperasi struktural NU • Penguatan dana abadi pendidikan NU melalui pembangunan endowment fund terintegrasi bagi pesantren dan lembaga pendidikan yang masuk dalam ekosistem database dan akreditasi NU • Internasionalisasi karya ulama dan santri pesantren melalui penerbitan global, penguatan pusat penerjemahan, jurnal internasional, dan diplomasi intelektual pesantren • Penguatan integrasi ekosistem pesantren dan NU melalui standarisasi kelembagaan, jaringan ekonomi, kaderisasi, dan pertukaran sumber daya antar-lembaga	**Strategi**: • Internasionalisasi kurikulum dan jaringan • Program pertukaran santri dan ulama • Penguatan literasi global dan diplomasi • Penguatan pesantren modern NU sebagai model pendidikan kompetitif global melalui standarisasi mutu, jejaring internasional, dan integrasi teknologi serta pendidikan etik • Penguatan pesantren tradisional dan Ma'had 'Aly sebagai pusat kaderisasi ulama melalui pengakuan akademik, pengembangan riset, dan perluasan otoritas keilmuan pesantren • Perluasan ekosistem ekonomi sirkuler pesantren melalui integrasi produksi, distribusi, koperasi, lembaga keuangan, dan unit usaha berbasis komunitas • Akselerasi kaderisasi kepemimpinan santri di bidang pemerintahan, pendidikan, ekonomi, teknologi, media, dan diplomasi public • Penguatan integrasi pesantren dan struktur kelembagaan NU agar terbentuk simbiosis kelembagaan yang semakin solid dan berkelanjutan	**Strategi**: • Baik melalui Lembaga pendidikan tinggi formalnya maupun ma'had ali, pesantren mengembangkan pusat riset dan inovasi global • Kolaborasi lintas negara dan lintas disiplin • Integrasi nilai spiritual dengan sains dan teknologi mutakhir • Penguatan pengasuh pesantren NU dalam otoritas dan jejaring internasional melalui forum ulama dunia, lembaga riset global, dan organisasi Islam internasional • Modernisasi infrastruktur dan appliances pesantren melalui integrasi teknologi pendidikan, AI, smart campus, dan sistem pembelajaran digital • Integrasi tradisi pesantren dan perkembangan teknologi global tanpa kehilangan identitas turats, adab, dan manhaj Aswaja

Fase 1. Transformasi (2026–2030): Penguatan Fondasi Kelembagaan dan Integrasi Tradisi–Modernitas

Fase awal ini berfokus pada konsolidasi dan penguatan fondasi pesantren sebagai institusi pendidikan berbasis tradisi yang mampu menjawab kebutuhan zaman. Pesantren tidak lagi diposisikan semata sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi sebagai pusat pembentukan karakter, ilmu, dan keterampilan hidup.

Transformasi dimulai dari pembenahan tata kelola berbasis *good governance*, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme pengelolaan. Kepemimpinan pesantren diperkuat melalui pelatihan bagi kiai, ustaz, dan tenaga kependidikan agar mampu mengelola institusi secara modern tanpa kehilangan ruh tradisi.

Kurikulum pesantren mulai dikembangkan secara integratif, menggabungkan:

a. Ilmu keislaman klasik (*turats*)
b. Ilmu pengetahuan modern
c. Keterampilan hidup (*life skills*)

Digitalisasi menjadi langkah strategis, baik dalam administrasi maupun pembelajaran awal. Pesantren mulai membangun infrastruktur digital dan sistem data terintegrasi, termasuk database nasional pesantren NU yang terhubung dengan sistem akreditasi. Nilai dan karya ulama NU disosialisasikan secara luas sebagai fondasi ideologis dan intelektual.

Pada saat yang sama, perhatian terhadap lingkungan sosial pesantren diperkuat, termasuk upaya menekan kasus kekerasan dan menciptakan ruang belajar yang aman dan inklusif.

Ekspansi kelembagaan juga mulai dilakukan melalui:

a. Pengembangan pesantren di wilayah 3T dan luar Jawa
b. Perencanaan pendirian pesantren baru berbasis kebutuhan wilayah

Pada fase ini, ketika Aswaja sedang direposisi sebagai

manhaj berpikir, pesantren memikul peran krusial sebagai ruang internalisasi. Di dalamnya, transformasi tidak berlangsung melalui slogan atau dokumen semata, tetapi melalui praktik hidup sehari-hari: relasi antara kiai dan santri, tradisi pengajian kitab, serta pola pembentukan adab dan nalar. Di titik ini, pesantren menjadi tempat di mana Aswaja "ditubuhkan"—bukan hanya dipahami secara kognitif, tetapi dihidupi sebagai *habitus*.

Hasil utama fase ini adalah terbentuknya pesantren yang:

a. Tertata secara kelembagaan
b. Memiliki standar mutu dasar
c. Siap bertransformasi ke tahap berikutnya

Fase 2. Akselerasi Transformasi (2031–2035): Ekspansi Peran dan Integrasi Inovasi

Pada fase ini, pesantren mulai mengalami akselerasi kualitas dan ekspansi peran. Tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat inovasi, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.

Kurikulum dan sistem pembelajaran mulai mengadopsi teknologi seperti, *Artificial Intelligence* (AI), *E-learning*, *Smart campus*. Di samping itu, Pesantren juga mulai membangun inkubator bisnis sebagai sarana pengembangan kewirausahaan santri. Kolaborasi dengan industri, pemerintah, dan dunia akademik diperkuat untuk menciptakan ekosistem inovasi.

Di fase ini, pesantren mulai memainkan peran dalam pengembangan ekonomi berbasis komunitas, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan industri turunan berbasis lokal. Untuk memperkuat jaringan ekonomi pesantren, perlu adanya konsolidasi ekonomi kelembagaan melalui integrasi koperasi pesantren dengan koperasi NU, menuju pembentukan sistem keuangan berbasis jamaah, yang kelak menjadi embrio bank NU.

Ekspansi geografis menjadi fokus penting. Misalnya, pendirian pesantren di luar Jawa dan luar negeri. Pengembangan pesantren lansia dan pesantren internasional juga menjadi salah satu eksperimen penting di tahap ini.

Memasuki fase ini, pesantren mulai bergerak keluar dari dirinya sendiri. Ia tidak lagi cukup menjadi pusat reproduksi tradisi, tetapi harus menjadi produsen gagasan yang aktif berinteraksi dengan dunia luar. Di sinilah terjadi transformasi penting: santri tidak hanya dipersiapkan menjadi penjaga tradisi, tetapi juga menjadi agen kultural yang mampu membawa Aswaja ke ruang-ruang baru.

Alumni pesantren mulai hadir dalam berbagai sektor—media, akademik, kebijakan publik—dengan membawa cara pandang Aswaja yang lebih artikulatif. Tradisi Bahtsul Masail yang berakar di pesantren juga mengalami perluasan fungsi, dari forum internal menjadi model epistemologi yang dapat dikenalkan ke dunia global. Pesantren, dengan demikian, mulai berperan sebagai "laboratorium intelektual" yang tidak tertutup, tetapi terbuka dan dialogis.

Capaian fase ini antara lain:

a. Lulusan pesantren yang kompetitif (religius dan profesional)
b. Tumbuhnya ekosistem kewirausahaan pesantren
c. Terbangunnya jejaring pesantren nasional dan global awal

Fase 3. Kemandirian (2036–2040): Pesantren sebagai Institusi Mandiri dan Pusat Produksi Sosial-Ekonomi

Fase ini menandai kematangan pesantren sebagai institusi yang mandiri secara ekonomi, pendidikan, dan tata kelola. Ketergantungan pada bantuan eksternal berkurang secara signifikan. Di fase ini, pesantren mengembangkan usaha produktif berbasis wakaf; koperasi dan unit bisnis mandiri; dan sistem ekonomi komunitas. Integrasi kelembagaan dengan NU semakin kuat, termasuk melalui pembentukan bank NU berbasis konsolidasi ekonomi pesantren. Pesantren juga mulai menjadi pusat produksi pangan dan distribusi ekonomi komunitas, memperkuat perannya dalam ketahanan ekonomi masyarakat.

Dalam bidang pendidikan, pesantren memperkuat:

a. Program sosial berbasis kebutuhan umat

b. Sistem pembelajaran berkelanjutan
c. Produksi ilmu dan publikasi global

Karya-karya ulama Nusantara semakin massif diterbitkan untuk konsumen internasional. Diplomasi intelektual dan kolaborasi akademik internasional menandai perkembangan pesantren di fase ini. Ini menjadi Langkah awal untuk memasuki fase berikutnya yang membawa pesantren dalam kancah internasional.

Pada fase kemandirian ini, pesantren memasuki tahap di mana ia harus berdiri sebagai institusi yang memiliki daya tawar global. Ini menuntut transformasi yang lebih struktural. Pesantren tidak cukup hanya kuat dalam tradisi, tetapi juga harus mampu membangun sistem pengetahuan yang dapat dikomunikasikan secara internasional. Di sinilah muncul kebutuhan untuk mengembangkan pusat-pusat studi berbasis pesantren yang memiliki standar akademik global tanpa kehilangan ruh tradisionalnya.

Bahasa menjadi jembatan penting, sehingga santri dan kader pesantren dituntut untuk mampu menavigasi berbagai konteks budaya dan intelektual. Pesantren mulai berfungsi sebagai simpul yang menghubungkan lokalitas dengan globalitas, tradisi dengan modernitas, serta teks dengan konteks.

Capaian utama fase ini adalah:

a. Pesantren mandiri secara finansial
b. Menjadi pusat pemberdayaan Masyarakat
c. Terintegrasi kuat dalam ekosistem NU

Fase 4. Kepemimpinan Etik (2041–2045): Pesantren sebagai Rujukan Moral dan Intelektual Global

Pada fase ini, pesantren NU mencapai posisi strategis sebagai rujukan kepemimpinan moral dan etika, baik di tingkat nasional maupun global. Pesantren menjadi pusat Pengembangan Islam moderat; dialog antarperadaban; dan diplomasi budaya dan Pendidikan.

Kurikulum dan jaringan pesantren diinternasionalisasikan. Program pertukaran santri dan ulama diperluas. Hal ini bertujuan untuk memperkuat posisi pesantren dalam percaturan global.

Pada fase ini, pesantren modern dan tradisional diintegrasikan secara harmonis. Modernisasi pesantren tidak boleh membuat pesantren kehilangan otoritas keilmuan tradisionalnya. Bersamaan dengan ini, Ma'had Aly diperkuat sebagai pusat kaderisasi ulama.

Di bidang ekonomi, pesantren tetap harus memainkan peran pengembangan ekonomi kerakyatan. Pesantren bisa menjadi sumbu dari sistem ekonomi sirkular berbasis komunitas.

Ketika memasuki fase ini, peran pesantren mengalami perluasan yang lebih mendalam. Ia tidak lagi hanya menjadi pusat pendidikan atau produksi ilmu, tetapi menjadi sumber nilai yang membimbing masyarakat luas. Dalam dunia yang semakin kompleks dan sering kali kehilangan arah moral, pesantren hadir sebagai rujukan etis yang hidup.

Nilai-nilai Aswaja yang dikembangkan di dalamnya—seperti *tawassuth* (moderasi), *tawazun* (keseimbangan), dan *tasamuh* (toleransi)—tidak lagi berhenti sebagai konsep, tetapi diterjemahkan dalam praktik sosial yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat modern. Pesantren mulai membangun jejaring lintas negara, membentuk *fellowship* global yang memungkinkan pertukaran gagasan dan pengalaman. Dengan cara ini, pesantren tidak hanya memengaruhi komunitas di sekitarnya, tetapi juga ikut membentuk percakapan global tentang agama, kemanusiaan, dan peradaban.

Fase ini menghasilkan santri dan kader NU yang menempati posisi strategis di tingkat nasional dan global, baik dalam bidang politik, ekonomi, akademik,dan dipolomasi. Fase ini juga menghasilkan sumber daya manusia berlatar belakang pesantren sebagai pemimpin global berintegritas. Pesantren memiliki pengaruh luas dalam kebijakan nasional dan peradaban global.

Fase 5. Ekosistem Peradaban (2046–2050): Pesantren sebagai Pusat Peradaban Global

Fase puncak ini menempatkan pesantren sebagai penggerak utama peradaban global, melampaui fungsi pendidikan keagamaan. Pesantren menjadi pusat inovasi global; Solusi problem kemanusiaan; model integrasi spiritualitas, ilmu, dan teknologi.

Fase ini adalah fase ketika pesantren bertransformasi menjadi bagian dari ekosistem peradaban global. Di tahap ini, pesantren tidak lagi dipandang sebagai institusi lokal khas Indonesia, tetapi sebagai model pendidikan dan pembentukan manusia yang memiliki relevansi universal. Santri tidak hanya berasal dari Nusantara, tetapi juga dari berbagai belahan dunia, datang untuk mempelajari suatu cara hidup dan cara berpikir yang khas.

Pesantren menjadi ruang perjumpaan lintas budaya, di mana nilai-nilai Aswaja berinteraksi dengan berbagai tradisi global. Lebih dari itu, pesantren menjadi aktor dalam diplomasi peradaban, memperkenalkan pendekatan Islam yang damai, inklusif, dan berakar kuat pada tradisi sekaligus terbuka terhadap perubahan.

Dalam keseluruhan proses ini, pesantren tidak pernah kehilangan identitas dasarnya. Justru kekuatannya terletak pada kemampuannya untuk tetap berakar sambil terus bertumbuh. Ia menjaga sanad keilmuan, mempertahankan kedalaman spiritual, sekaligus membuka diri terhadap dunia yang terus berubah. Dengan demikian, pesantren bukan sekadar bagian dari roadmap ini, tetapi merupakan poros utama yang memastikan bahwa transformasi Aswaja tidak kehilangan arah, tidak tercerabut dari akar, dan pada saat yang sama mampu menjangkau cakrawala peradaban yang lebih luas.

Ekosistem pesantren terhubung secara global melalui kolaborasi lintas negara; jaringan riset internasional; integrasi dengan sistem pendidikan global. Nilai-nilai Aswaja menjadi

kontribusi utama NU dalam membangun peradaban dunia yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis etika. Pesantren juga melahirkan tokoh-tokoh global yang berpengaruh di berbagai sektor strategis internasional.

Hasil akhir fase ini Adalah pesantren menjadi rujukan global; kontributor penting dalam membangun peradaban dunia; dan model pendidikannya diadopsi secara internasional.

2. Aswaja

Roadmap Sub-Dimensi Aswaja ini pada dasarnya menggambarkan sebuah perjalanan panjang—bukan hanya perjalanan organisasi, tetapi perjalanan intelektual, kultural, dan bahkan peradaban. Ia dimulai dari upaya membenahi cara pandang internal, lalu bergerak keluar menjadi kekuatan sosial, hingga pada akhirnya membayangkan lahirnya sebuah sistem nilai global yang berakar dari tradisi Aswaja An-Nahdliyah.

Fase 1. Transformasi (2026–2030): Reposisi Aswaja An-Nahdliyah

Pada fase pertama ini, titik tekannya adalah transformasi paling mendasar: bagaimana Aswaja dipahami. Selama ini, Aswaja sering kali berhenti sebagai identitas—sesuatu yang dimiliki, bukan sesuatu yang dihidupi. Karena itu, fase ini berusaha menggeser paradigma tersebut dengan menjadikan Aswaja sebagai *manhaj* berpikir. Artinya, Aswaja harus hadir dalam cara seseorang membaca realitas, mengambil keputusan, dan merespons perubahan zaman.

Di sini, kerja-kerja konseptual menjadi sangat penting. Perlu merumuskan ulang Aswaja agar lebih komunikatif, lebih mudah diakses generasi muda, dan mampu hidup di ruang digital. Pada saat yang sama, institusi-institusi seperti Bahtsul Masail diposisikan ulang, bukan sekadar forum diskusi hukum, tetapi sebagai pusat produksi pengetahuan yang strategis. Dengan demikian, fase ini sebenarnya adalah fase peletakan fondasi—fondasi epistemologis yang akan menentukan arah perjalanan berikutnya.

Aswaja

2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050
Transformasi Jam'iyah	**Akselerasi Transformasi Jam'iyah**	**Kemandirian Jam'iyah**	**Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global**	**Ekosistem Peradaban**
Mengarusutamakan pemahaman Aswaja Nahdliyah sebagai manhaj berpikir, bukan semata-mata identitas organisasi.	**Percepatan dan perluasan kesadaran Aswaja An-Nahdliyyah sebagai manhaj al-fikr dengan berfokus pada penguatan Nahdliyin-cultural Nahdliyin dengan konsolidasi *core-engaged Nahdliyin*.**	**Mantapnya kelembagaan pusat-pusat studi Aswaja NU di dunia internasional.**	**Nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyyah menjadi *reference values* bagi masyarakat menengah-kota yang kian bertumbuh**	**Aswaja menjadi manhaj berpikir dalam menyelesaikan masalah-masalah peradaban kemanusiaan universal.**
Outcome: • Tersedianya manual Aswaja Nahdliyah yang mudah diterima • Aswaja Nahdliyah menguasai ruang-ruang digital • Aswaja Nahdliyah "baru" terstandarisasi di lingkungan pendidikan NU • LBM, dengan Aswaja Nahdliyah, menjadi pusat kajian	**Outcome:** • Jumlah Nahdliyin-cultural Nahdliyin yang bertransformasi menjadi engaged Nahdliyin meningkat • Lembaga Bahtsul Masail sebagai pusat studi Aswaja internasional mengenalkan tradisi bahtsul masail khas NU kepada dunia melalui pendekatan intra-mazhab	**Outcome:** • Meminimalisir menurunnya cultural Nahdliyin • Dunia internasional memahami Islam melalui Aswaja ala NU dengan terbentuknya kader yang mampu mengatasi language barrier	**Outcome:** • Aswaja menjadi ekosistem ideologis yang tak hanya identik dengan dogma, tapi menjadi komunitas yang menyediakan kebutuhan masyarakat *technology-driven.* • Aswaja yang dikembangkan NU menjadi perekat antar-sekte di dunia internasional.	**Outcome:** • Jaringan pesantren NU (yang lokal maupun internasional) menjadi tujuan pelajar internasional untuk mempelajari Aswaja • *Cultural-Nahdliyin* diisi oleh masyarakat kelas menengah
Strategi: • Membuat rumusan Aswaja Nahdliyah dengan kemasan baru yang lebih menarik, mudah dipahami, dan diterima sesuai dengan basis demografi warga N • Mengarusutamakan Aswaja Nahdliyah "baru" yang telah dirumuskan sebagai manhaj berpikir - selain juga sebagai identitas organisasi • Menguatkan lembaga bahtsul masail sebagai pusat studi Aswaja Nahdliyah tingkat internasional	**Strategi:** • Sosialisasi dan penguatan Aswaja di lingkungan Nahdliyin-cultural Nahdliyin • Pusat studi Aswaja Nahdliyah yang telah dibentuk sebelumnya mengkader lulusan pesantren untuk menjadi agen Aswaja Nahdliyah	**Strategi:** • Mentransformasikan Aswaja sebagai doktrin *grassroot* dan kompatibel dengan masyarakat perkotaan yang berubah di tahun-tahun ini • Meningkatkan kemampuan bilingual di kalangan kader Aswaja	**Strategi:** • Menggerakkan Aswaja Nahdliyin dari manhaj berpikir menjadi *driving system* yang menyediakan kebutuhan masyarakat kelas menengah seperti: kesehatan mental, keamanan, dan keterjaminan. • Membangun Aswaja fellowship antar pesantren internasional yang telah dikembangkan NU (lihat: Dimensi Pesantren).	**Strategi:** • Menjadikan pesantren internasional NU yang sudah didirikan (lihat dimensi pesantren) sebagai pusat Aswaja • Mendakwahkan Aswaja kepada masyarakat internasional yang memiliki peradaban berbeda (western civilization).

Jadi, pada fase awal ini, fokus utama adalah reposisi Aswaja An-Nahdliyah—dari sekadar identitas organisasi menjadi *manhaj* berpikir (*method of thinking*) yang hidup dan relevan. Transformasi ini adalah fase fundamental, karena menyentuh dua hal: cara berpikir warga Nahdliyin dan cara menyampaikan ajaran, atau cara Aswaja hadir di ruang publik, terutama ruang digital.

Aswaja tidak lagi dipahami secara simbolik atau normatif semata, tetapi diinternalisasi sebagai kerangka epistemologis dalam memahami realitas, baik keagamaan maupun sosial. Ini berarti Aswaja harus mampu menjawab tantangan zaman, termasuk dinamika digital, perubahan sosial, dan kompleksitas kehidupan modern.

Hasil yang diharapkan Adalah:

a. Tersusunnya manual Aswaja yang lebih komunikatif dan mudah dipahami lintas generasi.
b. Aswaja mulai menguasai ruang digital, bukan sekadar hadir
c. Lahirnya formulasi "Aswaja baru" yang kontekstual tanpa kehilangan akar tradisi
d. LBM (Lajnah Bahtsul Masail) menjadi pusat kajian strategis Aswaja

Fase 2. Akselerasi Transformasi (2031–2035): *Cultural-Intellectual Movement*

Setelah fondasi terbentuk, fase berikutnya adalah percepatan dan perluasan dampak. Fokusnya bergeser dari internalisasi menuju ekspansi kesadaran dan pengaruh. Aswaja mulai bergerak sebagai kekuatan cultural-intellectual movement, bukan hanya struktur organisasi.

Ini adalah fase penguatan identitas kolektif Nahdliyin sebagai agen budaya dan pemikiran. Pada fase ini diharapkan terjadi transformasi dari: "anggota organisasi" menuju *cultural actor*; dari "pengikut tradisi" menuju produsen gagasan. Energi yang sebelumnya difokuskan ke dalam mulai diarahkan ke luar. Jika pada fase pertama Aswaja sedang "dibangun ulang", maka

pada fase ini ia mulai "digerakkan". Akselerasi terjadi dalam bentuk perluasan kesadaran dan keterlibatan. Nahdliyin tidak lagi hanya menjadi bagian dari struktur organisasi, tetapi tumbuh sebagai aktor kultural dan intelektual. Aswaja menjadi hidup dalam praktik sosial, dalam produksi gagasan, dan dalam interaksi dengan dunia yang lebih luas.

Tradisi Bahtsul Masail, misalnya, tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diperkenalkan ke dunia sebagai model ijtihad kolektif yang khas. Di sini mulai tampak pergeseran penting: dari tradisi yang bersifat lokal menuju tradisi yang memiliki potensi universal. Fase ini memperlihatkan bagaimana konsolidasi internal yang kuat dapat menjadi basis bagi ekspansi yang lebih luas.

Hasil yang diharapkan adalah:

a. Meningkatnya jumlah Nahdliyin yang *engaged* secara kultural dan intelektual
b. Lembaga Bahtsul Masail berkembang menjadi pusat studi internasional
c. Tradisi Bahtsul Masail dikenal dunia sebagai model ijtihad kolektif khas NU

Fase 3. Kemandirian Jam'iyah (2036–2040): Penguatan Posisi Global dan Ketangguhan Epistemik

Pada fase ini, Aswaja memasuki tahap kematangan institusional. Fokusnya adalah membangun ketangguhan global, terutama dalam bidang keilmuan. Ketangguhan di sini berarti bahwa Aswaja sanggup membangun narasinya sendiri, tanpa harus terjebak menjadi wacana keislaman yang jumud dan tertutup. Ketangguhan di sini berarti bahwa Aswaja memiliki otoritas yang memadai dalam produksi ilmu. Sehingga, mampu berkompetisi di tingkat global.

Dengan ini, Aswaja tidak hanya berkembang di Indonesia dan hanya menjadi wacana lokal. Akan tetapi, diakui secara internasional sebagai pendekatan keislaman yang otoritatif.

Fase ini menandai tahap kematangan yang lebih jauh. Setelah mengalami akselerasi, muncul kebutuhan untuk berdiri secara

mandiri di tingkat global. Kemandirian yang dimaksud bukan hanya organisatoris, tetapi terutama epistemik—kemampuan untuk memproduksi pengetahuan, menetapkan standar, dan berbicara dengan otoritas di panggung internasional.

Pada titik ini, Aswaja mulai diproyeksikan sebagai pendekatan keislaman yang tidak hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat global. Tantangan yang muncul tidak lagi sederhana: perbedaan bahasa, budaya, dan konteks sosial harus diatasi.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas kader menjadi sangat penting, termasuk kemampuan lintas bahasa dan lintas budaya. Aswaja juga mulai dikontekstualisasikan dalam masyarakat urban global yang kompleks, sehingga ia tidak terjebak dalam romantisme tradisi, tetapi benar-benar hadir sebagai solusi yang hidup.

Hasil yang diharapkan Adalah:

a. Terbangunnya pusat studi Aswaja internasional
b. Berkurangnya kemunduran *cultural* Nahdliyin
c. Dunia internasional mulai memahami Islam Aswaja ala NU
d. Lahirnya kader global yang mampu mengatasi *barrier* bahasa dan budaya

Fase 4. Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global (2041–2045): Dari Pengaruh ke Kepemimpinan Global Berbasis Nilai.

Fase ini menandai lompatan penting: dari sekadar pengaruh intelektual menuju kepemimpinan moral dan etik. Aswaja tidak lagi hanya menjelaskan realitas, tetapi mengarahkan peradaban. Aswaja menjadi sumber nilai bagi masyarakat luas; panduan dalam menghadapi krisis modern; dan basis bagi sistem sosial yang berkeadaban. Nilai-nilai Aswaja digunakan untuk menjawab isu-isu kemanusiaan: kesehatan mental, keamanan sosial, hingga keterasingan manusia modern.

Jadi, fase ini menandai lompatan yang lebih signifikan: dari kemandirian menuju kepemimpinan etik. Pada tahap ini,

Aswaja tidak lagi hanya berperan sebagai sistem pemahaman atau pendekatan keilmuan, tetapi mulai menjadi sumber nilai yang memandu kehidupan masyarakat luas. Dunia modern yang ditandai oleh krisis makna, keterasingan, dan disrupsi sosial membutuhkan rujukan nilai yang stabil dan humanis. Di sinilah Aswaja diposisikan sebagai penyedia "*reference values*".

Aswaja tidak hanya menjelaskan apa yang benar, tetapi juga menghadirkan kerangka hidup yang menjawab kebutuhan nyata manusia modern—baik dalam aspek psikologis, sosial, maupun spiritual. Lebih jauh lagi, Aswaja mulai berfungsi sebagai perekat, menjembatani perbedaan antar kelompok, bahkan antar peradaban. Peran ini menandai transformasi dari sekadar pengaruh intelektual menjadi kepemimpinan moral.

Hasil yang diharapkan adalah:

a. Aswaja menjadi ekosistem ideologis yang hidup dan aplikatif
b. Muncul komunitas berbasis nilai Aswaja yang menjawab kebutuhan modern
c. Aswaja menjadi perekat antar-sekte dan lintas budaya global

Fase 5. Ekosistem Peradaban (2046–2050): Aswaja sebagai *Enabler Factor* Peradaban Dunia

Ini adalah fase puncak, di mana Aswaja tidak lagi sekadar gerakan atau sistem nilai, tetapi telah menjadi ekosistem peradaban global. Aswaja menjadi cara berpikir universal; kerangka penyelesaian masalah kemanusiaan; dan sistem nilai lintas bangsa dan budaya. Dengan kata lain, Aswaja bertransformasi dari wacana local Indonesia menuju wacana global; bergerak dari komunitas ke peradaban.

Fase ini merupakan kulminasi dari seluruh proses ini. Pada tahap ini, Aswaja dibayangkan telah berkembang menjadi sebuah ekosistem peradaban. Ia tidak lagi terbatas pada komunitas tertentu atau wilayah geografis tertentu, tetapi menjadi cara berpikir yang diadopsi secara lebih luas dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan.

Pesantren, yang sejak awal menjadi basis tradisi ini, mengalami transformasi menjadi pusat pembelajaran internasional. Orang-orang dari berbagai negara datang bukan hanya untuk belajar agama, tetapi untuk memahami suatu cara pandang terhadap dunia—cara pandang yang menggabungkan tradisi, rasionalitas, dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, Aswaja tidak sekadar bertahan, tetapi berkontribusi aktif dalam membentuk arah peradaban global.

Hasil yang diharapkan adalah:

a. Pesantren NU menjadi pusat pembelajaran internasional
b. Pelajar global datang untuk belajar Aswaja
c. Cultural Nahdliyin diisi oleh kelas menengah global
d. Aswaja menjadi referensi dalam menyelesaikan krisis peradaban manusia

Jika dilihat sebagai satu kesatuan, keseluruhan roadmap ini menunjukkan sebuah alur yang sangat sistematis: dimulai dari pembenahan cara berpikir, dilanjutkan dengan penguatan dan ekspansi, kemudian mencapai kemandirian, berkembang menjadi kepemimpinan, dan pada akhirnya menjelma sebagai peradaban. Ini bukan sekadar rencana strategis, tetapi sebuah visi besar tentang bagaimana sebuah tradisi keagamaan dapat bertransformasi menjadi kekuatan global tanpa kehilangan akar autentiknya.[]

Dimensi V

Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan

1. Lingkungan Hidup
2. Energi Berkelanjutan

Isu lingkungan hidup telah berkembang dari sekadar persoalan konservasi alam menjadi salah satu tantangan peradaban terbesar abad ke-21. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, pencemaran, hilangnya keanekaragaman hayati, krisis air bersih, bencana ekologis, dan transisi energi merupakan persoalan yang secara langsung memengaruhi kehidupan manusia, terutama kelompok masyarakat yang paling rentan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang besar, keberhasilan pembangunan di masa depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk mengambil peran aktif dalam agenda pelestarian lingkungan hidup. Ajaran Islam yang menempatkan manusia sebagai *khalifah fil ardh* (pemakmur bumi) memberikan landasan teologis yang kuat bagi keterlibatan NU dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam perspektif Ahlussunnah wal Jama'ah, menjaga lingkungan bukan hanya persoalan teknis, melainkan bagian dari ibadah sosial dan tanggung jawab kemanusiaan.

NU memiliki modal sosial yang sangat besar untuk mendorong transformasi ekologis. Jaringan pesantren, masjid, lembaga pendidikan, organisasi otonom, komunitas warga, serta basis sosial yang tersebar hingga tingkat desa merupakan infrastruktur sosial yang dapat menjadi penggerak utama perubahan perilaku dan pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang mengintegrasikan nilai keislaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat, NU berpotensi menjadi pelopor gerakan lingkungan hidup berbasis komunitas terbesar di Indonesia.

Roadmap NU 2026–2050 Dimensi Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan ini disusun untuk menjawab tantangan tersebut melalui dua subdimensi utama, yaitu Lingkungan Hidup dan Energi Berkelanjutan. Kedua subdimensi ini dirancang untuk berkembang secara bertahap melalui lima fase transformasi organisasi: Transformasi Jam'iyah (2026–2030), Akselerasi Transformasi Jam'iyah (2031–2035), Kemandirian Jam'iyah (2036–2040), Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global (2041–2045), dan Ekosistem Peradaban (2046–2050).

Melalui roadmap ini, NU tidak hanya diharapkan mampu membangun gerakan lingkungan yang kuat di tingkat akar rumput, tetapi juga menjadi rujukan nasional dan global dalam pengembangan peradaban ekologis yang berlandaskan nilai Islam rahmatan lil 'alamin.

Lingkungan Hidup

2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050
Transformasi Jam'iyah	**Akselerasi Transformasi Jam'iyah**	**Kemandirian Jam'iyah**	**Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global**	**Ekosistem Peradaban**
Terbangunnya kesadaran ekologis sebagai bagian dari nilai keislaman dan gerakan sosial Nahdlatul Ulama. Isu lingkungan mulai terintegrasi dalam pendidikan, dakwah, dan praktik kehidupan warga Nahdliyin di tingkat akar rumput.	**Gerakan lingkungan NU berkembang dari inisiatif lokal menjadi gerakan nasional yang terkoordinasi, berbasis inovasi, teknologi, dan kolaborasi multipihak.**	**Terwujudnya kemandirian pengelolaan lingkungan melalui kelembagaan yang kuat, pembiayaan berkelanjutan, dan pengembangan ekonomi hijau berbasis komunitas.**	**NU menjadi rujukan nasional dan aktor global dalam pengembangan etika ekologis, keadilan iklim, dan pembangunan berkelanjutan berbasis nilai Islam rahmatan lil 'alamin.**	**NU berkontribusi dalam membangun peradaban ekologis yang mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan nilai-nilai Islam sebagai warisan peradaban dunia.**
Outcome: • Terbentuknya jaringan komunitas peduli lingkungan berbasis NU di berbagai daerah. • Meningkatnya partisipasi warga dalam pengelolaan sampah, penghijauan, dan konservasi sumber daya alam. • Tersedianya sistem data dan pemetaan isu lingkungan di lingkungan NU.	**Outcome:** • Terbentuknya ekosistem ekonomi sirkular dan pengelolaan limbah berbasis komunitas NU. • Sistem mitigasi dan respons bencana berbasis data berjalan di berbagai wilayah. • Meningkatnya kapasitas kelembagaan lingkungan di seluruh tingkatan organisasi.	**Outcome:** • Kemandirian pendanaan program lingkungan di berbagai tingkat organisasi. • Berkembangnya unit usaha hijau dan koperasi lingkungan NU. • Terbangunnya sistem adaptasi perubahan iklim dan ketahanan komunitas yang mapan.	**Outcome:** • Prinsip-prinsip etika lingkungan NU menjadi referensi kebijakan publik nasional. • Meningkatnya pengaruh NU dalam forum lingkungan dan iklim global. • Indonesia dikenal sebagai model gerakan ekologi berbasis agama.	**Outcome:** • Pengakuan internasional terhadap model peradaban ekologis NU. • Kontribusi nyata NU dalam agenda global perubahan iklim dan keberlanjutan. • Lahirnya generasi pemimpin, pemikir, dan institusi ekologis berkelas dunia dari lingkungan NU.
Strategi: • Integrasi fikih lingkungan dan eco-theology dalam pendidikan dan dakwah NU. • Pengembangan program bank sampah, penghijauan, dan konservasi berbasis komunitas. • Pembangunan sistem data dan dashboard lingkungan NU. • Kemitraan dengan pemerintah, NGO, akademisi, dan sektor swasta.	**Strategi:** • Replikasi program unggulan lingkungan ke seluruh wilayah NU. • Pemanfaatan AI, GIS, IoT, dan big data untuk monitoring lingkungan. • Penguatan pembiayaan hijau melalui wakaf produktif dan green financing. • Kolaborasi riset dan inovasi dengan perguruan tinggi serta industri hijau.	**Strategi:** • Pengembangan usaha hijau berbasis pesantren dan komunitas. • Diversifikasi pendanaan melalui zakat, wakaf, CSR, dan investasi hijau. • Standarisasi, sertifikasi, dan audit lingkungan bagi lembaga NU. • Penguatan program adaptasi iklim dan ketahanan bencana.	**Strategi:** • Advokasi kebijakan lingkungan dan keadilan iklim. • Penguatan diplomasi lingkungan dan kemanusiaan global. • Pembentukan pusat kajian etika ekologis dan keberlanjutan. • Pengembangan jejaring internasional dengan lembaga lingkungan dunia.	**Strategi:** • Membangun pusat peradaban dan studi ekologi Islam bertaraf global. • Mendorong diplomasi pengetahuan dan pertukaran praktik terbaik antarnegara. • Mengembangkan jaringan pendidikan, riset, dan inovasi lingkungan internasional. • Menyiapkan kader pemimpin peradaban ekologis masa depan.

1. Lingkungan Hidup

Pelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu tantangan utama yang akan menentukan kualitas kehidupan generasi mendatang. Berbagai persoalan seperti deforestasi, pencemaran sungai, krisis pengelolaan sampah, penurunan kualitas udara, kerusakan ekosistem pesisir, dan meningkatnya frekuensi bencana akibat perubahan iklim menunjukkan bahwa pembangunan tidak lagi dapat dilakukan dengan mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.

Bagi NU, isu lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari agenda keagamaan dan kemanusiaan. Kerusakan lingkungan pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya kemiskinan, menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, berkurangnya ketahanan pangan, serta meningkatnya kerentanan kelompok rentan. Oleh karena itu, pembangunan kesadaran ekologis harus menjadi bagian integral dari gerakan sosial-keagamaan NU.

Pada fase Transformasi Jam'iyah (2026–2030), fokus utama diarahkan pada pembangunan kesadaran ekologis di seluruh lingkungan organisasi. Roadmap menargetkan terbangunnya kesadaran ekologis sebagai bagian dari nilai keislaman dan gerakan sosial Nahdlatul Ulama. Isu lingkungan mulai diintegrasikan ke dalam pendidikan, dakwah, serta praktik kehidupan sehari-hari warga Nahdliyin.

Pada tahap ini, outcome yang diharapkan meliputi terbentuknya jaringan komunitas peduli lingkungan berbasis NU di berbagai daerah, meningkatnya partisipasi warga dalam pengelolaan sampah, penghijauan dan konservasi sumber daya alam, serta tersedianya sistem data dan pemetaan isu lingkungan di lingkungan organisasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai strategi dikembangkan. Integrasi fikih lingkungan dan ekoteologi dalam pendidikan serta dakwah NU menjadi langkah awal yang penting untuk membangun landasan nilai. Selain itu, pengembangan program bank sampah, penghijauan, dan konservasi berbasis

komunitas akan menjadi instrumen konkret yang mendekatkan isu lingkungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pada saat yang sama, pembangunan sistem data dan dashboard lingkungan NU akan membantu organisasi memahami kondisi ekologis secara lebih akurat. Kemitraan dengan pemerintah, lembaga riset, perguruan tinggi, NGO, dan sektor swasta juga menjadi fondasi penting bagi penguatan kapasitas kelembagaan.

Memasuki fase Akselerasi Transformasi Jam'iyah (2031–2035), gerakan lingkungan NU berkembang dari berbagai inisiatif lokal menjadi gerakan nasional yang terkoordinasi. Pada fase ini, fokus tidak lagi sekadar pada peningkatan kesadaran, tetapi juga pada pengembangan sistem dan inovasi yang dapat menghasilkan dampak yang lebih luas.

Outcome yang ditargetkan mencakup terbentuknya ekosistem ekonomi sirkular dan pengelolaan limbah berbasis komunitas NU, berjalannya sistem mitigasi dan respons bencana berbasis data di berbagai wilayah, serta meningkatnya kapasitas kelembagaan lingkungan pada seluruh tingkatan organisasi.

Perkembangan teknologi menjadi faktor penting dalam fase ini. Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), Geographic Information System (GIS), Internet of Things (IoT), dan big data memungkinkan pengelolaan lingkungan dilakukan secara lebih efektif dan berbasis bukti. Replikasi berbagai program unggulan lingkungan ke seluruh wilayah NU juga dilakukan secara sistematis. Di sisi lain, penguatan pembiayaan hijau melalui wakaf produktif dan instrumen green financing menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program-program lingkungan.

Pada fase Kemandirian Jam'iyah (2036–2040), NU ditargetkan mencapai tingkat kematangan kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Gerakan lingkungan tidak lagi bergantung pada dukungan eksternal, melainkan telah memiliki sumber daya, sistem pendanaan, dan mekanisme tata kelola yang berkelanjutan.

Outcome utama pada fase ini adalah terwujudnya kemandirian pendanaan program lingkungan, berkembangnya unit usaha hijau dan koperasi lingkungan NU, serta terbentuknya sistem adaptasi perubahan iklim dan ketahanan komunitas yang mapan.

Untuk mencapai target tersebut, pengembangan usaha hijau berbasis pesantren dan komunitas menjadi salah satu strategi utama. Selain menciptakan manfaat ekonomi, model ini juga membantu mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan. Diversifikasi sumber pendanaan melalui zakat, wakaf, CSR, dan investasi hijau juga dilakukan untuk memperkuat keberlanjutan program. Di sisi lain, standardisasi, sertifikasi, dan audit lingkungan bagi lembaga-lembaga NU menjadi instrumen penting dalam membangun tata kelola yang kredibel.

Memasuki fase Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global (2041–2045), NU diharapkan menjadi rujukan nasional dan aktor global dalam pengembangan etika ekologis, keadilan iklim, dan pembangunan berkelanjutan berbasis nilai Islam rahmatan lil ‘alamin.

Pada fase ini, prinsip-prinsip etika lingkungan yang dikembangkan NU ditargetkan menjadi referensi dalam kebijakan publik nasional. Pengaruh NU dalam forum lingkungan dan iklim global juga semakin meningkat, sementara Indonesia mulai dikenal sebagai model gerakan ekologis berbasis agama yang berhasil mengintegrasikan nilai spiritual dan pembangunan berkelanjutan.

Strategi utama pada periode ini meliputi advokasi kebijakan lingkungan dan keadilan iklim, penguatan diplomasi lingkungan global, pembentukan pusat kajian etika ekologis dan keberlanjutan, serta pengembangan jejaring internasional dengan berbagai lembaga lingkungan dunia.

Puncaknya adalah fase Ekosistem Peradaban (2046–2050), ketika NU berkontribusi dalam membangun peradaban ekologis yang mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan nilai-nilai Islam sebagai warisan peradaban dunia.

Pada fase ini, model peradaban ekologis NU memperoleh pengakuan internasional. NU tidak hanya berperan dalam agenda perubahan iklim global, tetapi juga berhasil melahirkan generasi pemimpin, pemikir, dan institusi ekologis berkelas dunia. Berbagai pusat studi, lembaga riset, jaringan pendidikan, dan inovasi lingkungan yang berkembang di lingkungan NU menjadi bagian dari kontribusi Indonesia terhadap pembangunan peradaban berkelanjutan dunia.

2. Energi Berkelanjutan

Transisi energi merupakan salah satu agenda strategis global yang akan menentukan masa depan pembangunan manusia. Ketergantungan terhadap energi fosil tidak hanya mempercepat perubahan iklim, tetapi juga menciptakan berbagai risiko ekonomi, sosial, dan geopolitik. Oleh karena itu, pergeseran menuju energi bersih dan terbarukan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Bagi NU, isu energi tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga keadilan sosial. Transisi energi harus memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin, masyarakat pedesaan, dan komunitas pesantren. Oleh karena itu, konsep transisi energi yang dikembangkan NU berlandaskan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan.

Pada fase Transformasi Jam'iyah (2026–2030), fokus utama diarahkan pada pembangunan kesadaran dan kapasitas warga Nahdliyin dalam menghadapi transisi energi. Pendidikan, penerapan teknologi energi bersih, dan penguatan ekonomi hijau berbasis komunitas menjadi prioritas utama.

Outcome yang ditargetkan antara lain terbentuknya model percontohan energi terbarukan berbasis pesantren dan komunitas NU, meningkatnya literasi energi dan perubahan iklim, terselenggaranya program green jobs bagi santri dan generasi muda, serta munculnya berbagai inisiatif energi surya, biogas, dan biomassa di lingkungan NU.

Energi Berkelanjutan

2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050
Transformasi Jam'iyah	**Akselerasi Transformasi Jam'iyah**	**Kemandirian Jam'iyah**	**Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global**	**Ekosistem Peradaban**
Terbangunnya kesadaran dan kapasitas warga Nahdliyin dalam transisi energi berkelanjutan melalui pendidikan, percontohan teknologi energi bersih, dan penguatan ekonomi hijau berbasis komunitas.	**Percepatan adopsi energi terbarukan dan pengembangan ekonomi hijau di seluruh jaringan NU melalui inovasi, investasi, dan pemanfaatan teknologi.**	**Terwujudnya kemandirian energi di lingkungan NU melalui pengembangan infrastruktur energi bersih, pembiayaan berkelanjutan, dan inovasi teknologi lokal.**	**NU menjadi referensi nasional dan global dalam pengembangan transisi energi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis nilai Islam rahmatan lil 'alamin.**	**NU berkontribusi dalam membangun peradaban energi berkelanjutan yang mengintegrasikan teknologi, keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan tanggung jawab ekologis.**
Outcome: • Model percontohan energi terbarukan berbasis pesantren dan komunitas NU. • Meningkatnya literasi energi dan perubahan iklim di kalangan warga Nahdliyin. • Program green jobs bagi santri dan generasi muda NU. • Inisiatif awal energi surya, biogas, dan energi berbasis biomassa di lingkungan NU.	**Outcome:** • Ekspansi nasional penggunaan energi terbarukan di institusi NU. • Terbentuknya ekosistem usaha dan kewirausahaan hijau berbasis energi bersih. • Meningkatnya jumlah tenaga kerja tersertifikasi di sektor energi hijau. • Sistem monitoring konsumsi energi berbasis data mulai diterapkan.	**Outcome:** • Sebagian besar aset strategis NU menggunakan energi bersih. • Terbangunnya koperasi dan unit usaha energi komunitas NU. • Infrastruktur energi terbarukan mandiri di pesantren dan lembaga NU. • Menurunnya jejak karbon organisasi secara signifikan.	**Outcome:** • Prinsip transisi energi berkeadilan menjadi bagian dari diskursus kebijakan nasional. • Kepemimpinan NU diakui dalam isu energi dan perubahan iklim global. • Model transisi energi berbasis komunitas NU direplikasi secara luas. • Meningkatnya pengaruh NU dalam forum energi internasional.	**Outcome:** • Pengakuan internasional atas model transisi energi berbasis komunitas NU. • Kontribusi nyata NU dalam agenda dekarbonisasi dan net-zero global. • Lahirnya pusat-pusat unggulan energi berkelanjutan berbasis pesantren dan masyarakat. • Terbentuknya generasi pemimpin energi dan iklim tingkat dunia dari kalangan Nahdliyin.
Strategi: • Integrasi fikih lingkungan dan fikih transisi energi dalam pendidikan NU. • Pembangunan proyek percontohan PLTS atap, biogas pesantren, dan energi komunitas. • Pengembangan kurikulum green jobs dan sertifikasi kompetensi energi hijau. • Kemitraan dengan pemerintah, BUMN, industri energi, dan lembaga internasional.	**Strategi:** • Replikasi model energi terbarukan ke pesantren, sekolah, dan fasilitas kesehatan NU. • Integrasi smart energy management berbasis IoT dan AI. • Penguatan pembiayaan hijau melalui wakaf produktif dan green sukuk. • Kolaborasi dengan universitas, startup, dan industri energi bersih.	**Strategi:** • Penguatan koperasi energi dan komunitas energi lokal. • Diversifikasi sumber pendanaan melalui investasi hijau dan carbon financing. • Pengembangan pusat riset dan inovasi energi NU. • Standarisasi dan sertifikasi bangunan hijau serta efisiensi energi.	**Strategi:** • Advokasi kebijakan transisi energi berkeadilan. • Penguatan diplomasi energi dan iklim di tingkat global. • Pembangunan pusat studi energi berkelanjutan dan etika lingkungan Islam. • Pengembangan jejaring internasional dengan lembaga energi dan iklim dunia.	**Strategi:** • Membangun pusat unggulan energi dan iklim bertaraf global. • Berbagi praktik terbaik transisi energi melalui diplomasi dan pendidikan internasional. • Mengembangkan jaringan riset, inovasi, dan investasi energi hijau global. • Menyiapkan kader pemimpin energi dan keberlanjutan masa depan.

Bagi NU, isu energi tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga keadilan sosial. Transisi energi harus memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin, masyarakat pedesaan, dan komunitas pesantren.

Strategi yang ditempuh meliputi integrasi fikih lingkungan dan fikih transisi energi dalam pendidikan NU, pembangunan proyek percontohan PLTS atap dan biogas pesantren, pengembangan kurikulum green jobs, serta penguatan kemitraan dengan pemerintah, BUMN, industri energi, dan lembaga internasional.

Memasuki fase Akselerasi Transformasi Jam'iyah (2031–2035), NU mulai memperluas implementasi energi terbarukan di seluruh jaringan organisasi. Penggunaan energi bersih berkembang dari proyek-proyek percontohan menjadi bagian dari sistem operasional berbagai institusi NU.

Outcome yang diharapkan mencakup ekspansi nasional penggunaan energi terbarukan di institusi NU, terbentuknya ekosistem usaha dan kewirausahaan hijau berbasis energi bersih, meningkatnya jumlah tenaga kerja tersertifikasi di sektor energi hijau, serta diterapkannya sistem monitoring konsumsi energi berbasis data.

Pada fase ini, teknologi memainkan peran sentral. Integrasi smart energy management berbasis AI dan IoT memungkinkan pengelolaan energi yang lebih efisien. Penguatan pembiayaan hijau melalui wakaf produktif dan green sukuk juga menjadi instrumen strategis untuk mempercepat investasi pada energi bersih. Kolaborasi dengan universitas, startup teknologi, dan industri energi semakin diperluas guna memperkuat inovasi.

Pada fase Kemandirian Jam'iyah (2036–2040), NU menargetkan terwujudnya kemandirian energi di lingkungan organisasi melalui pengembangan infrastruktur energi bersih dan pembiayaan yang berkelanjutan.

Outcome yang ingin dicapai meliputi penggunaan energi bersih pada sebagian besar aset strategis NU, berkembangnya koperasi dan unit usaha energi komunitas, tersedianya infrastruktur energi terbarukan mandiri di pesantren dan lembaga NU, serta menurunnya jejak karbon organisasi secara signifikan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penguatan koperasi energi dan komunitas energi lokal menjadi strategi utama. Diversifikasi sumber pendanaan melalui investasi hijau dan carbon financing juga dilakukan untuk memperluas skala pembangunan infrastruktur energi. Selain itu, pengembangan pusat riset energi NU dan penerapan standar bangunan hijau menjadi bagian dari transformasi kelembagaan menuju organisasi yang lebih berkelanjutan.

Pada fase Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global (2041–2045), NU diharapkan menjadi referensi nasional dan global dalam pengembangan transisi energi yang berkeadilan. Pengalaman NU dalam mengintegrasikan nilai keagamaan, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat menjadi model yang dapat direplikasi secara luas.

Outcome yang ditargetkan mencakup masuknya prinsip transisi energi berkeadilan ke dalam diskursus kebijakan nasional, pengakuan terhadap kepemimpinan NU dalam isu energi dan perubahan iklim global, replikasi model energi berbasis komunitas di berbagai wilayah, serta meningkatnya pengaruh NU dalam forum energi internasional.

Untuk mendukung capaian tersebut, NU memperkuat advokasi kebijakan, diplomasi energi dan iklim, pembangunan pusat studi energi berkelanjutan, serta jejaring internasional dengan berbagai lembaga energi dunia.

Puncak dari perjalanan ini adalah fase Ekosistem Peradaban (2046–2050). Pada fase ini, NU berkontribusi dalam membangun peradaban energi berkelanjutan yang mengintegrasikan teknologi, keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan tanggung jawab ekologis.

Model transisi energi berbasis komunitas NU memperoleh pengakuan internasional. NU memberikan kontribusi nyata dalam agenda dekarbonisasi dan net-zero emission global, membangun pusat-pusat unggulan energi berkelanjutan berbasis pesantren dan

masyarakat, serta melahirkan generasi pemimpin energi dan iklim berkelas dunia. Dengan demikian, energi tidak hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi, tetapi sebagai instrumen untuk membangun kemaslahatan, kemandirian, dan keberlanjutan peradaban manusia.

Keberhasilan pelestarian lingkungan hidup akan ditentukan oleh kemampuan NU dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu gerakan yang berkelanjutan. Jika berhasil, NU tidak hanya menjadi organisasi keagamaan yang peduli lingkungan, tetapi juga menjadi salah satu pelopor lahirnya peradaban ekologis baru yang mampu menjawab tantangan dunia abad ke-21.

Dimensi VI

Penguatan Peran NU dalam Kemaslahatan Bangsa

1. Politik
2. Hukum
3. Demokrasi
4. Kepemimpinan dalam Gerakan Masyarakat Sipil

1. Politik

Pada bagian ini menggambarkan sebuah peta jalan besar NU dalam memperkuat perannya di bidang politik kebangsaan, bukan sebagai aktor politik praktis, tetapi sebagai kekuatan moral, kultural, dan peradaban yang bekerja secara bertahap hingga tahun 2050. Dengan pendekatan bertahap dan terukur, NU tidak hanya diharapkan mampu menjaga stabilitas politik nasional, tetapi juga berkontribusi dalam membangun dunia yang lebih damai, adil, dan berkeadaban.

Kita dapat melihat bahwa perjalanan ini tidak bersifat instan, melainkan dirancang dalam lima fase yang berjenjang—dimulai

Politik

2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050
Transformasi Jam'iyah	**Akselerasi Transformasi Jam'iyah**	**Kemandirian Jam'iyah**	**Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global**	**Ekosistem Peradaban**
Penguatan nilai-nilai Islam Inklusif dalam politik kebangsaan NU.	**Penguatan kontribusi NU dalam menjaga stabilitas, moderasi, dan kesejahteraan umat dalam ranah politik.**	**NU menjadi organisasi yang mandiri secara politik.**	**NU mampu melahirkan pemimpin nasional dan global yang berkualitas.**	**NU memainkan peran penting dalam membangun ekosistem kepemimpinan global**
Outcome: • Menjaga Moderasi dalam beragama • Aktor berpengaruh dalam Politik Elektoral (Konteks politik kebangsaan) • Kontribusi signifikan dalam kebijakan publik • Stabilitas Politik	**Outcome:** • Soliditas Jama'ah dan Jam'iyah NU • Literasi politik Jamaah yang baik • Kepemimpinan yang berkualitas	**Outcome:** • Kemandirian organisasi • Kedewasaan NU dalam politik kebangsaan • Meningkatnya literasi politik warga NU	**Outcome:** • Memunculkan kepemimpinan etik NU di tingkat nasional dan global • NU menjadi rujukan etik politik nasional dan global • NU lebih berperan dalam diplomasi internasional	**Outcome:** • NU menjadi pusat ekosistem peradaban politik kebangsaan yang moderat • NU menjadi model integrasi agama, politik, dan peradaban.
Strategi: • Menegaskan kembali Khittah 1926 • Memperkuat pendidikan politik umat • Mendorong reformasi kaderisasi kepemimpinan • Memperkuat jaringan internasional	**Strategi:** • Konsolidasi internal (PB, PW, PC) • Pendidikan politik bagi masyarakat • Transformasi kepemimpinan NU • Distribusi kader NU	**Strategi:** • Kemandirian finansial dan organisasi • Pembatasan intervensi politik praktis • Penguatan NU sebagai *policy center* • Regenerasi kepemimpinan yang rutin dan berkualitas	**Strategi:** • Kaderisasi kepemimpinan nasional dan global NU • Keterlibatan NU dalam diplomasi dan resolusi konflik di tingkat internasional • Penguatan jejaring internasional NU	**Strategi:** • Institusionalisasi pendidikan politik moderat di lembaga pendidikan NU • Integrasi NU dalam tata kelola global berbasis nilai rahmatan lil 'alamin

dari penguatan nilai, konsolidasi internal, kemandirian, hingga akhirnya mencapai posisi sebagai aktor global dalam ekosistem peradaban.

Sebagai organisasi dengan basis sosial yang sangat besar NU memiliki modal sosial yang luar biasa untuk memengaruhi arah perjalanan bangsa Indonesia. Dengan basis sosial yang dimiliki NU tidak boleh hanya menjadi "penonton", tetapi justru menjadi penentu arah kualitas demokrasi itu sendiri.

Peran NU dalam kehidupan politik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari karakter dasarnya sebagai organisasi keagamaan yang menekankan **nilai moderasi *(wasathiyah),* etika, dan moralitas publik**. Sejak masa awal kemerdekaan hingga era reformasi dan demokrasi kontemporer, NU tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan sosial-keagamaan, tetapi juga sebagai **penyangga etika dalam praktik politik,** yakni memastikan bahwa kekuasaan tidak semata-mata dijalankan secara prosedural, melainkan juga berlandaskan nilai-nilai moral dan kemaslahatan.

Dalam tradisi pemikiran NU, politik tidak dipahami sebagai arena perebutan kekuasaan semata (*power politics*), tetapi sebagai bagian dari ***fiqh siyasah*** yang bertujuan menghadirkan keadilan, menjaga ketertiban, serta melindungi martabat manusia. Prinsip seperti *maslahah*, *tawazun* (keseimbangan), dan *tasamuh* (toleransi) menjadi landasan penting yang mendorong NU untuk mengambil posisi sebagai **penjaga moral dalam kehidupan politik dan demokrasi.** Karena itu, NU menghindari politik ekstrem atau eksklusif, dan memilih pendekatan **inklusif serta berbasis etika sosial.**

Peran moral NU menjadi semakin relevan jika dikaitkan dengan kondisi empiris demokrasi Indonesia saat ini. Data berbagai indeks global menunjukkan bahwa kualitas politik Indonesia berada pada kategori menengah dengan sejumlah tantangan serius. Misalnya, **Freedom House (2025)** memberikan skor **56/100** dan mengkategorikan Indonesia sebagai *partly free* (sebagian bebas), sekaligus mencatat adanya persoalan seperti korupsi, diskriminasi

terhadap kelompok minoritas, dan pembatasan kebebasan sipil. Bahkan, dalam satu dekade terakhir, skor ini cenderung mengalami penurunan dari kisaran 65 menjadi 56 pada 2025, yang menunjukkan adanya gejala *democratic backsliding*.

Dalam konteks inilah peran NU menjadi sangat strategis. Sebagai organisasi dengan basis massa yang luas dan legitimasi moral yang kuat, NU memiliki kapasitas untuk **menjembatani antara politik dan etika**. NU dapat berperan dalam:

1. **Mengawal etika politik**

   NU mendorong agar praktik politik tidak sekadar legal secara formal, tetapi juga etis secara moral, termasuk dalam isu korupsi, politik uang, dan penyalahgunaan kekuasaan.

2. **Memperkuat moderasi dan stabilitas demokrasi**

   Di tengah polarisasi politik, NU berperan sebagai kekuatan penengah yang menjaga kohesi sosial dan mencegah radikalisasi politik.

3. **Mendorong keadilan sosial dan perlindungan minoritas**

   NU secara konsisten mengadvokasi nilai inklusivitas dan menolak diskriminasi, yang menjadi kelemahan utama dalam berbagai indeks demokrasi global.

4. **Membentuk budaya politik yang sehat**

   Mengingat rendahnya skor budaya politik dalam indeks EIU, NU berperan penting dalam membangun kesadaran politik berbasis akhlak, bukan sekadar kepentingan pragmatis.

Dengan demikian, keberadaan NU dalam politik Indonesia tidak hanya bersifat partisipatif, tetapi juga **normatif dan moralistik**. Dalam situasi di mana berbagai indikator menunjukkan adanya stagnasi atau bahkan kemunduran kualitas demokrasi, NU berfungsi sebagai **penyangga etika *(moral guardian)*** yang menjaga agar demokrasi tidak kehilangan arah moralnya.

Fase 1. 2026–2030 – Transformasi Jam'iyah

Pada fase awal ini, NU melakukan fondasi paling mendasar, yaitu memperkuat kembali nilai-nilai Islam inklusif dalam politik kebangsaan. Artinya, NU tidak sekadar hadir dalam ruang politik, tetapi menghadirkan wajah politik yang beretika, toleran, dan menjunjung tinggi kemaslahatan. Dalam konteks saat ini, di mana polarisasi politik sering kali meningkat terutama dalam momentum elektoral, peran NU menjadi sangat strategis sebagai penjaga keseimbangan sosial.

Dengan struktur yang dimiliki hingga ke desa-desa, basis pesantren, majelis taklim, masjid dan musholla, Lembaga Pendidikan yang berafiliasi dengan NU, NU memiliki kemampuan menjangkau akar rumput untuk membangun literasi politik yang sehat. Di tahap ini, NU diarahkan untuk menjadi penjaga kultur beragama yang toleran dan moderat, mengawal sistem politik electoral yang beretika, dan berkontribusi nyata dalam kebijakan publik.

Strategi yang ditempuh menekankan pada peneguhan kembali Khittah 1926, penguatan pendidikan politik umat, serta pembenahan sistem kaderisasi agar lebih responsif terhadap tantangan zaman.

Fase 2. 2031–2035 – Akselerasi Transformasi

Setelah fondasi nilai diperkuat, NU memasuki fase akselerasi. Pada tahap ini, fokus bergeser dari sekadar penguatan nilai menuju peningkatan kapasitas organisasi dan kualitas kontribusi politik nasional. Di sini NU sudah mampu melakukan konsolidasi internal secara efektif dan sistematis—dari tingkat pusat hingga daerah—dengan tujuan membangun organisasi yang solid dan adaptif.

Strategi yang dijalankan meliputi konsolidasi kelembagaan, pendidikan politik berbasis masyarakat, serta transformasi kepemimpinan agar lebih visioner dan profesional.

Fase 3. 2036–2040 – Kemandirian Jam'iyah

Memasuki fase ini, NU mulai menunjukkan kedewasaan sebagai organisasi yang mandiri—baik secara politik maupun ekonomi. Kemandirian ini sangat penting agar NU tidak terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek atau relasi transaksional yang justru mereduksi marwah organisasi.

Di tahap ini, NU diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada kekuatan politik praktis memperkuat posisi sebagai pusat pemikiran kebijakan atau *policy center*, serta membangun sistem regenerasi kepemimpinan yang berkelanjutan.

Jika ini bisa dijalankan maka sumber pembiayaan organisasi berasal dari sumber mandiri; marwah NU lebih terjaga dan warganya mempunyai kedewasaan dan literasi politik sehingga tidak diombang-ambingkan oleh aktor-aktor politik praktis yang hanya mengejar kekuasaan. Dengan capaian ini, NU tidak hanya menjadi partisipan politik, tetapi juga produsen gagasan politik yang memengaruhi arah kebijakan nasional.

Fase 4. 2041–2045 – Kepemimpinan Etik Nasional dan Global

Setelah mencapai kemandirian, NU melangkah lebih jauh menjadi kekuatan kepemimpinan—tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global. Pada fase ini, NU diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang tidak hanya cakap secara teknokratis, tetapi juga memiliki integritas moral dan visi peradaban. NU mempunyai peran penting dalam diplomasi internasional, resolusi konflik global, serta pengembangan etika politik berbasis nilai Islam moderat.

Dengan demikian, NU bukan hanya menjadi aktor domestik, tetapi juga menjadi referensi global dalam praktik politik yang beretika.

Fase 5. 2046–2050 – Ekosistem Peradaban

Fase ini merupakan puncak dari keseluruhan peta jalan, di mana NU tidak lagi sekadar berperan dalam nasional tetapi menjadi bagian dari arsitek peradaban global. Dengan demikian, NU menjadi pusat ekosistem politik kebangsaan yang moderat, menjadi model integrasi antara agama, politik, dan peradaban dunia, serta menjadi rujukan global dalam pengelolaan keberagaman.

Pada titik ini, nilai "rahmatan lil 'alamin" tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi menjadi praktik nyata dalam tata kelola global.

2. Hukum

Hukum di sini dipahami tidak hanya sebagai *rule of law* dalam arti prosedural, tetapi sebagai **instrumentum *justitiae***—alat untuk menghadirkan keadilan substantif, terutama bagi kelompok marginal. Hukum dihadirkan untuk mencapai keadilan.

Indonesia sendiri menghadapi paradoks hukum: di satu sisi memiliki sistem hukum yang cukup lengkap, tetapi di sisi lain masih menghadapi persoalan **ketimpangan akses keadilan**. Diperkirakan hanya sekitar **30–40% masyarakat miskin yang didampingi secara hukum ketika bersengketa**, indeks kepercayaan publik terhadap penegakan hukum masih fluktuatif di kisaran **50–60%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa problem hukum bukan sekadar regulasi, tetapi menyangkut akses, etika, dan struktur kekuasaan. Di sinilah NU masuk sebagai kekuatan penyeimbang.

Sementara itu, dari perspektif global, kondisi negara hukum Indonesia diukur secara lebih komprehensif melalui **Rule of Law Index (RoL Index)** yang disusun oleh World Justice Project. Dalam laporan terbaru tahun 2025, Indonesia memperoleh skor sekitar **0,52 dari skala 0–1** dan berada pada peringkat **69**

Hukum

2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050
Transformasi Jam'iyah	**Akselerasi Transformasi Jam'iyah**	**Kemandirian Jam'iyah**	**Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global**	**Ekosistem Peradaban**
Penguatan pemahaman hukum yang selaras dengan nilai dan prinsip Aswaja NU berbasis pada keadilan substantif dan perlindungan kelompok rentan.	**Percepatan kontribusi NU dalam pembaharuan hukum nasional yang responsif terhadap nilai keadilan sosial dan kemanusiaan.**	**NU menjadi sebagai salah satu rujukan moral dan intelektual dalam penguatan sistem hukum yang adil.**	**NU memimpin pengarusutamaan hukum yang berkeadilan di tingkat nasional dan internasional.**	**Terbangunnya ekosistem hukum yang menjunjung keadilan dan kemanusiaan universal.**
Outcome: • Meningkatnya kesadaran hukum warga NU • Pesantren dan PTNU sebagai pusat literasi hukum	**Outcome:** • Keterlibatan Kader NU dalam proses legislasi dan kebijakan • Terbangunnya jejaring hukum nasional • Meningkatnya akses hukum bagi semua warga NU	**Outcome:** • LBH NU yang mandiri dan profesional • Munculnya pusat kajian hukum • Integrasi sistem advokasi hukum berkelanjutan	**Outcome:** • Kader NU di lembaga hukum nasional dan internasional • Kontribusi NU dalam penanganan isu hukum di tingkat nasional dan internasional	**Outcome:** • Sistem hukum yang adil, beradab, dan berkelanjutan • NU sebagai penjaga moral dan arah peradaban hukum • Harmoni hukum agama, nasional, dan global
Strategi: • Pendidikan dan penyuluhan hukum berbasis pesantren • Advokasi hukum bagi masyarakat dan kelompok rentan • Penguatan LBH NU di semua tingkatan	**Strategi:** • Inkubasi kader NU praktisi hukum • Partisipasi aktif NU dalam memberi masukan terhadap proses legislasi baik di tingkat regional maupun nasional • Riset kebijakan hukum	**Strategi:** • Penguatan *think-tank* hukum NU • Standarisasi layanan hukum NU • Pengembangan advokasi hukum berbasi teknologi	**Strategi:** Kerjasama penguatan hukum di tingkat nasional dan internasional	**Strategi:** • Internalisasi nilai Aswaja dalam sistem hukum • Integrasi pendidikan hukum, teknologi, dan etika • Regenerasi kepemimpinan hukum NU lintas generasi • Konsolidasi jejaring hukum peradaban dunia.

dari 143 negara. Skor ini menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (0,53), sekaligus mencerminkan posisi Indonesia pada kategori menengah dalam hal penegakan hukum di tingkat global. Dalam konteks regional Asia Pasifik, Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan negara-negara seperti Singapura dan Malaysia. Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya pembatasan kekuasaan pemerintah, perlindungan hak fundamental, serta kinerja sistem peradilan. Situasi ini menegaskan bahwa tantangan demokrasi Indonesia tidak hanya pada prosedur politik, tetapi juga pada kualitas penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara.

Lebih lanjut, Rule of Law Index mengukur delapan dimensi utama, yaitu pembatasan kekuasaan pemerintah, ketiadaan korupsi, keterbukaan pemerintah, hak-hak fundamental, ketertiban dan keamanan, penegakan regulasi, peradilan perdata, dan peradilan pidana. Dalam konteks Indonesia, beberapa dimensi yang relatif kuat adalah **ketertiban dan keamanan**, sedangkan yang paling lemah adalah **ketiadaan korupsi dan sistem peradilan pidana.** Selain itu, penurunan skor terbaru juga disebabkan oleh melemahnya tiga aspek penting, yaitu **pembatasan kekuasaan pemerintah, perlindungan hak-hak fundamental, dan kinerja peradilan pidana.**

Secara longitudinal, skor Rule of Law Indonesia menunjukkan kecenderungan **stagnasi bahkan penurunan sejak sekitar 2015**, dengan nilai yang relatif konsisten pada kisaran 0,52–0,53. Stagnasi ini menandakan bahwa reformasi hukum di Indonesia belum mengalami kemajuan signifikan dalam jangka panjang. Bahkan, sejumlah kajian menyebut kondisi ini sebagai "rapor merah negara hukum", karena berbagai persoalan klasik seperti korupsi, penyalahgunaan kewenangan, kriminalisasi terhadap aktivis, serta lemahnya independensi lembaga hukum masih terus berulang.

Jika kedua pendekatan tersebut disintesiskan, terlihat bahwa terdapat **paradoks dalam perkembangan negara hukum di Indonesia.** Di satu sisi, data BPS melalui IDI (Indeks

Demokrasi Indonesia) menunjukkan adanya peningkatan kapasitas kelembagaan dan prosedur formal demokrasi. Namun di sisi lain, indeks global seperti Rule of Law Index mengindikasikan bahwa kualitas substantif negara hukum—terutama dalam hal kebebasan sipil, akuntabilitas, dan keadilan—masih lemah dan cenderung stagnan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah memenuhi syarat sebagai **negara hukum dalam arti formal (*rule by law),*** yaitu keberadaan institusi, regulasi, dan prosedur yang berjalan. Namun, dalam arti substantif (***rule of law),*** Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi, perlindungan hak asasi manusia, serta independensi lembaga peradilan. Tantangan ke depan bukan hanya memperkuat institusi, tetapi juga memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi instrumen keadilan yang efektif dan melindungi seluruh warga negara secara setara.

Fase 1. 2026–2030 – Transformasi Jam'iyah (Fondasi Kultural Hukum)

Pada fase ini, NU berangkat dari pendekatan yang sangat khas: **transformasi berbasis kultural dan edukatif**. NU tidak langsung masuk ke arena kekuasaan hukum, tetapi terlebih dahulu membangun **kesadaran hukum sebagai kesadaran moral**. Ini penting, karena dalam tradisi Aswaja, hukum selalu berkelindan dengan nilai keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*).

Dengan jejaring yang dimiliki, baik pondok pesantren, kiai, dan Lembaga Pendidikan NU memiliki keunggulan dalam membangun *legal consciousness* dari bawah. Hal ini dilakukan untuk menggeser paradigma masyarakat dari "takut hukum" menjadi "memahami dan memanfaatkan hukum"; menjadikan pesantren dan Lembaga Pendidikan tinggi NU sebagai *community legal hubs; dan m*endorong lahirnya "fiqh sosial" dalam bentuk advokasi konkret terutama kepada kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan.

Fase 2. 2031–2035 – Akselerasi Transformasi (Intervensi Struktural)

Setelah kesadaran hukum terbentuk, NU memperkuat perannya ke level structural dengan memengaruhi dan mempelopori kebijakan dan regulasi yang lebih berpihak pada kepentingan public dan keberpihakan pada kelompok marjinal. Di titik ini, NU bertransformasi dari *moral force* menjadi ***policy influencer***.

Di sini NU harus memperkuat kemitraan strategis dengan aktor-aktor politik untuk memastikan aspirasi dan agenda-agendanya bisa dijalankan. Di sini NU bisa menjadi ***"shadow legal system"*** **yang memperkuat negara**, bukan menyaingi negara.

Fase 3. 2036–2040 – Kemandirian Jam'iyah (Produksi Pengetahuan Hukum)

Pada fase ini terjadi lompatan penting: NU tidak lagi sekadar terlibat, tetapi mulai **memproduksi dan mendefinisikan wacana hukum**. NU bergerak menjadi *think tank hukum dan* pusat epistemologi hukum berbasis nilai Islam aswaja. Dengan demikian, NU masuk dalam **pembentukan paradigma hukum**, bukan hanya implementasi. Integrasi teknologi membuka peluang *legal tech* berbasis komunitas bisa menjadi kekuatan NU dalam mendorong literasi hukum.

Dalam perspektif sosiologi hukum, ini adalah fase di mana NU memasuki **legal pluralism secara konstruktif**—menghadirkan nilai keislaman dalam sistem hukum nasional tanpa konflik.

Fase 4. 2041–2045 – Kepemimpinan Etik

Pada fase ini, terjadi ekspansi peran NU ke ranah global. NU tidak hanya beroperasi dalam sistem hukum Indonesia, tetapi ikut membentuk norma global. NU memasuki *fase* ***norm diffusion***,

yaitu menyebarkan nilai hukum berbasis Islam moderat ke dunia internasional. NU menjadi contoh bagaimana agama dapat berkontribusi pada demokrasi dan keadilan. Fase ini menempatkan NU sebagai ***ethical leader***, bukan sekadar *participant.*

Fase 5. 2046–2050 – Ekosistem Peradaban

Ini adalah fase paling visioner, di mana NU berperan sebagai ***civilizational legal order,*** **yaitu kekuatan yang bisa mempengaruhi peradaban hukum. Di sini** hukum tidak lagi dipahami sebagai domain nasional semata, tetapi sebagai bagian dari **arsitektur peradaban global**. Pada tahap ini NU menjadi *the guardian of moral order (penjaga moral) dan* penghubung antara hukum agama, hukum negara, dan norma global

Dengan demikian hukum diposisikan sebagai sarana mewujudkan *maqashid al-shari'ah* dalam konteks modern, dan NU menghadirkan sintesis antara kesetiaan pada tradisi, terbuka dengan arus modernitas dan tata dunia internasional. Sampai di sini menunjukkan bahwa NU diarahkan menjadi **aktor peradaban *(civilizational actor)***.

3. Demokrasi

Demokrasi yang dimaksud di sini bukan sekadar prosedural—sebatas pemilu lima tahunan—melainkan demokrasi yang hidup (*living democracy*), yang menjamin keadilan, partisipasi, dan perlindungan hak-hak warga.

Dalam konteks Indonesia, demokrasi masih menghadapi tantangan serius. Tingkat partisipasi pemilih memang cukup tinggi mencapai sekitar **80–85% dalam pemilu nasional,** namun jika melihat indeks demokrasi Indonesia nilai masih rendah. Berbagai lembaga internasional memberikan gambaran yang relatif konsisten mengenai kondisi demokrasi Indonesia. Secara umum, Indonesia masih dikategorikan sebagai negara demokratis, namun dengan kualitas yang belum matang dan bahkan menunjukkan kecenderungan penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Demokrasi

2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050
Transformasi Jam'iyah	**Akselerasi Transformasi Jam'iyah**	**Kemandirian Jam'iyah**	**Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global**	**Ekosistem Peradaban**
Penguatan nilai dan prinsip demokrasi substantif berbasis Aswaja di semua tingkatan NU	**NU sebagai kekuatan masyarakat sipil penopang demokrasi yang berkeadilan dan inklusif**	**NU mampu menjaga keseimbangan kekuasaan dan kepentingan publik secara berdaulat**	**NU sebagai rujukan kepemimpinan etik yang menjunjung tinggi demokrasi dan HAM**	**Terbangunnya ekosistem peradaban demokrasi yang berakar pada nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan universal.**
Outcome: • Kader NU aktif memperjuangkan demokrasi di tingkat nasional dan lokal • Lembaga di lingkungan NU sebagai pusat literasi publik	**Outcome:** • Meluasnya keterlibatan kader NU di lembaga publik dan sosial yang strategis • Menguatnya peran NU dalam kontrol sosial • Terbangunnya jejaring rakyat	**Outcome:** • NU mandiri secara politik • Ekosistem demokrasi lokal yang sehat dan partisipatif • Pesantren sebagai pusat rekonsiliasi dan dialog publik	**Outcome:** • Meluasnya keterlibatan kader NU di kepemimpinan nasional dan global • Menguatnya diplomasi masyarakat sipil berbasis keagamaan.	**Outcome:** • Demokrasi mapan, adil, dan berkelanjutan • NU sebagai penjaga moral publik dan peradaban • Harmoni agama, negara, dan masyarakat global
Strategi: • Pendidikan Politik warga dan kader NU • Dakwah kebangsaan • Penguatan forum warga NU • Penguatan literasi warga NU	**Strategi:** • Inkubasi kepemimpinan publik kader NU • Advokasi kebijakan publik berbasis keadilan sosial • Kolaborasi NU dengan CSO • Penguatan data dan riset kebijakan NU	**Strategi:** • Penguatan *Think-tank* NU • Kemandirian mandiri gerakan sosial demokrasi NU • Penguatan kaderisasi berbasis etika NU	**Strategi:** • Diplomasi nilai Islam moderat dan demokrasi • Intensifikasi forum internasional NU • Standarisasi etika kepemimpinan global NU • Penguatan sinergi NU dengan lembaga internasional	**Strategi:** • Institusionalisasi nilai demokrasi berbasis etika NU • Konsolidasi jejaring peradaban nusantara global.

Laporan *Freedom in the World* menempatkan Indonesia pada kategori **"partly free" (sebagian bebas).** Pada tahun 2025, Indonesia memperoleh skor **56 dari 100**, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 57. Skor ini merupakan akumulasi dari dua aspek utama, yaitu **hak politik** dan **kebebasan sipil.** Freedom House mengakui bahwa Indonesia telah mengalami kemajuan demokrasi sejak reformasi 1998, termasuk pemilu yang kompetitif dan transfer kekuasaan yang damai. Namun, sejumlah tantangan serius masih mengemuka, seperti korupsi sistemik, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, konflik di Papua, serta penggunaan hukum pencemaran nama baik dan penodaan agama secara politis. Dengan demikian, demokrasi Indonesia dinilai telah mapan secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya menjamin kebebasan sipil secara substansial.

Lembaga **Economist Intelligence Unit (EIU)** melalui *Democracy Index* juga memberikan penilaian yang sejalan, meskipun menggunakan metodologi yang berbeda. Dalam laporan tahun 2024, Indonesia memperoleh skor **6,44 dari skala 10,** yang menempatkannya dalam kategori **"flawed democracy" (demokrasi cacat).** Skor ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2023 (6,53) dan 2022 (6,71), sekaligus menandai tren penurunan yang berlangsung dalam satu dekade terakhir. Penilaian EIU didasarkan pada lima dimensi utama: proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Dalam kasus Indonesia, dimensi yang paling lemah adalah **budaya politik dan kebebasan sipil**, yang memperoleh skor relatif rendah. Selain itu, EIU juga menyoroti munculnya fenomena politik dinasti, kekhawatiran terhadap konsentrasi kekuasaan, serta melemahnya mekanisme *checks and balances* sebagai faktor yang memengaruhi kualitas demokrasi. Dengan demikian, dari perspektif EIU, Indonesia bukan negara otoriter, tetapi juga belum mencapai standar demokrasi yang berkualitas tinggi.

Di tingkat nasional, **Badan Pusat Statistik (BPS)** melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) juga menggambarkan kondisi

yang serupa. Pada tahun 2024, IDI Indonesia mencapai **79,81 (kategori sedang),** tetapi kemudian mengalami penurunan menjadi **78,19 pada 2025**. Penurunan ini antara lain dipengaruhi oleh berbagai pembatasan kebebasan berekspresi dan dinamika politik yang memengaruhi kualitas partisipasi publik.

Fase 1. 2026–2030 – Transformasi Jam'iyah (Fondasi Demokrasi Substantif)

Pada tahap ini, NU berfokus pada penguatan nilai dan prinsip demokrasi substantif berbasis Aswaja di seluruh tingkatan organisasi. Hal ini sangat strategis bagi NU untuk menggeser cara pandang terhadap demokrasi, sekaligus membangun kualitas kewargaan politik *(political citizenship)* di kalangan warganya.

Dalam kaitan ini, NU menempatkan **demokrasi bukan semata sebagai mekanisme politik,** seperti pemilu atau prosedur pergantian kekuasaan, melainkan sebagai **nilai etis dan praksis sosial** yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif ini, demokrasi dipahami sebagai praktik kemaslahatan yang menuntut kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Artinya, demokrasi tidak berhenti pada aspek formal-prosedural, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku sosial yang mencerminkan akhlak publik. Melalui prinsip-prinsip seperti *tawasuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), dan *i'tidal* (adil), NU berupaya memastikan bahwa demokrasi tidak tereduksi menjadi sekadar kompetisi kekuasaan yang pragmatis, melainkan menjadi ruang untuk menghadirkan keadilan sosial dan harmoni masyarakat. Dengan demikian, NU berperan penting dalam **menjaga dimensi moral demokrasi**, agar sistem politik tetap berorientasi pada nilai dan bukan sekadar prosedur.

Di samping itu, NU secara strategis berkontribusi dalam membangun **political citizenship** di kalangan warganya. *Political citizenship* di sini tidak hanya berarti status formal sebagai warga negara, tetapi mencakup **kesadaran, kapasitas, dan tanggung**

jawab untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik secara aktif dan etis. Melalui jaringan pesantren, majelis taklim, organisasi otonom, serta lembaga pendidikan dan sosial, NU menanamkan pemahaman bahwa keterlibatan politik adalah bagian dari tanggung jawab keagamaan dan kebangsaan. Warga NU didorong untuk memahami hak-hak politik mereka, sekaligus menjalankan kewajiban moral seperti menjaga persatuan, menolak kekerasan, dan menghindari praktik politik yang merusak seperti hoaks, ujaran kebencian, dan politik uang.

Lebih jauh, pembangunan *political citizenship* oleh NU juga mencakup penguatan **kapasitas kritis masyarakat** dalam membaca dinamika politik. NU tidak hanya mengajarkan loyalitas, tetapi juga mendorong sikap kritis yang konstruktif terhadap kekuasaan. Dalam hal ini, warga NU diposisikan sebagai subjek aktif yang mampu mengawasi pemerintah, terlibat dalam diskursus publik, serta berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang berpihak pada kepentingan bersama. Dengan kata lain, NU membentuk model kewargaan yang tidak pasif, tetapi partisipatif dan beretika.

Kedua aspek tersebut—demokrasi sebagai nilai etis dan pembangunan *political citizenship*—memiliki hubungan yang saling memperkuat. Demokrasi yang berbasis nilai membutuhkan warga negara yang berkesadaran moral, sementara *political citizenship* yang kuat hanya dapat tumbuh dalam lingkungan demokrasi yang sehat secara etis. Di sinilah makna strategis peran NU menjadi sangat penting: NU tidak hanya memperkuat struktur demokrasi, tetapi juga membangun **kultur demokrasi.**

Dengan demikian, NU dapat dipahami sebagai aktor kunci yang mengintegrasikan antara **agama, etika, dan politik** dalam kehidupan publik Indonesia. Peran ini menjadi semakin relevan di tengah tantangan demokrasi kontemporer yang cenderung mengalami formalisasi tanpa substansi. NU hadir untuk memastikan bahwa demokrasi tetap berakar pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

Dengan perspektif tersebut, *outcome* yang diharapkan dari dimensi ini akan berdampak pada perubahan strategis dalam penguatan peran NU di ruang publik, baik pada level aktor maupun kelembagaan.

Pertama, **kader NU aktif dalam memperjuangkan demokrasi** menunjukkan adanya transformasi dari sekadar partisipasi politik pasif menjadi keterlibatan yang lebih substantif dan berorientasi nilai. Kader NU tidak hanya hadir dalam proses elektoral seperti pemilu, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang mendorong praktik demokrasi yang sehat, inklusif, dan beretika. Mereka terlibat dalam advokasi kebijakan, pengawasan kekuasaan, pendidikan politik masyarakat, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan yang selaras dengan prinsip keislaman moderat. Dengan demikian, kader NU menjadi kekuatan sosial yang tidak hanya menjaga keberlangsungan demokrasi, tetapi juga meningkatkan kualitasnya melalui pendekatan moral dan keadaban publik.

Kedua, **lembaga NU menjadi pusat literasi publik** mencerminkan penguatan kapasitas institusional dalam membangun kesadaran masyarakat. Dalam hal ini, lembaga-lembaga di bawah NU—baik di bidang pendidikan, dakwah, maupun sosial—berfungsi sebagai ruang produksi dan diseminasi pengetahuan yang mendorong pemahaman kritis terhadap isu-isu demokrasi, kebijakan publik, dan kehidupan bernegara. Literasi yang dibangun tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif, yaitu membentuk warga yang sadar hak dan kewajiban, mampu berpikir kritis, serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, toleransi, dan kemanusiaan. Dengan berkembangnya lembaga sebagai pusat literasi, NU berkontribusi dalam mengurangi disinformasi, polarisasi, dan praktik politik yang manipulatif.

Secara keseluruhan, kedua *outcome* tersebut saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Kader yang aktif dan berintegritas akan menghidupkan lembaga sebagai pusat literasi, sementara

lembaga yang kuat akan melahirkan kader-kader yang berkapasitas dan beretika. Sinergi ini pada akhirnya menempatkan NU sebagai pilar penting dalam membangun demokrasi Indonesia yang tidak hanya prosedural, tetapi juga berlandaskan etika dan moralitas publik.

Fase 2. 2031–2035 – Akselerasi Transformasi (Penguatan Masyarakat Sipil)

Memasuki tahap ini, NU mulai berperan sebagai **kekuatan masyarakat sipil yang aktif dan kritis**. NU tidak hanya berperan sebagai institusi pendidikan sosial-keagamaan yang membentuk kesadaran dan karakter masyarakat, tetapi juga menjalankan fungsi yang lebih luas dalam kehidupan publik, khususnya dalam **mengawal kebijakan publik** dan **melakukan kontrol sosial terhadap kekuasaan**. Peran ini menunjukkan bahwa NU hadir sebagai kekuatan moral sekaligus aktor sipil yang aktif dalam menjaga arah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks kebijakan publik, NU berperan sebagai **penjaga nilai** ***(guardian of values)*** yang memastikan bahwa setiap kebijakan negara tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepentingan rakyat luas. Melalui jaringan organisasi yang luas—mulai dari pusat hingga tingkat akar rumput—NU memiliki kapasitas untuk memproduksi gagasan, memberikan rekomendasi, serta melakukan advokasi terhadap berbagai isu strategis, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi umat, hingga perlindungan kelompok rentan. Peran ini tidak selalu bersifat konfrontatif, tetapi lebih sering diwujudkan dalam bentuk dialog konstruktif dengan pemerintah, pemberian masukan kebijakan, serta partisipasi dalam ruang-ruang deliberatif. Dengan demikian, NU membantu mengarahkan kebijakan publik agar tidak sekadar legal secara formal, tetapi juga ***legitimate secara moral dan sosial.***

Di sisi lain, NU juga menjalankan fungsi **kontrol sosial terhadap kekuasaan**. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan yang

tidak diawasi berpotensi menyimpang, sehingga diperlukan kekuatan masyarakat sipil yang mampu menjaga akuntabilitas. NU, dengan legitimasi historis dan basis massanya, memiliki posisi strategis untuk mengingatkan, mengoreksi, bahkan mengkritik kebijakan atau praktik kekuasaan yang dinilai menyimpang dari prinsip keadilan dan kepentingan publik. Kontrol sosial ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti pernyataan resmi organisasi, fatwa atau tausiyah ulama, gerakan advokasi, serta mobilisasi opini publik yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan yang moderat.

Kontrol sosial yang dilakukan NU tidak berangkat dari logika oposisi politik semata, tetapi dari pendekatan **etika keagamaan dan tanggung jawab kebangsaan**. Kritik yang disampaikan cenderung bersifat konstruktif, dengan tujuan memperbaiki sistem, bukan sekadar menjatuhkan kekuasaan. Dalam hal ini, NU memainkan peran sebagai **penyeimbang *(balancing force)*** yang menjaga stabilitas sekaligus mendorong perbaikan kualitas pemerintahan.

Melalui dua peran tersebut, NU menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya lembaga pendidikan masyarakat, tetapi juga **aktor strategis dalam ekosistem demokrasi**. NU menghubungkan antara nilai-nilai moral, kesadaran masyarakat, dan praktik kekuasaan, sehingga tercipta keseimbangan antara otoritas negara dan kepentingan publik. Dengan demikian, kehadiran NU menjadi penting dalam memastikan bahwa kekuasaan tetap berada dalam koridor etika, sementara kebijakan publik tetap berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Outcome yang diharapkan adalah penguatan peran strategis NU dalam ruang publik, baik pada level individu kader maupun secara kolektif dalam masyarakat. Ketiga aspek tersebut—keterlibatan kader, kontrol sosial, dan jejaring rakyat—mempunyai keterkaitan yang saling menguatkan dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat dan berdaya.

Pertama, **meningkatnya keterlibatan kader NU dalam lembaga publik** menunjukkan bahwa kaderisasi yang dibangun

NU tidak hanya menghasilkan individu yang religius, tetapi juga memiliki kapasitas kepemimpinan dan komitmen kebangsaan. Kader NU semakin hadir di berbagai ruang strategis, baik dalam institusi pemerintahan, lembaga legislatif, badan-badan negara, maupun organisasi masyarakat sipil. Kehadiran ini penting karena membawa perspektif nilai—seperti moderasi, keadilan, dan kemaslahatan—ke dalam proses pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, keterlibatan kader NU tidak sekadar memperluas representasi, tetapi juga memperkaya kualitas etika dalam tata kelola pemerintahan.

Kedua, *outcome* **menguatnya fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan mencerminkan** meningkatnya peran kader dan kesadaran kolektif warga NU, kemampuan untuk mengawasi, mengkritisi, dan mengoreksi kebijakan publik menjadi semakin kuat. Kontrol sosial ini tidak hanya dilakukan melalui mekanisme formal, tetapi juga melalui otoritas moral keagamaan, jaringan ulama, serta pengaruh sosial di tingkat komunitas. NU berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang yang menjaga akuntabilitas kekuasaan, memastikan bahwa kebijakan publik tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat dan nilai-nilai keadilan. Penguatan kontrol sosial ini sekaligus menjadi penegas bahwa demokrasi tidak hanya bertumpu pada institusi formal, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat sipil.

Ketiga, **terbangunnya jejaring rakyat** menunjukkan adanya konsolidasi kekuatan sosial yang berbasis komunitas. NU, dengan struktur organisasinya yang menjangkau hingga tingkat akar rumput, memiliki potensi besar untuk membangun jaringan sosial yang solid, inklusif, dan berdaya. Jejaring ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilisasi, tetapi juga sebagai ruang berbagi informasi, memperkuat solidaritas, dan membangun kapasitas kolektif masyarakat. Dalam konteks politik, jejaring rakyat ini menjadi fondasi penting bagi partisipasi publik yang luas dan berkelanjutan, sekaligus menjadi benteng terhadap disinformasi, polarisasi, dan fragmentasi sosial.

Secara keseluruhan, ketiga outcome tersebut menggambarkan transformasi peran NU dari sekadar organisasi sosial-keagamaan menjadi **aktor strategis dalam demokrasi substantif.** Keterlibatan kader di lembaga publik memastikan hadirnya nilai dalam kekuasaan, fungsi kontrol sosial menjaga akuntabilitas, dan jejaring rakyat memperkuat basis partisipasi. Sinergi ketiganya akan membawa pada terbangunnya tatanan politik yang tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga berakar kuat pada nilai, etika, dan kekuatan masyarakat.

Strategi untuk mencapai hal tersebut bisa dilakukan dengan:

1. **Inkubasi kepemimpinan public**. Hal ini merupakan upaya sistematis untuk melahirkan kader-kader NU yang memiliki kapasitas, integritas, dan visi kebangsaan. Melalui proses pembinaan yang terstruktur—baik melalui pesantren, organisasi otonom, maupun lembaga pendidikan—NU tidak hanya membentuk individu yang memahami nilai-nilai keagamaan, tetapi juga mampu menerjemahkannya dalam kepemimpinan publik yang responsif dan akuntabel. Inkubasi ini mencakup penguatan keterampilan kepemimpinan, literasi kebijakan, kemampuan komunikasi publik, serta sensitivitas terhadap persoalan sosial. Dengan demikian, kader yang dihasilkan diharapkan mampu berperan di berbagai arena strategis, membawa perspektif etika dan keadilan ke dalam praktik kekuasaan.
2. A**dvokasi kebijakan berbasis keadilan sosial** menegaskan komitmen NU untuk memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya efektif, tetapi juga berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, terutama kelompok rentan. Dalam strategi ini, NU berperan sebagai jembatan antara aspirasi rakyat dan proses pengambilan keputusan. Advokasi dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti dialog dengan pembuat kebijakan, penyusunan rekomendasi, kampanye

publik, hingga kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya. Prinsip keadilan sosial menjadi landasan utama, sehingga kebijakan yang didorong tidak sekadar memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan, pemerataan, dan perlindungan terhadap yang lemah. Dengan demikian, NU turut berkontribusi dalam mengarahkan agenda pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

3. P**enguatan riset dan data kebijakan** menjadi fondasi penting yang memastikan bahwa seluruh kerja advokasi dan pengambilan keputusan didasarkan pada bukti *(evidence-based).* Dalam konteks ini, NU mendorong pengembangan kapasitas riset di lingkungan internalnya, baik melalui lembaga kajian, perguruan tinggi, maupun jaringan intelektual. Data dan penelitian digunakan untuk memahami secara mendalam persoalan sosial, memetakan kebutuhan masyarakat, serta mengukur dampak kebijakan. Dengan adanya basis data yang kuat, NU tidak hanya berbicara dalam tataran normatif, tetapi juga mampu memberikan solusi yang konkret dan terukur. Strategi ini sekaligus memperkuat kredibilitas NU sebagai aktor publik yang tidak hanya bermoral, tetapi juga berbasis pengetahuan.

Secara keseluruhan, ketiga strategi ini membentuk suatu kerangka kerja yang terpadu. Inkubasi kepemimpinan menghasilkan aktor yang kompeten, advokasi kebijakan menjadi instrumen perubahan struktural, dan riset serta data menyediakan dasar analitis yang kuat. Sinergi ketiganya menempatkan NU sebagai kekuatan sosial yang mampu berperan secara efektif dalam membangun demokrasi yang beretika, berkeadilan, dan berbasis pengetahuan.

Fase 3. 2036–2040 – Kemandirian Jam'iyah (Demokrasi Berdaulat)

Fase ini merupakan tahap perkembangan organisasi di mana NU mencapai tingkat kematangan yang tinggi dalam memposisikan diri di tengah dinamika politik nasional. Pada fase ini, NU tidak lagi terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis, melainkan tampil sebagai kekuatan sosial-keagamaan yang mampu **menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kepentingan publik**.

Kemandirian ini ditandai oleh kemampuan NU untuk mengambil posisi yang **otonom dan proporsional** terhadap kekuasaan. NU tidak menempatkan dirinya sebagai alat politik dari rezim tertentu, tetapi juga tidak mengambil posisi antagonistik yang dapat merusak stabilitas sosial. Sebaliknya, NU berperan sebagai **penjaga moral** ***(moral compass)*** yang memastikan bahwa arah kebijakan publik tetap berada dalam koridor keadilan, kemaslahatan, dan kepentingan rakyat luas. Dalam konteks ini, NU mampu mempertahankan integritasnya sebagai organisasi masyarakat sipil yang independen, sekaligus tetap relevan dalam proses politik nasional.

Lebih jauh, pada fase ini NU menunjukkan kedewasaan dalam memahami politik sebagai ruang pengabdian, bukan sekadar perebutan kekuasaan. NU tidak terseret dalam praktik politik praktis yang sempit seperti kompetisi elektoral atau kepentingan jangka pendek, tetapi tetap memiliki **daya pengaruh yang kuat terhadap arah kebijakan publik**. Pengaruh ini tidak selalu bersifat formal atau institusional, melainkan lebih sering dijalankan melalui **otoritas moral, legitimasi sosial, dan jaringan kelembagaan** yang luas hingga ke tingkat akar rumput.

Sebagai organisasi dengan basis sosial terbesar di Indonesia, NU memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik, memediasi konflik, serta mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dalam banyak situasi, NU tampil

sebagai **penyeimbang *(balancing force)*** yang menghubungkan antara kepentingan negara dan aspirasi masyarakat. Peran ini memungkinkan NU untuk tetap berkontribusi secara signifikan dalam kehidupan politik tanpa harus terlibat langsung dalam struktur kekuasaan.

Outcome yang diharapkan dari fase ini adalah NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang matang, yang tidak hanya berpengaruh secara moral, tetapi juga mampu membentuk ekosistem sosial-politik yang sehat dan berkelanjutan. Outcome tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **NU mandiri secara politik** mencerminkan posisi organisasi yang otonom, tidak terikat oleh kepentingan politik praktis jangka pendek, dan tidak menjadi alat dari kekuasaan tertentu. Kemandirian ini memungkinkan NU untuk bersikap objektif, kritis, sekaligus konstruktif terhadap kebijakan publik. NU mampu menjaga jarak yang sehat dengan kekuasaan—cukup dekat untuk memberikan pengaruh, namun cukup independen untuk tetap menjadi pengontrol moral. Dalam kondisi ini, NU tidak kehilangan arah nilai ketika berinteraksi dengan politik, melainkan tetap berpegang pada prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kepentingan rakyat luas.
2. T**erbangunnya ekosistem demokrasi yang sehat.** Dengan jaringan yang menjangkau hingga tingkat desa, NU berperan penting dalam membangun praktik demokrasi yang hidup di tingkat akar rumput. Ekosistem ini ditandai oleh partisipasi masyarakat yang aktif, budaya dialog dan musyawarah, serta minimnya konflik destruktif akibat perbedaan politik. NU melalui struktur organisasinya—seperti ranting, majelis taklim, dan komunitas pesantren—mendorong terbentuknya ruang-ruang publik yang inklusif dan deliberatif. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya berlangsung di tingkat nasional, tetapi juga mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari.

3. **Pesantren menjadi pusat rekonsiliasi sosial. Hal ini** menunjukkan peran strategis lembaga pendidikan NU sebagai ruang pemulihan hubungan sosial di tengah potensi konflik dan polarisasi. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga menjadi pusat pembinaan karakter, penyebaran nilai toleransi, serta mediasi konflik di masyarakat. Dalam konteks politik yang sering memicu perpecahan, pesantren hadir sebagai ruang yang menumbuhkan nilai persaudaraan (*ukhuwah*), saling menghormati, dan penyelesaian masalah secara damai. Peran ini sangat penting dalam menjaga kohesi sosial, khususnya di tengah dinamika demokrasi yang kerap diwarnai polarisasi identitas dan kepentingan.

Ketiga outcome tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Kemandirian politik NU memberikan fondasi bagi sikap objektif dan berimbang, ekosistem demokrasi lokal yang sehat menjadi ruang praksis bagi nilai-nilai tersebut, sementara pesantren memastikan bahwa seluruh proses itu berakar pada budaya damai dan rekonsiliatif. Secara keseluruhan, hal ini menempatkan NU sebagai aktor kunci dalam membangun demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga berkarakter, inklusif, dan berorientasi pada harmoni sosial.

Fase 4. 2041–2045 – Kepemimpinan Etik Nasional dan Global

Pada tahap ini NU tidak lagi hanya memainkan peran sebagai aktor penting dalam demokrasi nasional, tetapi juga mulai memasuki **ranah global sebagai rujukan model demokrasi yang etis dan inklusif.** Tahapan ini ditandai oleh kemampuan NU untuk mentransformasikan pengalaman historis dan praksis sosial-keagamaannya di Indonesia menjadi sebuah **model normatif yang relevan bagi dunia internasional**, khususnya

bagi negara-negara dengan masyarakat majemuk dan berakar kuat pada nilai keagamaan.

Dalam konteks ini, NU menawarkan suatu paradigma yang melampaui dikotomi klasik antara agama dan demokrasi. Alih-alih melihat keduanya sebagai entitas yang saling bertentangan, NU justru menunjukkan bahwa demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dalam kerangka nilai-nilai keagamaan yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Hal ini menjadi signifikan di tengah perdebatan global yang sering menempatkan agama sebagai tantangan bagi demokrasi, atau sebaliknya, demokrasi sebagai ancaman bagi identitas religius.

Salah satu kontribusi utama NU dalam tingkat global adalah promosi model demokrasi yang **mengintegrasikan nilai agama dan hak asasi manusia (HAM).** Dalam pendekatan ini, NU tidak memposisikan agama sebagai legitimasi eksklusif yang menutup ruang kebebasan, tetapi sebagai sumber etika yang memperkuat penghormatan terhadap hak-hak fundamental manusia. Ajaran Islam yang dipahami dalam perspektif Ahlussunnah wal Jamaah menjadi basis untuk mendorong nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, HAM tidak dipandang sebagai konsep asing, melainkan sebagai bagian dari prinsip kemanusiaan yang juga diajarkan oleh agama. Integrasi ini menghasilkan suatu model demokrasi yang tidak sekuler secara kaku, tetapi juga tidak teokratis secara eksklusif—melainkan sebuah **demokrasi etis-religius** yang adaptif dan kontekstual.

Selain itu, NU juga menegaskan bahwa demokrasi harus berorientasi pada **penjunjung tinggi martabat manusia *(human dignity).*** Dalam perspektif ini, politik tidak boleh direduksi menjadi sekadar kompetisi kekuasaan, melainkan harus diarahkan pada perlindungan dan pemuliaan manusia sebagai subjek utama kehidupan bernegara. Prinsip ini tercermin dalam sikap NU yang konsisten mendorong toleransi, menolak kekerasan, serta membela kelompok-kelompok rentan dan minoritas. Di

tingkat global, pendekatan ini menjadi penting, terutama dalam menghadapi meningkatnya polarisasi, konflik identitas, dan krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia.

Lebih jauh, posisi NU sebagai rujukan global juga diperkuat oleh kemampuannya membangun **narasi Islam yang damai dan demokratis**. Melalui forum-forum internasional, kerja sama lintas negara, serta diplomasi kultural, NU mempromosikan wajah Islam yang kompatibel dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme. Model ini menjadi alternatif penting di tengah munculnya dua arus ekstrem: di satu sisi, formalisme agama yang cenderung eksklusif; dan di sisi lain, sekularisme yang menafikan peran agama dalam ruang publik.

Dengan demikian, tahapan ini menandai transformasi NU dari aktor nasional menjadi **aktor normatif global** yang tidak hanya berkontribusi pada praktik demokrasi di Indonesia, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual bagi dunia. NU menunjukkan bahwa demokrasi yang berkelanjutan tidak cukup hanya bertumpu pada institusi dan prosedur, tetapi juga memerlukan **fondasi etika, nilai keagamaan yang inklusif, dan komitmen terhadap martabat manusia.**

Akhirnya, peran global NU ini mempertegas bahwa pengalaman Indonesia—khususnya melalui kontribusi NU—dapat menjadi model bagi pengembangan demokrasi di masyarakat plural. NU tidak hanya menjaga demokrasi tetap hidup, tetapi juga mengarahkan agar demokrasi memiliki **jiwa moral, orientasi kemanusiaan, dan daya inklusif yang melampaui batas-batas nasional.**

Output yang diharapkan adalah semakin meningkatnya kiprah kader NU dalam panggung global. Para kader tidak lagi terbatas berperan dalam ruang nasional, tetapi telah hadir sebagai aktor strategis dalam berbagai forum internasional—baik dalam bidang keagamaan, kemanusiaan, diplomasi, maupun pengembangan perdamaian dunia. Dengan membawa nilai-nilai Islam Nusantara yang moderat, inklusif, dan berakar pada

tradisi, kader NU mampu menawarkan perspektif alternatif dalam merespons berbagai krisis global, mulai dari konflik berbasis identitas hingga tantangan radikalisme dan disrupsi sosial.

Kehadiran kader NU di tingkat global ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif. Mereka berkontribusi dalam membangun jejaring lintas negara, mempengaruhi wacana global tentang Islam yang damai, serta menjadi jembatan antara komunitas lokal dengan aktor-aktor internasional.

Seiring dengan itu, menguatnya diplomasi masyarakat sipil menjadi salah satu penopang utama ekspansi peran tersebut. Diplomasi tidak lagi dimonopoli oleh negara, tetapi semakin melibatkan organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dan jaringan sosial sebagai aktor non-negara yang memiliki legitimasi moral dan kedekatan dengan basis komunitas. NU, dengan basis massa dan struktur organisasinya yang luas, memiliki posisi strategis dalam memainkan peran ini.

Fase 5. 2046–2050 – Ekosistem Peradaban (Demokrasi Berbasis Nilai Universal)

Fase ini merupakan puncak perkembangan NU yang tidak lagi semata dipahami sebagai organisasi keagamaan atau kekuatan sosial keumatan, melainkan telah bertransformasi menjadi **ekosistem peradaban** yang berperan aktif dalam merancang dan memengaruhi arah demokrasi global. Dalam fase ini, NU mengambil posisi sebagai salah satu arsitek normatif dan praksis dalam membangun tatanan dunia yang lebih berkeadaban, dengan menjadikan nilai-nilai universal sebagai fondasi utama kehidupan bersama.

Demokrasi, dalam perspektif yang dikembangkan oleh NU, mengalami pendalaman makna yang signifikan. Ia tidak lagi dipandang sekadar sebagai **mekanisme politik elektoral** atau prosedur institusional, melainkan sebagai sebuah **kesadaran kolektif yang hidup dalam nilai, budaya, dan etika global.**

1. Demokrasi diposisikan sebagai **sistem nilai**. Dalam konteks ini, NU menegaskan bahwa demokrasi harus berakar pada prinsip-prinsip universal seperti keadilan *('adl),* kesetaraan *(musawah)*, penghormatan terhadap martabat manusia (karamah insaniyah), serta kebebasan yang bertanggung jawab. Nilai-nilai ini tidak berdiri dalam ruang kosong, tetapi diperkaya oleh tradisi keislaman yang inklusif dan kontekstual. NU menghadirkan sintesis antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip universal, sehingga demokrasi tidak kehilangan dimensi moral-spiritualnya. Dengan demikian, demokrasi menjadi lebih dari sekadar "aturan main", tetapi menjadi **pandangan hidup yang menuntun orientasi kemanusiaan.**
2. Demokrasi berkembang menjadi **budaya publik**. Dalam fase ini, nilai-nilai demokratis terinternalisasi dalam praktik keseharian masyarakat, melampaui batas institusi formal. NU, dengan jaringan pesantren, komunitas lokal, dan organisasi sosialnya, memainkan peran penting dalam membentuk budaya dialog, toleransi, gotong royong, serta penghargaan terhadap perbedaan. Demokrasi hidup dalam interaksi sosial, dalam cara masyarakat menyelesaikan konflik, dalam sikap saling menghormati, dan dalam kebiasaan bermusyawarah. Dengan kata lain, demokrasi menjadi habitus sosial—sebuah budaya yang membentuk karakter publik yang inklusif dan resilien.
3. Demokrasi menjelma sebagai **etika global**. Di sinilah NU berkontribusi pada tataran internasional dengan menawarkan kerangka etik yang melampaui batas-batas nasional dan identitas partikular. Dalam menghadapi krisis global—seperti konflik geopolitik, ekstremisme, ketimpangan ekonomi, hingga krisis kemanusiaan—NU mendorong pendekatan berbasis etika yang mengedepankan solidaritas, keadilan global, dan tanggung jawab kolektif umat manusia. Diplomasi yang dikembangkan tidak semata

berbasis kepentingan (interest-based diplomacy), tetapi juga berbasis nilai (value-based diplomacy). NU berupaya menjadikan prinsip rahmatan lil ʻalamin sebagai landasan etik dalam tata kelola global.

Sebagai sebuah **ekosistem peradaban**, NU mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut—nilai, budaya, dan etika—dalam satu kesatuan yang saling menguatkan. Ekosistem ini melibatkan aktor-aktor yang beragam: ulama, intelektual, aktivis masyarakat sipil, hingga generasi muda global yang terhubung dalam jejaring transnasional. Melalui ekosistem ini, NU tidak hanya merespons dinamika dunia, tetapi juga secara proaktif membentuk narasi dan praktik baru tentang bagaimana demokrasi seharusnya dijalankan dalam masyarakat yang plural dan saling terhubung.

Outcome yang hendak dicapai dalam fase ini antara lain:

1. Terwujudnya **demokrasi yang matang, adil, dan berkelanjutan**. Demokrasi tidak lagi rapuh oleh polarisasi atau terjebak dalam proseduralisme semata, tetapi tumbuh sebagai sistem yang berakar kuat pada nilai keadilan, inklusivitas, dan tanggung jawab bersama. Kematangan ini tercermin dalam kemampuan masyarakat dan institusi untuk mengelola perbedaan secara konstruktif, menjamin hak-hak dasar secara setara, serta menjaga keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban. NU, melalui basis sosial dan tradisi intelektualnya, berperan dalam menanamkan kesadaran bahwa demokrasi adalah amanah moral yang harus dijaga lintas generasi.
2. Kokohnya NU sebagai **penjaga moral publik.** Peran ini tidak dimaknai sebagai otoritas yang menghakimi, melainkan sebagai sumber etika yang hidup dan membimbing ruang publik. Melalui ulama, pesantren, dan jaringan masyarakat sipilnya, NU menghadirkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, moderasi, serta penghormatan terhadap martabat manusia sebagai fondasi kehidupan bersama. Dalam dinamika sosial-politik yang kompleks, NU menjadi rujukan moral yang

mengedepankan kebijaksanaan (hikmah) dan keseimbangan (tawazun), sekaligus menjaga agar kekuasaan tidak terlepas dari tanggung jawab etik. Dengan demikian, ruang publik tidak semata diatur oleh kepentingan, tetapi juga dituntun oleh nilai.

3. Terciptanya **harmoni antara agama, negara, dan masyarakat global**. NU menegaskan bahwa agama tidak harus berada dalam posisi berseberangan dengan negara, dan negara tidak perlu menegasikan nilai-nilai spiritual dalam tata kelolanya. Sebaliknya, keduanya dapat bersinergi dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadaban. Dalam konteks global, harmoni ini meluas menjadi dialog antarperadaban, di mana nilai-nilai keagamaan berperan sebagai sumber inspirasi etik untuk menjawab tantangan bersama umat manusia.

Melalui pendekatan moderat dan inklusif, NU menjembatani berbagai kepentingan—lokal dan global, religius dan sekuler, tradisional dan modern—dalam satu kerangka yang saling menguatkan. Harmoni ini tidak bersifat statis, melainkan terus dinegosiasikan melalui dialog, kerja sama, dan komitmen pada nilai-nilai universal kemanusiaan.

4. Kepemimpinan dalam Gerakan Masyarakat Sipil

Dalam lanskap sejarah Indonesia modern, NU tidak hanya hadir sebagai organisasi keagamaan tradisional, tetapi berkembang menjadi kekuatan sipil yang dinamis dan adaptif. Transformasi peran NU dalam ranah masyarakat sipil dapat dipahami sebagai perjalanan panjang dari keterlibatan sosial yang bersifat partisipatif menuju kepemimpinan strategis yang diakui, baik di tingkat nasional maupun global.

Pada fase awalnya, NU berakar kuat dalam praksis sosial-keagamaan, terutama melalui jaringan pesantren, kiai, dan komunitas lokal. Kehadirannya menjadi penyangga moral dan sosial masyarakat, dengan fokus pada pendidikan, dakwah,

Kepemimpinan dalam Gerakan Masyarakat Sipil

2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050
Transformasi Jam'iyah	**Akselerasi Transformasi Jam'iyah**	**Kemandirian Jam'iyah**	**Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global**	**Ekosistem Peradaban**
Konsolidasi Sumber daya dan orientasi kepemimpinan gerakan sipil NU	**Mantapnya Kekuatan NU dalam gerakan masyarakat sipil**	**NU menjadi role model dalam Gerakan Masyarakat Sipil.**	**Mantapnya Kepemimpinan NU dalam gerakan masyarakat sipil, baik Tingkat nasional maupun internasional**	**Berperan aktif dalam Gerakan Masyarakat sipil internasional.**
Outcome: • Terbentuknya jaringan kepemimpinan dalam mendorong gerakan dan advokasi Masyarakat	**Outcome:** • Para pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, masyarakat sipil) mempertimbangkan sura dan rekomendasi dari gerakan NU sebagai dasar pengambilan keputusan	**Outcome:** • Para pemangku kepentingan nasional (pemerintah, swasta, masyarakat sipil) menjadikan masukan dan rekomendasi NU sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan Keputusan	**Outcome:** • Meningkatnya kepercayaan jaringan organisasi keagamaan dan Masyarakat sipil di Indonesia terhadap kepemimpinan gerakan NU	**Outcome:** • Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan global terhadap peran NU di tingkat global
Strategi: Meningkatkan kapasitas dan orientasi gerakan NU yang terintegrasi dengan sistem kaderisasi	**Strategi:** Mempekuat keterlibatan NU dalam isu-isu strategis di tingkat lokal	**Strategi:** Meningkatkan Keterlibatan aktif NU dalam isu-isu publik strategis di Indonesia	**Strategi:** Mempekuat peran kepemimpinan NU dalam jaringan organisasi keagamaan dan Masyarakat sipil di Indonesia	**Strategi:** Meningkatkan peran aktif NU dalam merespons isu-isu global

serta pemberdayaan umat. Pada tahap ini, NU lebih berfungsi sebagai *penjaga tradisi (guardian of tradition),* memastikan kesinambungan nilai-nilai keislaman yang moderat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Partisipasi NU dalam masyarakat sipil tampak dalam bentuk respons terhadap kebutuhan sosial—seperti pendidikan, keagamaan, dan solidaritas komunitas—namun belum sepenuhnya terartikulasikan sebagai kekuatan strategis yang terorganisasi dalam skala yang lebih luas.

Memasuki periode pasca-kemerdekaan hingga Orde Baru, NU mulai menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika politik nasional. Meskipun sempat terlibat dalam politik praktis, NU pada akhirnya kembali menegaskan posisinya sebagai kekuatan masyarakat sipil melalui *Khittah 1926*. Keputusan ini menjadi titik balik penting: NU menggeser orientasi dari kontestasi kekuasaan menuju penguatan basis sosial dan keagamaan. Dalam fase ini, transformasi mulai terlihat—NU tidak lagi sekadar "hadir" dalam masyarakat, tetapi mulai membentuk arah dan wacana kehidupan sosial melalui pendekatan kultural.

Reformasi 1998 menjadi katalis yang mempercepat metamorfosis NU. Demokratisasi membuka ruang bagi organisasi masyarakat sipil untuk berperan lebih aktif dalam membangun tata kelola publik. NU memanfaatkan momentum ini dengan memperluas jangkauan perannya: tidak hanya dalam pendidikan dan dakwah, tetapi juga dalam advokasi demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan resolusi konflik. Di sini, NU tampil sebagai *agen perubahan sosial*, yang tidak hanya merespons tetapi juga menginisiasi agenda-agenda strategis yang membentuk arah bangsa.

Transformasi paling signifikan terlihat ketika NU mulai mengartikulasikan nilai-nilai Islam Nusantara sebagai model keislaman yang inklusif, toleran, dan kontekstual. Gagasan ini bukan sekadar narasi kultural, melainkan strategi intelektual dan diplomatik yang memperkuat posisi NU dalam percaturan global. NU menempatkan dirinya sebagai representasi Islam moderat yang mampu menjembatani ketegangan antara tradisi dan

modernitas, antara lokalitas dan globalitas. Dalam konteks ini, NU tidak lagi terbatas sebagai organisasi domestik, tetapi menjadi *aktor transnasional* dalam wacana keislaman global.

Kepemimpinan strategis NU juga terlihat melalui keterlibatannya dalam forum-forum internasional, dialog lintas agama, serta inisiatif perdamaian global. Para pemimpin NU kerap menjadi rujukan dalam isu-isu radikalisme, toleransi, dan pembangunan masyarakat plural. Dengan basis sosial yang besar dan legitimasi kultural yang kuat, NU mampu mengubah modal sosial menjadi *kapital simbolik* yang diakui secara luas.

Pada tahap ini, transformasi NU mencapai bentuk yang lebih matang: dari partisipasi sosial menuju *kepemimpinan normatif dan strategis*. NU bukan hanya pelaku dalam masyarakat sipil, tetapi juga penentu arah (agenda setter) dalam berbagai isu krusial—baik di tingkat nasional maupun global. Ia berfungsi sebagai jembatan antara negara dan masyarakat, antara tradisi dan perubahan, serta antara Islam lokal dan dunia internasional.

Dengan demikian, perjalanan NU mencerminkan evolusi organisasi masyarakat sipil yang berhasil mengintegrasikan akar kulturalnya dengan visi strategis yang luas. Transformasi ini bukan sekadar perubahan peran, tetapi juga perubahan paradigma—dari responsif menjadi proaktif, dari lokal menjadi global, dan dari partisipan menjadi pemimpin.

Fase 1. 2026–2030 – Transformasi Jam'iyah (Memperkuat Konsolidasi Fondasi Kepemimpinan)

Pada tahap transformasi jam'iyah (2026–2030), NU menempatkan dirinya pada fase konsolidasi internal yang terarah dan strategis, sebagai fondasi bagi peran kepemimpinan yang lebih luas dalam gerakan masyarakat sipil. Fase ini bukan sekadar periode penataan organisasi, melainkan momentum krusial untuk menyelaraskan berbagai kekuatan yang selama ini tersebar dalam satu kesadaran kolektif dan visi advokasi sosial yang terpadu. Sejumlah langkah yang sudah diambil NU harus terus menerus diperkuat.

Dalam konteks ini, NU menghadapi tantangan klasik sebagai organisasi besar dengan jaringan luas: keberagaman inisiatif, otonomi kultural di tingkat lokal, dan diferensiasi program yang kadang berjalan tanpa koordinasi strategis. Oleh karena itu, konsolidasi menjadi langkah esencial—bukan untuk menyeragamkan, tetapi untuk mensinergikan. NU mulai merumuskan kerangka visi advokasi sosial yang mampu mengintegrasikan berbagai spektrum gerakannya: dari pendidikan pesantren, gerakan sosial-ekonomi, hingga advokasi kebijakan publik. Dengan demikian, arah gerakan NU tidak lagi tercerai-berai, melainkan bergerak dalam orbit yang sama, membawa agenda besar keadilan sosial, moderasi beragama, dan penguatan demokrasi berbasis nilai-nilai keislaman.

Penyatuan arah ini menghasilkan transformasi penting: NU beralih dari kumpulan inisiatif sosial menjadi ekosistem gerakan masyarakat sipil yang memiliki *coherency* strategis. Advokasi sosial tidak lagi bersifat reaktif atau sektoral, tetapi dirancang sebagai agenda jangka panjang yang terukur dan berdampak sistemik. NU, dalam fase ini, mulai mengambil posisi sebagai perancang narasi publik *(public narrative builder)* yang mampu mempengaruhi orientasi kebijakan dan kesadaran sosial secara lebih luas.

Sejalan dengan itu, aspek kaderisasi mengalami redefinisi yang signifikan. Kaderisasi NU tidak lagi dipahami semata sebagai proses reproduksi tradisi keulamaan atau kepemimpinan internal organisasi, tetapi diarahkan untuk menjawab kebutuhan kepemimpinan dalam ruang masyarakat sipil yang lebih kompleks. NU mulai mengintegrasikan sistem kaderisasi dengan kompetensi kepemimpinan yang relevan: kemampuan advokasi, literasi kebijakan publik, diplomasi sosial, hingga kapasitas membangun koalisi lintas sektor.

Dengan demikian, tahap awal (2026–2030) ini memiliki makna strategis sebagai fase *penyelarasan dan penyiapan*. NU menata ulang dirinya dari dalam: menyatukan visi, memperkuat kapasitas, dan membangun generasi kepemimpinan baru yang adaptif dan berorientasi masa depan. Konsolidasi ini menjadi

fondasi penting bagi transformasi berikutnya—ketika NU tidak hanya hadir sebagai bagian dari masyarakat sipil, tetapi tampil sebagai pemimpin yang menentukan arah gerakan sosial di tingkat nasional dan global.

Outcome utama dari fase konsolidasi ini adalah terbentuknya jaringan kepemimpinan NU yang terstruktur, terkoordinasi, dan berdaya jangkau luas dalam gerakan advokasi masyarakat. Jaringan ini bukan sekadar kumpulan tokoh atau kader di berbagai level organisasi, melainkan sebuah ekosistem kepemimpinan yang saling terhubung—dari tingkat lokal, regional, hingga nasional—dengan orientasi yang sama dalam mendorong perubahan sosial.

Dalam bentuknya yang konkret, jaringan tersebut menampilkan pola relasi yang lebih sistematis antara pusat dan daerah, antar-lembaga, serta lintas sektor. Para kader NU yang sebelumnya bergerak dalam ruang-ruang terpisah kini terintegrasi dalam satu arsitektur kepemimpinan yang memiliki peran, fungsi, dan mandat advokasi yang jelas. Hal ini memungkinkan terciptanya alur koordinasi yang efektif dalam merespons isu-isu strategis seperti keadilan sosial, penguatan demokrasi, pembangunan ekonomi berbasis komunitas, serta perlindungan kelompok rentan.

Lebih jauh, jaringan ini juga mencerminkan transformasi NU dari organisasi berbasis komunitas menjadi kekuatan advokasi yang memiliki kapasitas mobilisasi dan pengaruh kebijakan. Kepemimpinan NU tidak lagi bersifat sporadis atau individual, tetapi terlembagakan dalam sistem yang memungkinkan konsistensi gerakan dan kesinambungan agenda. Setiap simpul kepemimpinan—baik di pesantren, organisasi otonom, maupun lembaga advokasi—berfungsi sebagai node strategis yang berkontribusi pada agenda bersama.

Secara strategis, terbentuknya jaringan ini memperkuat posisi NU sebagai *collective leadership actor* dalam masyarakat sipil. NU tidak hanya memiliki basis massa yang besar, tetapi juga infrastruktur kepemimpinan yang mampu mengartikulasikan aspirasi, membangun koalisi, dan mempengaruhi arah kebijakan

publik secara sistemik. Dengan jaringan yang terstruktur ini, NU mampu bergerak lebih cepat, lebih responsif, sekaligus lebih terarah dalam menghadapi dinamika sosial yang kompleks.

Fase 2. 2031–2035 – Akselerasi Transformasi (Pengaruh dalam Pengambilan Keputusan)

Pada fase ini, NU menunjukkan transformasi penting dari sekadar kekuatan sosial-keagamaan menjadi aktor strategis dalam tata kelola publik. NU tidak lagi hanya berperan sebagai penjaga nilai-nilai moral dan keagamaan, tetapi juga secara aktif terlibat dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan publik.

Penguatan posisi ini ditandai dengan meningkatnya kapasitas kelembagaan, jaringan yang luas, serta legitimasi sosial yang kuat di tengah masyarakat. Dengan modal tersebut, NU mampu mengambil peran sebagai **pemberi rekomendasi kebijakan**, baik melalui forum-forum resmi, kajian akademik, maupun keterlibatan langsung dalam dialog kebijakan di tingkat lokal dan nasional. Rekomendasi yang diberikan tidak hanya berbasis pada pertimbangan normatif keagamaan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan kebangsaan secara komprehensif.

Di sisi lain, NU juga berkembang sebagai **mitra strategis pemerintah dan sektor swasta**. Dalam posisi ini, NU berkontribusi dalam menjembatani kepentingan negara, masyarakat, dan dunia usaha, khususnya dalam isu-isu seperti pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan, kesehatan, hingga moderasi beragama. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa NU mampu berperan sebagai aktor mediatif yang tidak hanya kritis, tetapi juga solutif.

Dengan demikian, fase ini menegaskan NU sebagai kekuatan *civil society* yang matang, adaptif, dan memiliki daya tawar signifikan dalam proses pengambilan kebijakan publik di Indonesia.

Outcome dari fase ini adalah meningkatnya pengakuan dan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap peran strategis NU. Rekomendasi yang dihasilkan NU, baik melalui kajian keilmuan, forum musyawarah, maupun advokasi kebijakan, mulai dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam proses pengambilan keputusan publik.

Pemerintah, sektor swasta, dan aktor kebijakan lainnya tidak lagi memandang NU semata sebagai otoritas moral, tetapi juga sebagai mitra yang memiliki kapasitas analitis, legitimasi sosial, dan sensitivitas terhadap aspirasi masyarakat akar rumput. Hal ini mendorong terwujudnya proses kebijakan yang lebih inklusif, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, meningkatnya pertimbangan terhadap rekomendasi NU mencerminkan penguatan posisi organisasi ini sebagai aktor berpengaruh dalam ekosistem kebijakan publik di Indonesia.

Fase 3. 2036–2040 – Kemandirian Jam'iyah (NU sebagai Role Model Gerakan Sipil)

Pada tahap ini, NU telah melampaui peran sebagai organisasi yang sekadar berpengaruh, dan bertransformasi menjadi model ideal gerakan masyarakat sipil yang efektif, adaptif, serta berintegritas tinggi. Keberhasilan NU dalam memadukan nilai-nilai keagamaan dengan pendekatan profesional dan kontekstual menjadikannya rujukan penting dalam pengelolaan gerakan sosial di Indonesia, bahkan di tingkat global.

Pengakuan ini tercermin dari posisinya sebagai **rujukan utama dalam advokasi sosial**. Berbagai inisiatif, pandangan, dan rekomendasi NU kerap dijadikan acuan dalam merespons isu-isu strategis seperti keadilan sosial, pluralisme, pemberdayaan ekonomi, hingga resolusi konflik. Pendekatan NU yang mengedepankan moderasi, inklusivitas, dan keberpihakan pada kelompok rentan

memperkuat legitimasi moral sekaligus efektivitas advokasinya di berbagai level.

Lebih dari itu, NU juga semakin diakui sebagai **standar praktik baik dalam pengelolaan gerakan sipil.** Tata kelola organisasi yang berbasis nilai, didukung oleh jaringan kelembagaan yang luas dan berlapis, menunjukkan bagaimana gerakan masyarakat sipil dapat dikelola secara berkelanjutan, akuntabel, dan berdampak luas. Praktik-praktik ini menjadi inspirasi bagi organisasi lain dalam membangun kredibilitas, memperluas pengaruh, serta menjaga konsistensi antara nilai dan aksi.

Dengan demikian, fase ini menegaskan posisi NU bukan hanya sebagai aktor, tetapi sebagai benchmark dalam transformasi dan penguatan peran masyarakat sipil yang konstruktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Outcome pada tahap ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan legitimasi yang semakin tinggi terhadap NU sebagai aktor kunci dalam ruang publik. Pemangku kepentingan—baik dari unsur pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil—tidak hanya mempertimbangkan, tetapi secara aktif menjadikan NU sebagai **referensi utama dalam pengambilan keputusan**.

Hal ini mencerminkan bahwa pandangan, rekomendasi, dan praktik yang dikembangkan oleh NU telah dipandang memiliki kualitas substantif, relevansi kontekstual, serta kredibilitas moral yang kuat. NU dinilai mampu menghadirkan perspektif yang seimbang antara nilai, kepentingan publik, dan realitas sosial, sehingga menjadi rujukan yang dapat diandalkan dalam merespons berbagai isu strategis.

Lebih jauh, posisi ini memperlihatkan bahwa NU telah berhasil membangun otoritas epistemik sekaligus kepercayaan institusional. Keputusan-keputusan yang merujuk pada pandangan NU cenderung memiliki tingkat penerimaan yang lebih luas di masyarakat, karena dianggap selaras dengan aspirasi akar rumput dan nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, outcome ini menegaskan peran NU sebagai pusat rujukan yang

tidak hanya berpengaruh, tetapi juga menentukan arah dalam proses pengambilan kebijakan dan praktik sosial di Indonesia.

Fase 4. 2041–2045 – Kepemimpinan Etik Nasional dan Global

Pada fase ini, NU mencapai puncak transformasi sebagai **pemimpin gerakan masyarakat sipil**, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di panggung global. NU tidak lagi sekadar berperan sebagai organisasi keagamaan dengan pengaruh domestik, melainkan tampil sebagai aktor transnasional yang membawa gagasan, nilai, dan praktik yang relevan bagi tantangan kemanusiaan global.

Kepemimpinan ini ditopang oleh keberhasilan NU dalam merumuskan dan mempraktikkan model **Islam moderat** yang menekankan keseimbangan antara tradisi dan modernitas, antara teks dan konteks, serta antara identitas keagamaan dan komitmen kebangsaan. Model ini menjadi rujukan penting dalam merespons berbagai isu global seperti ekstremisme, intoleransi, serta krisis identitas di dunia Muslim.

Selain itu, NU juga mempromosikan **demokrasi inklusif** sebagai kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini menempatkan keberagaman sebagai kekuatan, serta mendorong partisipasi luas dari berbagai kelompok sosial tanpa diskriminasi. Dalam praktiknya, NU menunjukkan bagaimana nilai-nilai demokrasi dapat selaras dengan prinsip-prinsip keagamaan dan kearifan lokal.

Lebih jauh, NU mengembangkan **advokasi berbasis kemanusiaan** yang melampaui sekat-sekat identitas. Fokus pada perlindungan martabat manusia, keadilan sosial, dan solidaritas global menjadikan NU sebagai aktor yang relevan dalam berbagai isu lintas negara, seperti kemiskinan, konflik, perubahan iklim, hingga krisis pengungsi.

Dengan kombinasi ketiga pilar tersebut, NU tidak hanya berperan sebagai partisipan, tetapi sebagai pengarah dalam

Dengan legitimasi moral, basis massa yang luas, serta pengalaman panjang dalam mengelola keberagaman, NU membawa perspektif baru yang menekankan moderasi, keadilan, dan kemanusiaan sebagai fondasi utama gerakan sipil global.

diskursus dan praktik gerakan masyarakat sipil global. Fase ini menegaskan posisi NU sebagai model kepemimpinan yang mengintegrasikan nilai, kapasitas, dan dampak dalam skala yang lebih luas.

Outcome pada fase ini adalah **meningkatnya kepercayaan terhadap kepemimpinan NU**, baik di tingkat nasional maupun internasional. NU dipandang tidak hanya sebagai organisasi keagamaan terbesar, tetapi sebagai aktor moral dan sosial yang memiliki kapasitas kepemimpinan yang kredibel, visioner, dan responsif terhadap dinamika global.

Di tingkat nasional, kepercayaan ini terwujud melalui semakin kuatnya peran NU sebagai penyangga stabilitas sosial, penjaga nilai-nilai moderasi, serta mitra strategis dalam merespons isu-isu kebangsaan. Pandangan dan inisiatif NU dianggap mampu merangkul keberagaman, meredam konflik, serta memperkuat kohesi sosial, sehingga menjadi rujukan penting dalam menjaga harmoni kehidupan berbangsa.

Sementara itu, di tingkat internasional, NU memperoleh pengakuan sebagai representasi Islam yang damai, inklusif, dan solutif. Kepemimpinan NU dijadikan inspirasi dalam berbagai forum global yang membahas isu-isu seperti ekstremisme, dialog antaragama, dan krisis kemanusiaan. Kepercayaan ini membuka ruang kolaborasi lintas negara dan lintas aktor, sekaligus memperkuat posisi NU sebagai pemimpin gerakan masyarakat sipil yang berdaya pengaruh secara global.

Fase 5. 2046–2050 – Ekosistem Peradaban (Civil Society sebagai Kekuatan Global)

Pada fase puncak transformasi ini, NU telah melampaui peran sebagai aktor nasional maupun global yang berpengaruh, dan beralih menjadi **bagian integral dari arsitektur masyarakat sipil global**. NU tidak lagi sekadar merespons dinamika dan krisis global, tetapi aktif membentuk, mengarahkan, dan menginisiasi solusi atas berbagai tantangan kemanusiaan lintas batas.

Dalam posisi ini, NU tampil sebagai **co-creator solusi global**, berkolaborasi dengan berbagai aktor internasional—mulai dari organisasi masyarakat sipil, lembaga multilateral, hingga jaringan lintas agama—untuk merumuskan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Kontribusi NU tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional, melalui pengembangan model, program, dan kebijakan yang dapat direplikasi dalam konteks global. Pendekatan ini memperlihatkan kapasitas NU dalam menjembatani nilai lokal dengan kebutuhan global secara konstruktif.

Lebih jauh, NU juga memainkan peran strategis dalam **menentukan arah gerakan masyarakat sipil dunia**. Dengan legitimasi moral, basis massa yang luas, serta pengalaman panjang dalam mengelola keberagaman, NU membawa perspektif baru yang menekankan moderasi, keadilan, dan kemanusiaan sebagai fondasi utama gerakan sipil global. Gagasan dan praktik NU mulai membentuk diskursus internasional tentang bagaimana masyarakat sipil dapat berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang sekaligus penggerak perubahan yang positif.

Fase ini menegaskan bahwa NU tidak hanya menjadi bagian dari ekosistem global, tetapi turut menyusun fondasi nilai, strategi, dan arah masa depan gerakan masyarakat sipil di dunia. NU hadir sebagai aktor yang tidak hanya relevan, tetapi juga menentukan dalam membentuk tatanan global yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban.

Outcome pada fase ini tercermin dalam **tingginya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan global terhadap NU** sebagai aktor kunci dalam arsitektur masyarakat sipil dunia. NU dipandang bukan hanya sebagai representasi organisasi keagamaan terbesar, tetapi sebagai mitra strategis yang memiliki integritas, kapasitas, serta komitmen kuat terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal.

Kepercayaan ini terbangun dari konsistensi NU dalam menghadirkan pendekatan yang moderat, inklusif, dan

solutif dalam merespons berbagai isu global. Para pemangku kepentingan—termasuk lembaga internasional, organisasi masyarakat sipil global, pemerintah, hingga jaringan lintas agama—menilai NU sebagai aktor yang mampu menjembatani perbedaan, merumuskan solusi bersama, serta menjaga keseimbangan antara nilai lokal dan kepentingan global.

Lebih jauh, tingginya kepercayaan tersebut mendorong semakin luasnya ruang kolaborasi strategis yang melibatkan NU dalam berbagai agenda global, mulai dari perdamaian, keadilan sosial, hingga krisis kemanusiaan. NU tidak hanya dilibatkan, tetapi juga dipercaya untuk berperan aktif dalam merancang dan mengimplementasikan inisiatif yang berdampak lintas negara.[]

Dimensi VII

Peran NU dalam Peradaban Dunia

Peran NU dalam peradaban dunia dapat dipahami sebagai sebuah perjalanan transformasi jangka panjang yang bergerak secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan—dari fase konsolidasi internal menuju terbentuknya ekosistem peradaban global yang diakui dan diadopsi dunia. **Perjalanan ini mencerminkan proses evolusi strategis NU dalam mentransformasikan kekuatan tradisi, jaringan ulama, dan nilai-nilai Aswaja menjadi daya pengaruh global yang mampu menembus batas-batas geografis, politik, dan budaya.** Dalam setiap tahapannya, NU tidak hanya memperluas jangkauan peran, tetapi juga memperdalam kualitas kontribusinya—mulai dari penguatan

kapasitas kelembagaan, pembangunan otoritas keilmuan dan moral, hingga pembentukan jejaring global yang solid dan berkelanjutan.

Lebih jauh, transformasi ini menunjukkan bahwa NU bergerak dari posisi sebagai aktor domestik yang berakar kuat pada tradisi pesantren menuju aktor global yang mampu membingkai narasi Islam moderat dalam konteks peradaban dunia. **Dengan pendekatan yang mengintegrasikan nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan, NU secara konsisten mengembangkan model peradaban yang tidak hanya relevan bagi dunia Muslim, tetapi juga kompatibel dengan kebutuhan masyarakat global yang plural, dinamis, dan penuh tantangan.** Pada akhirnya, proses panjang ini bermuara pada terbentuknya suatu ekosistem peradaban Nahdliyin yang tidak sekadar menjadi rujukan normatif, tetapi juga praksis hidup bersama yang diakui, diterima, dan direplikasi di berbagai belahan dunia.

Fase 1. (2026–2030): Transformasi Jam'iyah

Pada tahap awal ini, NU memasuki fase penguatan identitas dan posisi sebagai representasi utama Islam moderat di tingkat global. Capaian utama yang ditandai adalah meningkatnya pengakuan dunia terhadap NU sebagai wajah Islam Wasathiyah, Islam rahmatan lil 'alamin, dan Islam kemanusiaan yang mampu menawarkan solusi atas konflik global.

NU juga berhasil menempatkan diri sebagai simpul penting dalam jaringan aktor keagamaan transnasional serta mengonsolidasikan perannya sebagai pusat jejaring *Religious Transnational Actors* (RTA). Melalui diplomasi keagamaan yang semakin intensif dan sistematis, NU mulai memperluas pengaruhnya dalam forum internasional strategis.

Outcome utama tahap ini adalah terbentuknya legitimasi global awal: NU dikenal luas, jaringan diplomasi aktif, serta meningkatnya peran dalam percakapan global tentang perdamaian

dan inklusivitas. **Legitimasi ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga operasional, tercermin dalam meningkatnya kepercayaan aktor-aktor internasional—baik negara, organisasi multilateral, maupun masyarakat sipil global—terhadap NU sebagai mitra strategis dalam mengelola isu-isu keagamaan dan kemanusiaan.** Pengakuan tersebut diperkuat oleh konsistensi NU dalam menghadirkan narasi Islam moderat yang kontekstual dan solutif, serta kemampuannya membangun jembatan dialog lintas agama, budaya, dan peradaban.

Lebih jauh, jaringan diplomasi yang aktif memungkinkan NU untuk mengartikulasikan nilai-nilai Islam Nusantara dalam berbagai forum global, sehingga memperluas pengaruhnya dalam membentuk opini dan kebijakan internasional. **Peningkatan peran NU dalam percakapan global juga menandai pergeseran posisi dari sekadar partisipan menjadi kontributor gagasan, di mana NU mulai berperan dalam merumuskan agenda-agenda strategis terkait perdamaian dunia, koeksistensi, dan keadilan global.** Dengan demikian, outcome pada tahap ini menjadi fondasi penting bagi tahapan berikutnya, karena telah membangun kepercayaan, visibilitas, dan kredibilitas NU sebagai aktor peradaban di tingkat internasional.

Fase 2. (2031–2035): Akselerasi Transformasi Jam'iyah

Memasuki fase akselerasi, NU mengalami peningkatan signifikan dalam kapasitas globalnya. NU tidak hanya dikenal, tetapi juga diakui sebagai episentrum global dalam pengembangan Islam Aswaja, humanitarian Islam, dan keilmuan moderat.

Capaian penting pada tahap ini meliputi menguatnya jaringan global Nahdliyin, berkembangnya diplomasi perdamaian internasional, serta diakuinya model Indonesia–NU–Pancasila sebagai referensi dunia Muslim dalam memadukan Islam, demokrasi, dan pluralisme. NU juga semakin aktif sebagai aktor strategis dalam membentuk tatanan dunia multipolar yang damai.

Outcome utama tahap ini adalah meningkatnya otoritas epistemik dan diplomatik NU di tingkat global serta terbentuknya pengaruh nyata dalam arsitektur hubungan internasional berbasis perdamaian. **Peningkatan otoritas epistemik tersebut tercermin dari diakuinya kerangka pemikiran Aswaja Nahdliyah sebagai rujukan intelektual dalam merumuskan pendekatan keislaman yang moderat, kontekstual, dan responsif terhadap tantangan global, baik dalam ranah akademik, kebijakan publik, maupun diskursus lintas agama.** NU tidak hanya menjadi konsumen wacana global, tetapi juga produsen gagasan yang diperhitungkan dalam membentuk paradigma keagamaan dunia.

Di sisi lain, penguatan kapasitas diplomatik NU ditandai dengan kemampuannya membangun hubungan strategis lintas negara, lembaga internasional, dan komunitas global, sehingga NU semakin efektif dalam memainkan peran mediasi, advokasi, dan fasilitasi dialog pada isu-isu konflik, kemanusiaan, dan keadilan sosial**. Pengaruh nyata dalam arsitektur hubungan internasional terlihat dari keterlibatan NU dalam mendorong lahirnya inisiatif perdamaian, membangun norma-norma global berbasis nilai kemanusiaan, serta berkontribusi dalam pembentukan tatanan dunia yang lebih inklusif dan seimbang.** Dengan demikian, NU tidak hanya menjadi aktor moral, tetapi juga aktor strategis yang memiliki daya bentuk terhadap arah hubungan internasional yang berlandaskan perdamaian dan keberlanjutan.

Fase 3. (2036–2040): Kemandirian Jam'iyah

Pada fase ini, NU tidak hanya tampil sebagai organisasi keagamaan, tetapi menjelma menjadi kekuatan peradaban yang memiliki daya jangkau global. Kemandirian institusional tercermin dari kemampuan NU dalam mengelola jaringan pendidikan, ekonomi, sosial, dan keagamaan secara terintegrasi, tanpa ketergantungan yang dominan pada aktor eksternal. Berbagai

lembaga strategis yang dimiliki NU—mulai dari pesantren, perguruan tinggi, lembaga Pendidikan, lembaga filantropi, hingga forum dialog internasional—menjadi instrumen efektif dalam menyebarkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil 'alamin*.

Pada saat yang sama, kematangan peradaban NU terlihat dari kapasitasnya dalam memformulasikan gagasan keislaman yang kontekstual dan relevan dengan tantangan global, seperti isu perdamaian dunia, toleransi antaragama, krisis kemanusiaan, serta transformasi digital. NU mampu memainkan peran sebagai mediator moral dan kultural di tingkat internasional, menghadirkan model Islam moderat yang adaptif namun tetap berakar kuat pada tradisi.

Lebih jauh, peran strategis yang dijalankan NU pada fase ini tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif dan visioner. NU secara aktif membangun jejaring global dengan berbagai institusi lintas negara dan lintas agama, memperkuat diplomasi kultural, serta berkontribusi dalam pembentukan tatanan dunia yang lebih adil dan harmonis. Dengan demikian, NU tidak hanya menjadi aktor domestik, tetapi telah bertransformasi menjadi subjek penting dalam arsitektur peradaban global kontemporer.

Outcome utama pada tahap ini ditandai oleh menguatnya NU sebagai entitas peradaban global yang memiliki otonomi penuh dalam menentukan arah geraknya, baik dalam ranah pemikiran, kelembagaan, maupun aksi sosial-kemanusiaan. Independensi ini tercermin dalam kemampuan NU untuk merumuskan agenda strategisnya sendiri tanpa terkooptasi oleh kepentingan politik jangka pendek, sekaligus tetap adaptif terhadap dinamika global yang terus berubah.

Sebagai institusi yang berpengaruh dalam resolusi konflik, NU tidak hanya berperan sebagai aktor normatif yang menyerukan perdamaian, tetapi juga sebagai fasilitator dialog dan rekonsiliasi lintas identitas—agama, budaya, maupun geopolitik. Pendekatan berbasis kearifan tradisi dan nilai moderasi yang diusung NU mampu menghadirkan model penyelesaian konflik yang lebih

berkelanjutan, karena mengedepankan aspek kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Tahap 4. (2041–2045): Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional dan Global

Pada tahap ini, kepemimpinan etik NU mencapai bentuk paling matang, di mana nilai-nilai moral, spiritual, dan kemanusiaan yang telah lama dipupuk dalam tradisi NU terartikulasikan secara nyata dalam panggung global. Para kader dan pemimpin NU tampil bukan sekadar sebagai representasi organisasi, melainkan sebagai figur-figur otoritatif yang mampu memadukan integritas personal, kedalaman keilmuan, dan sensitivitas sosial dalam merespons berbagai krisis global, seperti konflik geopolitik, ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi.

Kepemimpinan etik yang dikembangkan NU pada fase ini ditandai oleh kemampuan untuk menghadirkan solusi berbasis nilai *(value-based solutions)*, yang tidak hanya efektif secara pragmatis tetapi juga berakar pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan martabat manusia. Dalam berbagai forum internasional—baik antarnegara, organisasi multilateral, maupun jaringan masyarakat sipil global—NU menjadi rujukan dalam merumuskan arah kebijakan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Outcome utama pada tahap ini semakin diperteguh oleh mengkristalnya posisi NU sebagai pusat rujukan etik global dalam tata kelola dunia. Dominasi kepemimpinan etik NU tidak dimaknai sebagai hegemoni kekuasaan, melainkan sebagai keunggulan moral dan intelektual yang diakui luas oleh komunitas internasional. Nilai-nilai yang diusung NU—seperti moderasi, keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan—menjadi landasan normatif dalam penyusunan kebijakan global di berbagai sektor strategis.

Terbentuknya aliansi strategis lintas negara menunjukkan bahwa NU tidak bergerak secara soliter, melainkan sebagai penggerak jejaring kolaboratif global yang melibatkan negara,

organisasi keagamaan, lembaga internasional, dan aktor masyarakat sipil. Aliansi ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi terinstitusionalisasi dalam bentuk kerja sama konkret di bidang resolusi konflik, pendidikan perdamaian, penguatan demokrasi, serta penanganan krisis kemanusiaan. Dengan pendekatan yang inklusif dan dialogis, NU mampu menjembatani perbedaan kepentingan dan membangun kepercayaan antaraktor global.

Fase 5. (2046–2050): Ekosistem Peradaban

Pada tahap ini, NU mencapai formasi paling komprehensif sebagai arsitek ekosistem peradaban global yang terintegrasi. Ekosistem ini tidak hanya mencakup dimensi keagamaan, tetapi juga meliputi sistem pendidikan, ekonomi, teknologi, budaya, serta tata kelola sosial-politik yang saling terhubung dalam satu kerangka nilai yang kohesif. Model peradaban Nahdliyin yang berakar pada tradisi, namun terbuka terhadap inovasi, tampil sebagai paradigma alternatif bagi dunia dalam menghadapi krisis multidimensional yang kompleks.

Keberhasilan NU pada tahap ini terlihat dari kemampuannya mentransformasikan nilai-nilai lokal menjadi standar universal yang dapat diadaptasi lintas konteks. Prinsip t*awasuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang), dan *i'tidal* (adil) tidak lagi hanya menjadi norma internal, melainkan telah berfungsi sebagai fondasi operasional dalam berbagai sistem global, mulai dari pendidikan multikultural, ekonomi berkeadilan, hingga resolusi konflik berbasis komunitas.

Lebih jauh, ekosistem peradaban yang dibangun NU bersifat adaptif dan berkelanjutan, mampu merespons perkembangan zaman tanpa kehilangan orientasi etiknya. NU tidak hanya menjadi penggagas, tetapi juga menjadi pusat orkestrasi berbagai aktor global dalam menciptakan inovasi sosial dan kelembagaan yang berdampak luas. Kolaborasi lintas sektor—antara negara, lembaga internasional, komunitas agama, dan sektor swasta—terjalin dalam

kerangka nilai yang sama, sehingga menghasilkan sinergi global yang konstruktif.

Outcome utama pada tahap ini mengukuhkan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu pilar utama dalam arsitektur peradaban global melalui proses institusionalisasi yang matang dan berkelanjutan. Peradaban Nahdliyin tidak lagi hadir sebagai wacana atau praktik terbatas, melainkan telah terlembagakan dalam berbagai sistem global—baik dalam bidang pendidikan, tata kelola sosial, ekonomi berkeadilan, maupun praktik kehidupan lintas budaya. Model ini menjadi acuan baku (reference framework) yang diadopsi secara luas karena terbukti mampu menjawab tantangan zaman secara adaptif sekaligus menjaga keseimbangan nilai-nilai kemanusiaan.

Keberlanjutan lintas generasi menjadi ciri utama dari capaian tahap ini. NU berhasil mentransmisikan nilai, tradisi, dan inovasi peradabannya secara sistematis kepada generasi berikutnya melalui ekosistem pendidikan, kaderisasi, dan kepemimpinan yang berkesinambungan. Dengan demikian, kekuatan peradaban Nahdliyin tidak bergantung pada figur atau momentum tertentu, tetapi bertumpu pada sistem yang hidup dan terus berkembang. Hal ini memastikan bahwa kontribusi NU tetap relevan dan berdaya guna dalam jangka panjang, bahkan di tengah perubahan global yang sangat dinamis.

Pengakuan historis terhadap NU semakin mengokohkan posisinya sebagai tonggak penting dalam sejarah peradaban dunia. Kontribusi NU dalam membangun perdamaian, mendorong moderasi beragama, serta merawat harmoni sosial lintas identitas diakui sebagai bagian integral dari perjalanan umat manusia menuju tatanan global yang lebih berkeadaban. Dalam perspektif ini, NU tidak hanya dikenang sebagai organisasi keagamaan, tetapi sebagai agen transformasi peradaban yang telah memberikan arah baru bagi dunia—menjadikan nilai-nilai inklusivitas, keadilan, dan kemanusiaan sebagai fondasi utama kehidupan global di masa depan.

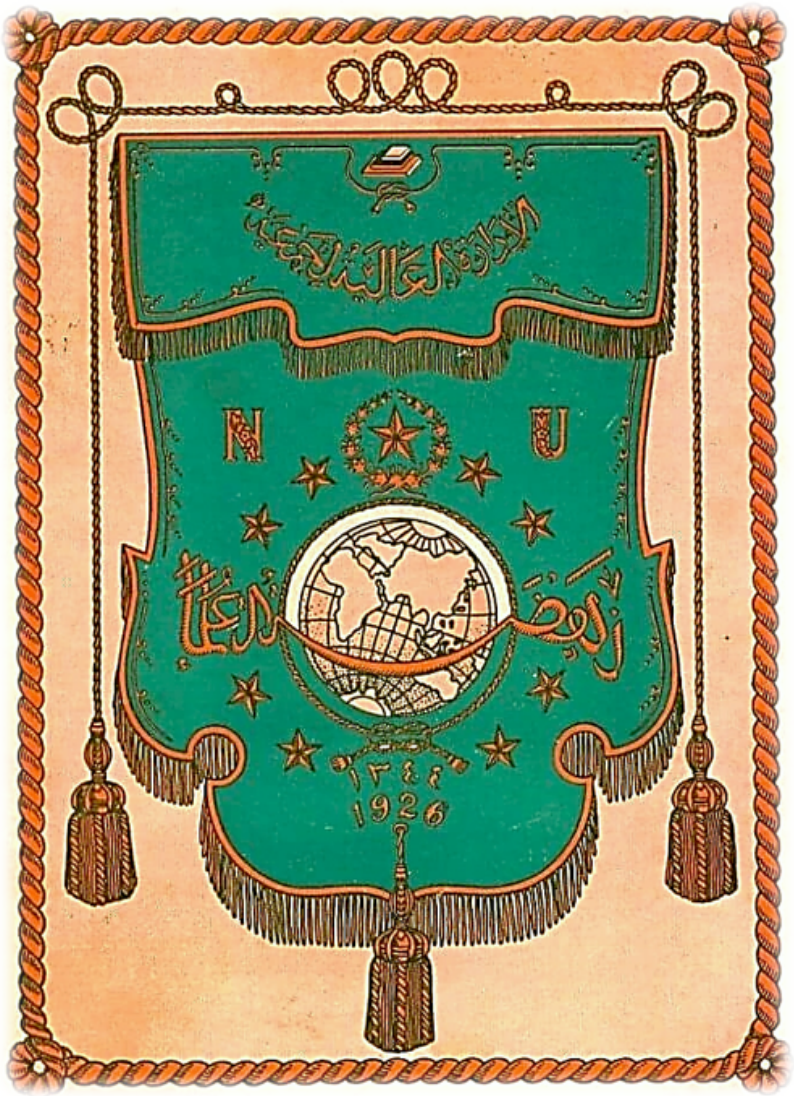
الإدارة العالمية لجمعية
N U
نهضة العلماء
١٣٤٤
1926

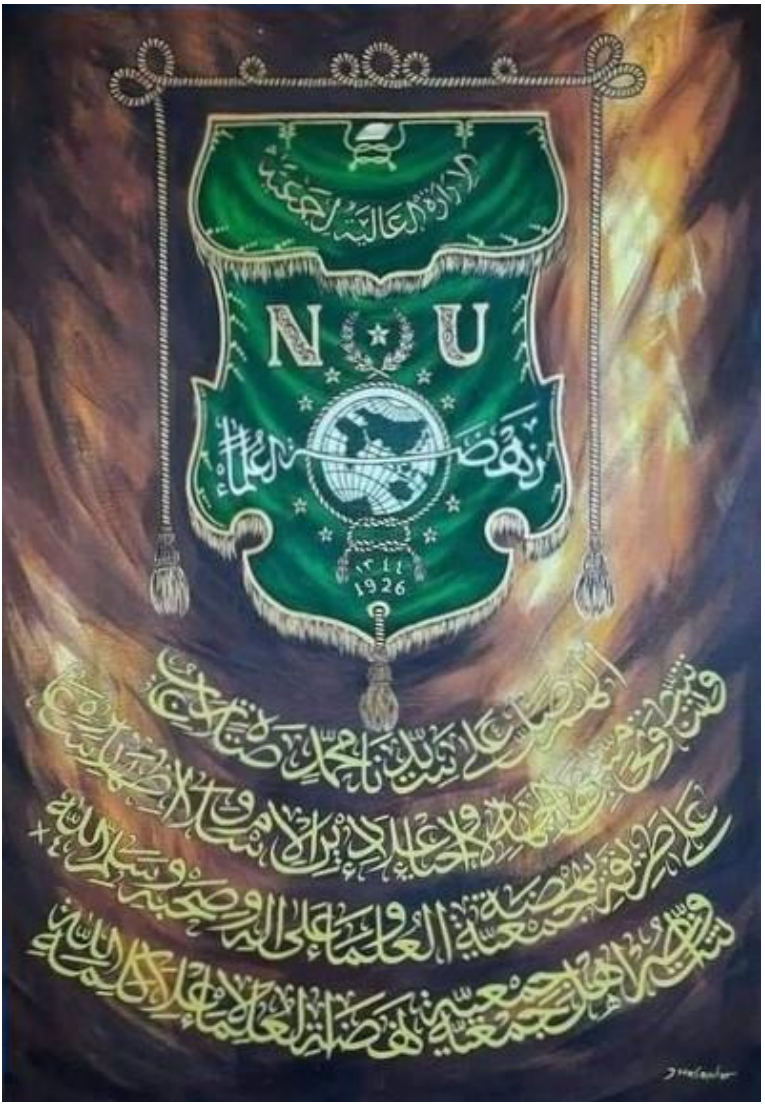
N U
1926

الإدارة العالية لجمعية
N
U
نهضة العلماء
١٣٤٤
1926

نهضة العلماء
N U